



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KEUANGAN/ *FINANCIAL STATEMENTS*

Untuk Periode Yang Berakhir/
For The Periods Ended
31 Desember 2020 dan 2019/
December 31, 2020 and 2019

Disertai/*With*
Laporan Auditor Independen/
Independent Auditor's Report

Jl. Gatot Subroto Kav.31 Jakarta
Telp (021) 25549000 ext. 3183 Fax (021) 5731627

**DAFTAR ISI/
TABLE OF CONTENTS**

**Halaman/
Page**

Surat Pernyataan Sekretaris Jenderal		<i>The Secretary General Statement</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditor's Report</i>
Neraca	1	<i>Balance Sheet</i>
Laporan Realisasi Anggaran	2	<i>Statements Of Budget Realization</i>
Laporan Operasional	3	<i>Statements of Operation</i>
Laporan Perubahan Ekuitas	4	<i>Statements of Changes in Equity</i>
Catatan atas Laporan Keuangan	5 - 71	<i>Notes to Financial Statements</i>



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jl. Jendral Gatot Subroto Kav. 31, Jakarta Pusat 10210
Telp. (021) 25549000, Fax. (021) 5720909

**SURAT PERNYATAAN SEKRETARIS JENDERAL
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN UNTUK PERIODE
YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**THE SECRETARY-GENERAL STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR
FINANCIAL STATEMENTS FOR THE PERIOD
ENDED DECEMBER 31, 2020
THE AUDIT BOARD OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bahtiar Arif
Alamat Kantor : Jl. Jend. Gatot Subroto
Kav.31
Jakarta Pusat 10210
Jabatan : Sekretaris Jenderal
Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia

We, the undersigned:

Name : Bahtiar Arif
Office Address : Jl. Jend. Gatot Subroto
Kav.31
Jakarta Pusat 10210
Title : Secretary General
The Audit Board of
The Republic of Indonesia

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
2. Laporan keuangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material terhadap laporan keuangan;
4. Kami bertanggung jawab atas kepatuhan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap peraturan perundang-undangan dan sistem pengendalian internal.

Declare that:

1. *We are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of The Audit Board of The Republic of Indonesia;*
2. *The financial statements of The Audit Board of The Republic of Indonesia has been prepared and presented in accordance with Government Accounting Standards in Indonesia;*
3. a. *All information in the financial statements of The Audit Board of The Republic of Indonesia has been disclosed in a complete and truthful manner;*
b. *The financial statements of The Audit Board of The Republic of Indonesia do not contain misleading information or material facts, and we have not omitted any information or facts that would be material to the financial statements;*
4. *We are responsible for compliance to the regulations and internal control system of The Audit Board of The Republic of Indonesia.*

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This is our declaration, which has been made truthfully.

Jakarta, 22 April 2021/Jakarta, April 22, 2021

Atas nama dan mewakili Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia/
For and on behalf of The Audit Board of The Republic of Indonesia

Bahtiar Arif
NIP. 197005051990031001



No.00053/2.1309/AU.1/11/0071-1/1/IV/2021

No. 00053/2.1309/AU.1/11/0071-1/1/IV/2021

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI dan

*Chairman of The House of Representative
of The Republic Indonesia And
Chairman of The Audit Board of The
Republic of Indonesia*

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI

Kami telah mengaudit laporan keuangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terlampir, yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2020, serta laporan realisasi anggaran, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

We have audited the accompanying the financial statements of the Audit Board of The Republic of Indonesia (BPK RI), which comprise the balance sheet as of December 31, 2020, and statements of budget realization, statement of operation and statement changes in equity for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan

Management Responsibility for the Financial Statements

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Government Accounting Standards in Indonesia, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Tanggung Jawab Auditor

Auditor's Responsibility

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants and the Government Auditing Standards established by the Audit Board of the Republic of Indonesia. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) tanggal 31 Desember 2020, realisasi anggaran serta kinerja keuangannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan di Indonesia.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Audit Board of The Republic of Indonesia (BPK RI) as of December 31, 2020, and its budget realization and the financial performance for the year then ended in accordance with Government Accounting Standards in Indonesia.

Laporan atas Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Laporan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian internal kami sampaikan secara terpisah kepada manajemen dengan laporan kami No. 00053/2.1309/UU.1/11/0071-1/1/IV/2021 dan 00053/2.1309/IC.1/11/0071-1/1/IV/2021.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

Compliance with laws and regulations and internal control we submit in separate reports to the management with our report No. 00053/2.1309/UU.1/11/0071-1/1/IV/2021 and 00053/2.1309/IC.1/11/0071-1/1/IV/2021.

Hal Lain

Laporan keuangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) pada tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disajikan sebagai angka-angka koresponding terhadap laporan

Other Matter

The financial statements of the Audit Board of The Republic of Indonesia (BPK RI) as of December 31, 2019 and for the year then ended, which are presented as corresponding figures to the financial statements as of

keuangan tanggal 31 Desember 2020 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut, diaudit oleh auditor independen lain dengan laporannya No. 00018/2.1229/AU.1/11/0360-2/1/V/2020 tanggal 4 Mei 2020 yang menyatakan opini tanpa modifikasi atas laporan keuangan tersebut.

December 31, 2020 and for the period then ended, were audited by other independent auditors whose report No. 00018/2.1229/AU.1/11/0360-2/1/V/2020 dated May 4, 2020 expressed an unmodified opinion those the financial statements.

Kantor Akuntan Publik/*Registered Public Accountants*

Husni, Wibawa & Rekan



Drs. Husni Arvan, CA., CPA.

Registrasi Akuntan Publik No. AP.0071/ Public Accountant Register No AP.0071

Izin KAP No. 20.2.1309/Firm License No. 20.2.1309

22 April 2021/April 22, 2021



	Catatan/ Notes	2020	2019	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR	5.5.a			CURRENT ASSETS
Kas Lainnya dan Setara Kas	5.5.a.1,9	1.362.172.130	5.899.219.611	Other Cash and Cash Equivalent
Belanja Dibayar di Muka	5.5.a.2, 10	169.600.126	365.650.226	Prepaid Expenditure
Piutang Bukan Pajak	5.5.a.3, 11	5.598.331.720	917.662.114	Non-Taxable Receivable
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	5.5.a.4, 12	(104.502.185)	(81.098.836)	Allowance for doubtful- Non-Taxable Receivable
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	5.5.1.5,13	99.976.996	89.976.996	Current Portion of - Indemnification Claim
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	5.5.a,14	(13.887.801)	(13.837.802)	Allowance for doubtful - Current Portion Indemnification Claim
Persediaan	5.5.a.6,15	16.181.445.206	15.122.730.192	Inventories
Jumlah Aset Lancar		23.293.136.192	22.300.302.501	Total Current Assets
ASET NON LANCAR				NON CURRENT ASSETS
Aset Tetap				Fixed Assets
Tanah	5.5.b,15	5.920.800.077.963	5.980.428.125.661	Land
Peralatan dan Mesin	5.5.b,15	2.159.391.106.309	1.991.163.973.440	Equipment and Machinery
Gedung dan Bangunan	5.5.b,15	2.544.150.887.350	2.508.643.269.633	Properties and Buildings
Jalan Irigasi dan Jaringan	5.5.b,15	394.002.898.853	390.041.392.700	Road, Irrigation, and Transmission Network
Aset Tetap Lainnya	5.5.b,15	19.964.084.075	17.891.717.899	Other Fixed Assets
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.5.b,15	148.295.000	48.800.000	Construction in Progress
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	5.5.b,15	(2.300.441.430.959)	(2.086.930.963.768)	Accumulated Depreciation
Jumlah Aset Tetap		8.738.015.918.591	8.801.286.315.565	Total Fixed Assets
Piutang Jangka Panjang	5.5.d,16			Long-term Receivables
Piutang Tagihan TP/TGR		3.070.515.603	3.055.767.909	Indemnification Claim
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Tagihan TP/TGR		(2.626.452.252)	(2.588.888.511)	Allowance for doubtful - Indemnification Claim
Jumlah Piutang Jangka Panjang		444.063.351	466.879.398	Total Long-term Receivables
Aset Lainnya				Other Assets
Aset Tak Berwujud	5.5.e,17	181.618.568.202	163.565.836.169	Intangible Assets
Aset Lain-Lain	5.5.e,17	8.561.600.761	10.117.675.753	Other Assets
Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya	5.5.e,17	(131.361.355.608)	(119.348.328.150)	Amortization Others asset
Jumlah Aset Lainnya		58.818.813.355	54.335.183.772	Total Other Assets
Jumlah Aset Non Lancar		8.797.278.795.297	8.856.088.378.735	Total Non Current Assets
JUMLAH ASET		8.820.571.931.489	8.878.388.681.236	TOTAL ASSETS
KEWAJIBAN				LIABILITIES
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				SHORT-TERM LIABILITIES
Utang kepada Pihak Ketiga	5.5.f.1.1,18	6.357.134.523	63.624.154.354	Account Payable - Third Parties
Utang Kelebihan				
Pembayaran Pendapatan	5.5.f.1.2,18	3.187.000	3.645.760	Debt Overpaid Income
Pendapatan Diterima di Muka	5.5.f.1.2,18	2.307.177.053	1.689.080.325	Unearned Revenues
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.5.f.1.2,18	-	1.979.850	Other Short-term Liabilities
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		8.667.498.576	65.318.860.289	Total Short-term Liabilities
JUMLAH KEWAJIBAN		8.667.498.576	65.318.860.289	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Ekuitas	5.5.g,19	8.811.904.432.913	8.813.069.820.947	Equity
JUMLAH EKUITAS		8.811.904.432.913	8.813.069.820.947	TOTAL EQUITY
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		8.820.571.931.489	8.878.388.681.236	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan
The accompanying notes form an integral part of these financial statements

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah)

THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
STATEMENT OF BUDGET REALIZATION
FOR THE YEARS ENDED 31 DESEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in Rupiah)

		2020			2019	
	Catatan/ Notes	Anggaran/ Budget	Realisasi/ Realization	%	Realisasi/ Realization	
PENDAPATAN						REVENUES
Penerimaan Negara Bukan Pajak	5.1,7	8.995.794.000	25.364.103.898	281,96	22.375.462.579	Non - Tax Incomes
JUMLAH PENDAPATAN		8.995.794.000	25.364.103.898	281,96	22.375.462.579	TOTAL REVENUES
BELANJA						EXPENDITURES
Belanja Operasi						Operation Expenditures
Belanja Pegawai	5.3, 8	2.021.936.812.000	1.961.586.733.636	97,02	1.981.552.016.470	Employee Expenditures
Belanja Barang	5.3, 8	1.300.598.499.000	1.213.615.416.985	93,31	1.551.898.330.200	Goods Expenditures
Jumlah Belanja Operasi		3.322.535.311.000	3.175.202.150.621	95,57	3.533.450.346.670	Total Operation Expenditures
Belanja Modal						Capital Expenditures
Belanja Tanah	5.3,8	924.589.000	915.667.370	99,04	-	Land Expenditure
Belanja Peralatan dan Mesin	5.3,8	213.648.132.000	206.732.666.653	96,76	112.551.619.954	Equipment and Machinery Expenditures
Belanja Gedung dan Bangunan	5.3,8	44.358.562.000	39.509.375.133	89,07	79.282.372.914	Building and Property Expenditures
Belanja Modal Lainnya		17.977.177.000	16.724.803.307	93,03	5.491.535.710	Other Capital Expenditures
Jumlah Belanja Modal		276.908.460.000	263.882.512.463	95,30	197.325.528.578	Total Capital Expenditures
JUMLAH BELANJA		3.599.443.771.000	3.439.084.663.084	95,54	3.730.775.875.248	TOTAL EXPENDITURES

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan
The accompanying notes form an integral part of these financial statements

	Catatan/ Notes	2020	2019	
KEGIATAN OPERASIONAL				OPERATIONAL ACTIVITIES
PENDAPATAN				REVENUES
Penerimaan Negara Bukan Pajak	5.2, 20	16.265.204.288	11.687.938.203	Non - Tax Incomes
JUMLAH PENDAPATAN		16.265.204.288	11.687.938.203	TOTAL REVENUES
BEBAN				EXPENSES
Beban Pegawai	5.4, 21	1.902.697.548.325	2.011.712.359.588	Employee Expenses
Beban Persediaan	5.4, 22	36.492.338.049	43.740.467.222	Supply Expenses
Beban Barang dan Jasa	5.4, 23	563.752.998.116	621.148.465.778	Goods and services Expenses
Beban Pemeliharaan	5.4, 24	149.529.454.950	131.743.805.959	Maintenance Expenses
Beban Perjalanan Dinas	5.4, 25	464.515.612.938	769.477.106.026	Official Travel Expenses
Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.4, 26	246.447.229.508	271.760.369.483	Depreciation and Amortization Expenses
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	5.4, 27	61.017.089	(105.866.408)	Allowance for doubtful Expenses
JUMLAH BEBAN		3.363.496.198.975	3.849.476.707.648	TOTAL EXPENSES
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(3.347.230.994.687)	(3.837.788.769.445)	SURPLUS (DEFICIT) OF OPERATIONAL ACTIVITIES
KAGIATAN NON OPERASIONAL	5.4, 28			NON OPERATIONAL ACTIVITIES
Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		1.863.382.817	(13.251.100.178)	Surplus/(Defisit) of Disposal of Noncurrent Assets
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		267.464.905	572.209.866	Surplus/(Defisit) of Other Non-operation Activities
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		2.130.847.722	(12.678.890.312)	SURPLUS/(DEFICIT) OF NON OPERATIONAL ACTIVITIES
SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA		(3.345.100.146.965)	(3.850.467.659.757)	SURPLUS/(DEFICIT) BEFORE EXTRAORDINARY ITEMS
POS LUAR BIASA				EXTRAORDINARY ITEMS
Pendapatan Luar Biasa		-	-	ExtraOrdinary Revenues
Beban Luar Biasa		-	-	ExtraOrdinary Expenses
SURPLUS/(DEFISIT) LAPORAN OPERASIONAL		(3.345.100.146.965)	(3.850.467.659.757)	SURPLUS/(DEFICIT) OF STATEMENT OF OPERATIONS

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan
The accompanying notes form an integral part of these financial statements

	Catatan/ Notes	2020	2019	
EKUITAS AWAL		8.813.069.820.947	4.600.032.344.580	BEGINNING BALANCE OF EQUITY
SURPLUS/DEFISIT LO	5.5.g, 29	(3.345.100.146.965)	(3.850.467.659.757)	SURPLUS/(DEFICIT) SO
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR KOREKSI YANG MENAMBAH/ MENGURANGI EKUITAS	5.5.g, 29	(77.754.040.458)	4.334.491.543.938	CUMULATIVE IMPACT OF CHANGES IN POLICY/ FUNDAMENTAL ERRORS
Koreksi Atas Reklasifikasi		(12.638.702.425)	10.741.447.201	Correction Over Reclassification
Selisih Revaluasi Aset Tetap		284.839.464	4.311.663.616.864	Difference in Revaluation of Fixed Assets
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		(63.612.777.357)	13.272.710.218	Correction Value Asset Non Revaluation
Lain-Lain		(1.787.400.140)	(1.186.230.345)	Others
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	5.5.g, 29	3.421.688.799.389	3.729.013.592.186	TRANSACTION BETWEEN ENTITIES
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(1.165.388.034)	4.213.037.476.367	SURPLUS/(DEFICIT) OF EQUITY
EKUITAS AKHIR		8.811.904.432.913	8.813.069.820.947	ENDING BALANCE OF EQUITY

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan
The accompanying notes form an integral part of these financial statements

1. INFORMASI UMUM

1. GENERAL INFORMATION

a. Pendirian

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ("BPK RI") berdiri di Magelang pada tanggal 28 Desember 1946 berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor 11/OEM dan mulai bekerja pada tanggal 1 Januari 1947. Dalam kondisi revolusi, kantor BPK RI menumpang dan berpindah-pindah. Terakhir menempati gedung di Jalan Tugu No. 2 Yogyakarta.

Dengan dibentuknya Negara Republik Indonesia Serikat (RIS), dibentuk Dewan Pengawas Keuangan berdasarkan Konstitusi RIS. Kemudian dengan berdirinya Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS 1950), maka dibentuk Dewan Pengawas Keuangan Republik Indonesia yang merupakan gabungan dari Dewan Pengawas Keuangan RIS di Bogor dan BPK RI di Yogyakarta. Keadaan ini berlangsung sampai dengan tahun 1959.

Sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden RI pada tanggal 5 Juli 1959 yang menyatakan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), maka sesuai ketentuan UUD 1945 pasal 23 ayat 5, nama Dewan Pengawas Keuangan kembali menjadi BPK RI. Selama periode ini, Pemerintah Indonesia dan BPK RI berusaha sekuatnya untuk mewujudkan Undang-Undang tentang BPK RI sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 23 ayat 5. Sementara itu telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 7 Tahun 1963 dan Perpu No. 6 Tahun 1964 tentang BPK Gaya Baru.

BPK RI sendiri telah berusaha membahas Perpu No. 6 Tahun 1964 untuk menjadikannya sebagai Undang-Undang, yaitu dengan menyusun konsep Rancangan Undang-Undang tentang BPK RI, yang kemudian setelah diajukan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), disetujui dan disahkan menjadi Undang-Undang No. 17 Tahun 1965. Dengan begitu, BPK RI berubah menjadi BPK Gaya Baru yang berada di bawah Presiden/Pemimpin Besar Revolusi. Namun kemudian dengan ketetapan MPRS No. X/MPRS 1966, tanggal 5 Juli 1966, kedudukannya dikembalikan pada posisi dan fungsinya sesuai dengan yang diatur dalam UUD 1945.

Pada tahun 1973 dikeluarkan Undang-Undang (UU) No. 5 Tahun 1973 tentang BPK RI, yang mengganti dan mencabut UU No. 17 Tahun 1965. Pada tahun 2006, UU No. 5 Tahun 1973 tersebut telah diganti dengan UU No. 15 Tahun 2006. UU inilah yang menjadi dasar keberadaan BPK RI saat ini.

b. Susunan Keanggotaan dan Bentuk Organisasi BPK RI

Secara kelembagaan, BPK diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. BPK merupakan lembaga negara dengan sembilan orang Anggota yang keanggotaannya diresmikan dengan Keputusan Presiden. Sembilan Anggota ini terdiri atas seorang Ketua merangkap Anggota, Wakil Ketua merangkap Anggota, dan tujuh orang Anggota, dengan susunan sebagai berikut:

a. Establishment

The Audit Board of the Republic of Indonesia ("BPK RI") was established in Magelang on December 28, 1946 under Governmental Decree No.11/OEM and started its operations on January 1, 1947. During the revolution, BPK RI shared its office with other offices and constantly moving from one place to another. The last building used as office was on Jalan Tugu No. 2 Yogyakarta.

Following the establishment of the United States of the Republic of Indonesia (RIS), Financial Supervisory Board was formed under the RIS Constitution. After the establishment of the Republic of Indonesia under the Provisional Constitution of 1950 (UUDS 1950), Financial Supervisory Board of the Republic of Indonesia was established as the consolidation of RIS Financial Supervisory Board in Bogor and BPK RI in Yogyakarta. This condition continued until 1959.

Due to issuance of Presidential Decree on July 5, 1959 declaring the reinstatement of the 1945 Constitution, and in accordance with Article 23 paragraph 5 of the 1945 Constitution, the name 'Financial Supervisory Board' was rechanged into BPK RI. During this period, both the Indonesian Government and BPK RI tried their best to formulate a Law regarding BPK RI that is in accordance with the mandate in Article 23 paragraph 5 of the 1945 Constitution. Meanwhile, Government Regulation in Lieu of Law (Perpu) No. 7 of 1963 and Perpu No. 6 of 1964 regarding New-Style Audit Board were issued.

BPK RI itself had tried to discuss Perpu No. 6 of 1964 to be stipulated as a Law by formulating a draft of Law regarding BPK RI, which after being filed by the Government to the People's Legislative Assembly (DPR) was approved and ratified as Law No. 17 of 1965. Therefore, BPK RI changed into BPK Gaya Baru under the President/Great Leader of Revolution. Later on, under the Decree of MPRS (Provisional People's Consultative Assembly) No. X/MPRS 1966 dated July 5, 1966, it was reinstated to its position and function as regulated in the 1945 Constitution.

In 1973, Law No. 5 of 1973 regarding BPK RI was issued, substituting and revoking Law No. 17 of 1965. In 2006, Law No. 5 of 1973 was substituted with Law No. 15 of 2006. This Law has become the ground for the existence of BPK RI.

b. Board Members and Organizational Structure of BPK RI

Institutionally, the BPK is regulated based on Law Number 15 of 2006 concerning the Supreme Audit Agency. The BPK is a state institution with nine members whose membership is formalized by a Presidential Decree. The Nine Members consist of a Chair who is also a Member, a Deputy Chair who is also a Member, and seven Members, with the following composition:

1. INFORMASI UMUM

1. GENERAL INFORMATION

b. Susunan Keanggotaan dan Bentuk Organisasi BPK RI (Lanjutan)

b. Board Members and Organizational Structure of BPK RI (Continued)

31 Desember 2020 / December 31, 2020

Ketua	:	Dr. Agung Firman Sampurna, CSFA., CFA., CGCAE	:	Chairman
Wakil Ketua	:	Dr. Agus Joko Pramono, M.Acc., Ak., CA., CSFA., CPA, CFA	:	Vice Chairman
Anggota I	:	Dr. Hendra Susanto M.Eng., M.H., CFA., CSFA.	:	Board Member I
Anggota II	:	Dr. Pius Lustrilanang S.IP., M.Si., CFA., CSFA	:	Board Member II
Anggota III	:	Dr. Achsanul Qosasi, CSFA., CFA.	:	Board Member III
Anggota IV	:	Dr. Isma Yatun, CSFA., CFA.	:	Board Member IV
Anggota V	:	Prof. Dr. Bahrullah Akbar M.B.A., CIPM., CSFA., CPA., CFA.	:	Board Member V
Anggota VI	:	Prof. Harry Azhar Aziz M.A., Ph.D., CSFA., CFA.	:	Board Member VI
Anggota VII	:	Ir. Daniel Lumban Tobing, CSFA., CFA	:	Board Member VII

31 Desember 2019 / December 31, 2019

Ketua	:	Dr. Agung Firman Sampurna, S.E., M.Si., CSFA	:	Chairman
Wakil Ketua	:	Dr. Agus Joko Pramono, S.ST., M.Acc., Ak., CA., CPA, CSFA	:	Vice Chairman
Anggota I	:	Dr. Hendra Susanto M. Eng, M.H., CSFA, CFA	:	Board Member I
Anggota II	:	Dr. Pius Lustrilanang S.IP., M.Si., CSFA	:	Board Member II
Anggota III	:	Dr. Achsanul Qosasi, CSFA	:	Board Member III
Anggota IV	:	Ir. Isma Yatun, M.T., CSFA	:	Board Member IV
Anggota V	:	Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A., CPA, CSFA	:	Board Member V
Anggota VI	:	Prof. Harry Azhar Aziz, M.A., Ph.D., CSFA	:	Board Member VI
Anggota VII	:	Ir. Daniel Lumban Tobing, CSFA	:	Board Member VII

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dibantu oleh pelaksana BPK, yang terdiri atas Sekretariat Jendral, Unit Pelaksana Tugas Pemeriksaan, Unit Pelaksana Tugas Penunjang, Perwakilan, Pemeriksa dan Pejabat Lain yang ditetapkan oleh BPK sesuai dengan kebutuhan.

In carrying out their duties and authorities, the BPK executor is assisted, which consists of the Secretariat General, the Audit Task Force Implementing Unit, the Supporting Task Force, Representatives, Inspectors and Other Officials appointed by the BPK as needed.

- Sekretariat Jenderal;
- Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara;
- Inspektorat Utama;
- Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara;
- Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara;
- Auditorat Utama Keuangan Negara I;
- Auditorat Utama Keuangan Negara II;
- Auditorat Utama Keuangan Negara III;
- Auditorat Utama Keuangan Negara IV;
- Auditorat Utama Keuangan Negara V;
- Auditorat Utama Keuangan Negara VI;
- Auditorat Utama Keuangan Negara VII;
- Auditorat Utama Investigasi;
- BPK Perwakilan;
- Staf Ahli; dan
- Kelompok Jabatan Fungsional.

- Secretariat General;
- State Financial Audit Education and Training Agency;
- Principal Inspectorate;
- Principal Directorate of Planning, Evaluation and Development of State Financial Audit;
- Principal Directorate of Mentoring and Development of Law in State Financial Audit;
- Principal Auditorate of State Finance I;
- Principal Auditorate of State Finance II;
- Principal Auditorate of State Finance III;
- Principal Auditorate of State Finance IV;
- Principal Auditorate of State Finance V;
- Principal Auditorate of State Finance VI;
- Principal Auditorate of State Finance VII;
- Main Auditorate of Investigation;
- Representative Office of BPK RI;
- Expert Staff; and
- Functional Position Group.

Lingkup tugas BPK adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara Lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT).

The scope of BPK's duty is responsible for evaluation of management and accountability of state finances conducted by the Central Government, Local Government, other State Institutions, Bank Indonesia, State-Owned Enterprises, Public Services Boards, Regional Owned Enterprises, and other institutions or entities which manage state finances, BPK evaluation's scope follows financial audits, performance checks, evaluation with a specific purpose.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK disampaikan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai kewenangannya. Untuk keperluan tindak lanjut, hasil pemeriksaan BPK juga diserahkan kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.

The Audit Result Report of BPK should be submitted to DPR, DPD, dan DPRD in accordance with its authority. For the purpose of follow-up, the BPK audit results also should be submitted to the President, Governor, Regent/Mayor in accordance with their authority.

1. INFORMASI UMUM

1. GENERAL INFORMATION

c. Tempat Kedudukan BPK RI

Dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab Pemerintah tentang keuangan negara, BPK RI dibantu oleh pelaksana BPK RI. Saat ini, pelaksana BPK RI terdiri dari 1 (satu) Sekretariat Jenderal, 1 (satu) Badan Diklat PKN, 1 (satu) Inspektorat Utama, 2 (dua) Direktorat Utama, 7 (tujuh) Auditorat Utama Keuangan Negara, 1 (satu) Auditorat Utama Investigasi dan 5 (lima) Staf Ahli.

BPK RI Pusat berdomisili di Jalan Gatot Subroto No. 31, Jakarta Pusat, dan memiliki Kantor Perwakilan dan Satuan Kerja (satker) sebagai berikut:

- Sekretariat Jenderal BPK RI dan BPK RI Pusat, Jl. Gatot Subroto Kav. 31 Jakarta.
- Badan Diklat PKN BPK RI, Jl. Binawarga II, Jakarta Selatan.
- BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, Jl. MT. Haryono Kav. 34, Pancoran, Jakarta Selatan.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Banten, Jl. Raya Palka No. 1, Palima, Serang, Banten.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Jl. Moh Toha No. 164, Bandung.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Jl. Perintis Kemerdekaan No. 175, Semarang.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jl. HOS Cokroaminoto No. 52, Yogyakarta.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Jl. Raya Juanda, Sidoarjo, Surabaya.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh, Jl. Panglima Nyak Makam No. 38, Banda Aceh.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Jl. Imam Bonjol No. 22, Medan.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, Jl. Khatib Sulaiman No. 54, Padang.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, Jl. Jenderal Sudirman No. 721, Pekanbaru.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, Jl. Kartini I No. 29-30 Sekupang, Batam.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jl. Pulau Bangka, Kompleks Perkantoran Terpadu, Air Itam, Pangkal Pinang.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi, Jl. P. Hidayat Km 6,5 No. 65, Kel. Sukakarya, Kota Baru, Jambi.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu, Jl. Pembangunan No. 16, Padang Harapan, Bengkulu.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, Jl. Demang Lebar Daun No. 2, Palembang.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, Jl. Pangeran Emir M. Noor No. 11B, Sumur Putri, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, Jl. D.I. Panjaitan, Renon, Denpasar.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jl. Udayana No. 22, Mataram.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jl. Amabi No. 120, Kupang.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku, Jl. Laksdya Leo Wattimena, Passo, Ambon.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara, Jl. Monomotu No. 12, Ternate.

c. BPK RI Domicile

In conducting state financial management and accountability audit, BPK RI is assisted by implementers. At present, Implementers of BPK RI are 1 (one) General Secretariat, 1 (one) PKN Training Center, 1 (one) Principal Inspectorate, 2 (two) Principal Directorates, 7 (seven) Principal Auditorates of State Finance, 1 (one) Principal Auditorate of Investigation and 5 (five) Expert Staffs.

BPK RI Headquarter is located at Gatot Subroto Street No. 31, Central Jakarta. BPK RI has Representative Offices and other Working Units (satker) as follows:

- Secretariat General of BPK RI and BPK RI Headquarter, St. Gatot Subroto Kav. 31, Jakarta.
- PKN BPK RI Training Center, St. Binawarga II, South
- BPK RI Representative Office in DKI Jakarta, St. MT. Haryono Kav. 34, Pancoran, South Jakarta.
- BPK RI Representative Office in Banten, St. Raya Palka No. 1, Palima, Serang, Banten.
- BPK RI Representative Office in West Java, St. Moh Toha No. 164, Bandung.
- BPK RI Representative Office in Central Java, St. Perintis Kemerdekaan No. 175, Semarang.
- BPK RI Representative Office in Special Region of Yogyakarta, St. HOS Cokroaminoto No. 52, Yogyakarta.
- BPK RI Representative Office in East Java, St. Raya Juanda, Sidoarjo, Surabaya.
- BPK RI Representative Office in Aceh, St. Panglima Nyak Makam No. 38, Banda Aceh.
- BPK RI Representative Office in North Sumatera, St. Imam Bonjol No. 22, Medan.
- BPK RI Representative Office in West Sumatera, St. Khatib Sulaiman No. 54, Padang.
- BPK RI Representative Office in Riau, St. Jenderal Sudirman No. 721, Pekanbaru.
- BPK RI Representative Office in Riau Islands, St. Kartini I No. 29 - 30 Sekupang, Batam.
- BPK RI Representative Office in Bangka Belitung Islands, St. Pulau Bangka, Kompleks Perkantoran Terpadu, Air Itam, Pangkal Pinang.
- BPK RI Representative Office in Jambi, St. P. Hidayat Km 6,5 No. 65, Kel. Sukakarya, Kota Baru, Jambi.
- BPK RI Representative Office in Bengkulu, St. Pembangunan No. 16, Padang Harapan, Bengkulu.
- BPK RI Representative Office in South Sumatera, St. Demang Lebar Daun No. 2, Palembang.
- BPK RI Representative Office in Lampung, St. Pangeran Emir M. Noor No. 11 B, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung.
- BPK RI Representative Office in Bali, St. D.I. Panjaitan, Renon, Denpasar.
- BPK RI Representative Office in West Nusa Tenggara, St. Udayana No. 22, Mataram.
- BPK RI Representative Office in East Nusa Tenggara, St. Amabi No. 120, Kupang.
- BPK RI Representative Office in Maluku, St. Laksdya Leo Wattimena, Passo, Ambon.
- BPK RI Representative Office in North Maluku, St. Monomotu No. 12, Ternate.

1. INFORMASI UMUM

1. GENERAL INFORMATION

c. Tempat Kedudukan BPK RI (Lanjutan)

- BPK RI Perwakilan Provinsi Papua, Jl. Balaikota No. 2, Entrop Jayapura.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Barat, Jl. Sowi Gunung No. 4, Manokwari.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara, Jl. Pulau Irian No. 12, Tarakan.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Jl. Ahmad Yani No. 121, Pontianak.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, Jl. Yos Sudarso No. 16, Palangkaraya.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, Jl. Moh. Yamin No. 19, Samarinda.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, Jl. A Yani km. 32,5, Banjarbaru, Banjarmasin.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, Jl. 17 Agustus No. 4, Manado.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo, Jl. Tina Loga No. 3, Kota Utara, Gorontalo.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, Jl. Prof Moh. Yamin No. 35, Palu.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, Jl. H. Abdul Malik Pattana Endeng, Kec. Simboro, Mamuju.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, Jl. Sao - Sao No. 10, Kendari.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Jl. Andi Pangeran Pettarani, Makassar.
- Balai Diklat PKN Medan, Jl. Jamin Ginting Km. 10,5 Simpang Selayang, Medan.
- Balai Diklat PKN Yogyakarta, Jl. HOS. Cokroaminoto No. 52, Yogyakarta
- Balai Diklat PKN Gowa, Jl. H. M. Yasin Limpo, Samata- Gowa.
- Museum BPK RI, Jl. P. Diponegoro No. 1 Magelang

d. Dasar Hukum

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
4. Undang-Undang No. 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
5. Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.
6. Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
8. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
9. Peraturan Menteri Keuangan No.238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan.

c. BPK RI Domicile (Continued)

- *BPK RI Representative Office in Papua, St. Balaikota No. 2, Entrop, Jayapura.*
- *BPK RI Representative Office in West Papua, St. Sowi Gunung No. 4, Manokwari.*
- *BPK RI Representative Office in North Kalimantan, St. Pulau Irian No. 12, Tarakan.*
- *BPK RI Representative Office in West Kalimantan, St. Ahmad Yani No. 121, Pontianak.*
- *BPK RI Representative Office in Central Kalimantan, St. Yos Sudarso No. 16, Palangkaraya.*
- *BPK RI Representative Office in East Kalimantan, Jl Moh. Yamin No. 19, Samarinda.*
- *BPK RI Representative Office in South Kalimantan, St. A. Yani km. 32,5, Banjarbaru, Banjarmasin.*
- *BPK RI Representative Office in North Sulawesi, St. 17 Agustus No. 4, Manado.*
- *BPK RI Representative Office in Gorontalo, St. Tina Loga No. 3, Kota Utara, Gorontalo.*
- *BPK RI Representative Office in Central Sulawesi, St. Prof Moh. Yamin No. 35, Palu.*
- *BPK RI Representative Office in West Sulawesi, St. H. Abdul Malik Pattana Endeng, Kec. Simboro, Mamuju.*
- *BPK RI Representative Office in Southeast Sulawesi, St. Sao - Sao No. 10, Kendari.*
- *BPK RI Representative Office in South Sulawesi, St. Andi Pangeran Pettarani, Makassar.*
- *PKN Medan Training Center, St. Jamin Ginting Km. 10,5 Simpang Selayang, Medan.*
- *PKN Yogyakarta Training Center, St. HOS. Cokroaminoto No. 52, Yogyakarta*
- *PKN Gowa Training Center, St. H. M. Yasin Limpo, Samata-Gowa.*
- *BPK RI museum, St. P. Diponegoro No. 1 Magelang.*

d. Legal Basis

1. *Law No. 17 Year 2003 regarding State Financial.*
2. *Law No. 1 Year 2004 regarding State Treasury.*
3. *Law No. 15 Year 2006 regarding The Audit Board of The Republic of Indonesia.*
4. *Law No. 20 Year 2019 regarding the State Revenue and Expenditure Budget for the 2020 Fiscal Year.*
5. *Law No. 2 of 2020 Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No.1 of 2020 concerning State Financial Policy and Financial System Stability for Handling the Pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) and/ or in the Context of Facing Threats Endanger the National Economy and / or System Stability Finance Became Law.*
6. *Government Regulation No.8 Year 2006 regarding Financial Reporting and Performance of Government Agencies.*
7. *Government Regulation No.71 Year 2010 regarding Government Accounting Standards.*
8. *Government Regulation No.27 Year 2014 regarding Management of State/Local Property.*
9. *Minister of Finance Regulation No. 238/PMK.05/2011 regarding General Guidelines for Government Accounting Systems.*

1. INFORMASI UMUM (LANJUTAN)

1. GENERAL INFORMATION (CONTINUED)

d. Dasar Hukum (Lanjutan)

d. Legal Basis (Continued)

10. Peraturan Menteri Keuangan No.213/PMK.05/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No.213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
11. Peraturan Menteri Keuangan No.212/PMK.05/2019 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah pada Pemerintah Pusat.
12. Peraturan Menteri Keuangan No 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.
13. Peraturan Menteri Keuangan No.177/PMK.05/2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No.177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Kementrian.
14. Peraturan Menteri Keuangan No.251/PMK.06/2015 tentang Tatacara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat.
15. Peraturan Menteri Keuangan No.111/PMK.06/2017 tentang Penilaian Barang Milik Negara.
16. Peraturan Menteri Keuangan No 107/PMK.06/2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan No 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara.
17. Peraturan Menteri Keuangan No 207/PMK.06/2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.
18. Peraturan Menteri Keuangan No 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.
19. Peraturan Menteri Keuangan No 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Pusat.
20. Keputusan Menteri Keuangan No 53/KM.6/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
21. Keputusan Menteri Keuangan No 59/KM.6/2013 tentang Tabel Masa Manfaat.
22. Keputusan Menteri Keuangan No 94/KM.6/2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan No 145/KM.06/2014 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan No94/KM.06/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap tanpa Entitas Pemerintah Pusat.
23. Keputusan Menteri Keuangan No620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat dalam rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat.

10. Regulation of the Minister of Finance No.213/PMK.05/2013 as amended by Regulation of the Minister of Finance No.215/PMK.05/2016 on Amendment to Regulation of the Minister of Finance No.213/PMK.05/2013 on Central Government Accounting and Reporting System.
11. Regulation of the Minister of Finance No.212/PMK.05/2019 regarding Government Accounting at the Central Government Journal.
12. Regulation of the Minister of Finance No. 225/PMK.05/2019 regarding Accounting Policy on Central Government.
13. Regulation of the Minister of Finance No.177/PMK.05/2015 as amended with Regulation of the Minister of Finance No.222/PMK.05/2016 on Amendment to Regulation of the Minister of Finance No.177/PMK.05/2015 regarding Guidelines for the Preparation and Submission of Financial Statements of State Ministries.
14. Regulation of the Minister of Finance No.251/PMK.06/2015 regarding Amortization Procedures of State Property in the form of Intangible Assets in Central Government Entities.
15. Regulation of the Minister of Finance No.111/PMK.06/2017 on Assessment of State Property.
16. Regulation of the Minister of Finance No. 107/PMK.06/2019 concerning the second amendment to the Minister of Finance Regulation No 118/PMK.06/2017 concerning Guidelines for the Reassessment of State Property.
17. Regulation of the Minister of Finance No 207/PMK.06/2019 regarding Amendment of Minister of Finance Regulation No 69/PMK.06/2014 regarding Determination of Accounts Receivable Quality and Allowance for Doubtful Accounts the Formation of the Ministry/Agency and the State Treasurer.
18. Regulation of the Minister of Finance No 181/PMK.06/2016 regarding Administration of State Property.
19. Regulation of the Minister of Finance No 225/PMK.05/2016 regarding Application of Accrual-Based Government Accounting Standards to Central Government.
20. Regulation of the Minister of Finance No 53/KM.6/2012 regarding Application of State Property Depreciation of Fixed Assets in the Form of the Central Government Entities.
21. Regulation of the Minister of Finance No 59/KM.6/2013 regarding Useful Life Table.
22. Decree of the Minister of Finance No 94 / KM.6 / 2013 as amended by Decree of the Minister of Finance No. 145 / KM.06 / 2014 concerning Amendments to Decree of the Minister of Finance No 94 / KM.06 / 2013 concerning the Depreciation Module of State Property in the Form of Fixed Assets without Entities Central government.
23. Decree of the Minister of Finance No 620 / KM.6 / 2015 concerning Benefit Period in the context of Amortization of State Property in the Form of Intangible Assets in Central Government Entities.

1. INFORMASI UMUM (LANJUTAN)

1. GENERAL INFORMATION (CONTINUED)

d. Dasar Hukum (Lanjutan)

24. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan NoPER-82/PB/2011 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga.
25. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan NoPER-85/PB/2011 tentang Penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga.
26. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan NoKEP-135/PB/2020 tentang Pemutahiran Kodifikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar.
27. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan NoS-2228/PB/2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang penggunaan satker konsolidasi.
28. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan NoS-947/PB/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Jadwal Rekonsil dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2020 Unaudited serta Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Akhir Tahun.

e. Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024

Rencana strategis (Renstra) BPK Tahun 2020 - 2024 adalah sebagai berikut:

1. Visi
"Menjadi Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara".
2. Misi
 - a. Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapatan, dan pertimbangan.
 - b. Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara.
 - c. Melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.
3. Nilai Dasar
Penyusunan Visi dan Misi pada Renstra BPK 2020 - 2024 tetap berpijak pada nilai - nilai dasar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab BPK. Semua pegawai BPK akan selalu memegang nilai - nilai dasar yang terdiri dari:
 - a. Independensi; Nilai independensi selalu dijunjung tinggi dalam pelaksanaan setiap tugas dan tanggung jawab, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam melaksanakan setiap penugasan pemeriksaan bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi.
 - b. Integritas; Nilai integritas dibangun dengan mengedepankan sikap yang jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.
 - c. Profesionalisme; Nilai profesionalisme dikembangkan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

d. Legal Basis (Continued)

24. Regulation of the Director General of Treasury No PER-82 / PB / 2011 concerning Guidelines for Accounting for Uncollectible Accounts Receivable at State Ministries / Agencies.
25. Regulation of the Director General of Treasury No PER-85 / PB / 2011 concerning Administration of Non-Tax State Revenue Receivables at Work Units of State Ministries / Institutions.
26. Decree of the Director General of Treasury No KEP-135 / PB / 2020 concerning Updating of Account Segment Codification on the Chart of Accounts Standard.
27. Letter of the Director General of Treasury No S-2228 / PB / 2017 dated February 28, 2017 concerning the use of a consolidated satker.
28. Letter of the Director General of Treasury No S-947 / PB / 2020 dated December 30, 2020 concerning Reconciliation Schedule and Submission of Unaudited 2020 State Ministries / Institutions (LKKL) Financial Reports and Accounting Treatment for Year-End Transactions.

e. Strategic Plan for 2020 - 2024

BPK's strategic plan (Renstra) for 2020-2024 is as follows:

1. Vision
"To Become A Trusted Audit Agency That Has An Active Role in Realizing Quality and Useful State Financial Governance to Achieve State Goals."
2. Mission
 - a. Examine the governance and accountability of state finances to provide recommendations, revenues and considerations.
 - b. Encourage the prevention of corruption and accelerate the settlement of state compensation.
 - c. Implement transparent and sustainable organizational governance in order to become an example for other institutions.
3. Base Value
The preparation of the Vision and Mission in the BPK Strategic Plan 2020-2024 remains based on the basic values in carrying out the duties and responsibilities of the BPK. All BPK employees will always hold the basic values which consist of:
 - a. Independence; The value of independence is always upheld in the implementation of every task and responsibility, both institutionally, organizationally and individually. In carrying out each assignment, free examination in mental attitude and appearance of personal, external, and / or organizational disturbances that may affect independence.
 - b. Integrity; The value of integrity is built by promoting an honest, objective and firm attitude in applying principles, values and decisions.
 - c. Professionalism; The value of professionalism is developed by applying the principles of prudence, thoroughness and accuracy, as well as being guided by the applicable standards.

1. INFORMASI UMUM (LANJUTAN)

1. GENERAL INFORMATION (CONTINUED)

e. Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024 (Lanjutan)

4. Tujuan Strategis

Pencapaian visi dan pelaksanaan misi tersebut dilakukan dengan tujuan "Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat".

5. Sasaran Strategis (SS)

Dalam mencapai tujuan tersebut, BPK akan mewujudkan sasaran strategis "Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara yang didukung tata kelola organisasi yang berkinerja tinggi".

Sasaran strategis dicapai melalui lima strategi yang dikelompokkan dalam dua arah kebijakan yang disusun dengan menyelaraskan program penganggaran BPK. Arah kebijakan pertama adalah peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian negara secara berkelanjutan. Arah kebijakan ini terdiri dari lima strategi sebagai berikut:

- Strategi 1: Meningkatkan kapabilitas organisasi pemeriksaan yang modern dan dinamis;
- Strategi 2: Meningkatkan kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif, dan responsif;
- Strategi 3: Meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pemeriksaan keuangan negara;
- Strategi 4: Mewujudkan pusat unggulan pendidikan dan pelatihan pemeriksaan keuangan negara;
- Strategi 5: Memperkuat regulasi dan aspek hukum pemeriksaan keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara.

Sedangkan untuk arah kebijakan kedua adalah peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam tata kelola organisasi yang dicapai melalui strategi mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan kerja sama dengan pemangku kepentingan.

Sasaran Strategis merupakan bentuk operasionalisasi untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan. Untuk mencapai Sasaran Strategis, BPK merumuskan arah kebijakan dan strategi.

6. Indikator Kinerja Utama BPK

Untuk mewujudkan visi dan misi BPK melalui tujuan strategis dan sasaran strategis, ditetapkan ukuran keberhasilan dalam jangka waktu lama tahun yaitu berupa Indikator Kinerja Utama (IKU).

Matriks hubungan antara tujuan strategis, sasaran strategis, dan indikator kinerja utama yang digunakan, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

e. Strategic Plan for 2020 - 2024 (Continued)

4. Strategic Goal

The achievement of this vision and implementation of the mission is carried out with the aim of "Increasing quality and beneficial state financial governance".

5. Strategic Goals (SG)

In achieving these goals, BPK will realize the strategic goal of "Increasing the use of recommendations, opinions and considerations on the management and responsibility of state finances as well as settlement of state compensation supported by high-performance organizational governance".

The strategic goals are achieved through five strategies grouped into two policy directions that are compiled by harmonizing the BPK budgeting program. The first policy direction is to increase synergy and collaboration in the examination and settlement of state compensation in a sustainable manner. This policy direction consists of five strategies as follows:

- Strategy 1: Increase the capabilities of a modern and dynamic audit organization;
- Strategy 2: Improve the quality of inspection in a strategic, anticipatory, and responsive manner;
- Strategy 3: Increase the effectiveness of oversight of audits of state finances;
- Strategy 4: Create a center of excellence for education and training in auditing state finances;
- Strategy 5: Strengthen regulatory and legal aspects of auditing state finances and settling state compensation.

Meanwhile, the second policy direction is to increase synergy and collaboration in organizational governance achieved through strategies to optimize resource management and cooperation with stakeholders.

Strategic Goals are a form of operationalization to achieve the Vision, Mission and Goals. In order to achieve the Strategic Targets, BPK formulates policy directions and strategies.

6. BPK Main Performance Indicators

In order to realize the BPK's vision and mission through strategic objectives and strategic objectives, a measure of success over a long period of years is determined, namely in the form of Key Performance Indicators (KPI).

The matrix of the relationship between strategic objectives, strategic objectives, and the main performance indicators used can be seen in the following table:

Tujuan Strategis/ Strategic Goals	Sasaran Strategis/ Strategic Target	Indikator Kinerja Utama/ Key Performance Indicators
Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat. / <i>Increasing Quality and Beneficial State Financial Governance.</i>	Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara yang didukung tata kelola organisasi berkinerja tinggi/ <i>Increased utilization of recommendations, opinions and considerations on the management and responsibility of state finances as well as settlement of state compensation supported by high-performance organizational governance.</i>	1. Tingkat Kualitas dan Manfaat Tata Kelola Keuangan Negara Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK/Level of Quality and Benefits of Manage System State Finances by BPK Examination Results. 2. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Manfaat Hasil Pemeriksaan/ Stakeholder Satisfaction Index Interests for the Benefits of Results Examination. 3. Nilai Quality Assurance Reformasi Birokrasi/ Value of Quality Assurance Reform Bureaucracy.

1. INFORMASI UMUM (LANJUTAN)

1. GENERAL INFORMATION (CONTINUED)

e. Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024 (Lanjutan)

e. Strategic Plan for 2020 - 2024 (Continued)

6. Indikator Kinerja Utama BPK (Lanjutan)

6. BPK Main Performance Indicators (Continued)

Adapun Capaian IKU BPK Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

The BPK KPI achievements in 2020 are as follows:

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	CAPAIAN
Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat/ <i>Increasing quality and useful state financial governance</i>	Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi, Pendapatan, dan Pertimbangan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan negara serta penyelesaian Ganti Kerugian Negara yang Didukung Tata Kelola Organisasi Berkinerja Tinggi/ <i>Increased utilization of recommendations, revenues and considerations for the management and responsibility of state finances as well as settlement of state compensation supported by high-performance organizational governance</i>	1. Tingkat kualitas dan Manfaat tata Kelola Keuangan Negara Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK/ <i>Level of Quality and Benefits of State Financial Governance Based on the Audit Results of the BPK</i>	73%	68,28%
		1.1. Presentase Entitas yang Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaannya telah Mencapai $\geq 75\%$ (Bobot 70%) / <i>Percentage of Entities for which the Follow-Up on the Recommendation of Examination Results Has Reached $\geq 75\%$ (Weight 70%)</i>		65,92%
		1.2. Tingkat Pemanfaatan Pendapatan dan/atau Pertimbangan BPK (Bobot 15%)/ <i>Level of Revenue Utilization and / or Consideration of BPK (Weight 15%)</i>		-*)
		1.3. Tingkat Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Negara (Bobot 15%)/ <i>State Compensation Claims Settlement Rate (Weight 15%)</i>		79,28%
		2. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Manfaat Hasil Pemeriksaan/ <i>Stakeholder Satisfaction Index on the Benefits of Audit Results</i>	4,10 (Sangat Memuaskan)	4,18
		3. Nilai <i>Quality Assurance</i> Reformasi Birokrasi / <i>Value of Quality Assurance for Bureaucratic Reform</i>	88,42 (A)	-**)

*) Tingkat pemanfaatan pendapatan dipantau atas pendapat yang diterbitkan dalam periode Renstra 2020-2024

**) Posisi per Februari 2021 masih menunggu hasil dari kementerian RB

Secara garis besar, Sasaran Strategis Meningkatkan Pemanfaatan Rekomendasi, Pendapatan, dan Pertimbangan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Serta Penyelesaian Ganti Kerugian Negara yang Didukung Tata Kelola Organisasi Berkinerja Tinggi Diukur melalui tiga IKU, Pada tahun 2020, capaian atas tiga IKU tersebut disajikan sebagai berikut.

1. IKU Tingkat Kualitas dan Manfaat Tata Kelola Keuangan Negara Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK Terealisasi sebesar 68,28% dari target Tahun 2020 sebesar 73%. IKU ini bersifat Kuantitatif dalam mengukur dampak hasil pemeriksaan BPK terhadap perbaikan tata kelola keuangan negara dan terdiri dari: 1) Entitas yang menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, 2) Pemanfaatan Pendapatan dan/atau Pertimbangan BPK, 3) penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Negara. Semakin tinggi capaian IKU ini mengindikasikan semakin tinggi kontribusi BPK dalam mendorong perbaikan tata kelola keuangan negara.
2. IKU Indeks Kepuasan pemangku Kepentingan atas Manfaat Hasil Pemeriksaan terealisasi sebesar 4,18 dari target Tahun 2020 sebesar 4,10. IKU ini diukur berdasarkan survei yang dilakukan sebesar 4,10. IKU ini diukur berdasarkan survei yang dilakukan oleh *surveyor eksternal* yang independen dan berfungsi sebagai konfirmasi terhadap para pemangku kepentingan dalam mengukur manfaat hasil pemeriksaan BPK. Semakin tinggi capaian IKU ini mengindikasikan semakin baik persepsi masyarakat terhadap peran BPK dalam mendorong perbaikan tata kelola keuangan negara.

Broadly speaking, the Strategic Targets for the Increased Use of Recommendations, Revenues and Considerations for State Financial Management and Responsibility and Settlement of State Compensation Supported by High-Performance Organizational Governance Measured through three KPI, In 2020, the achievements of the three KPI are presented as follows .

1. The level of quality and benefit level of state financial governance based on BPK audit results was 68.28% of the 2020 target of 73%. This KPI is quantitative in measuring the impact of the BPK audit results on the improvement of state financial governance and consists of: 1) Entities that follow up on the Assessment Results Recommendation, 2) Utilization of Revenue and / or BPK Considerations, 3) Settlement of Claims for State Compensation. The high performance of the IKU indicates the higher BPK contribution in encouraging improvements in state financial governance.
2. The KPI for the Stakeholder Satisfaction Index for the Benefits of Audit Results was realized at 4.18 from the 2020 target of 4.10. The KPI is measured based on a survey conducted at 4.10. This KPI is measured based on a survey conducted by an independent external surveyor and serves as confirmation of stakeholders in measuring the benefits of the BPK audit results. The higher the KPI achievement indicates the better the public's perception of the role of BPK in encouraging improvements in state financial governance.

1. INFORMASI UMUM (LANJUTAN)

1. GENERAL INFORMATION (CONTINUED)

e. Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024 (Lanjutan)

6. Indikator Kinerja Utama BPK (Lanjutan)

3. IKU Nilai *Quality Assurance* Reformasi Birokrasi merupakan cerminan hasil evaluasi pihak eksternal dhi. Kementerian PAN dan RB dalam menilai kualitas kelembagaan BPK. Hingga berakhirnya periode pelaporan kinerja 2020, Kementerian PAN dan RB belum menerbitkan hasil penilaiannya sehingga IKU ini belum dapat diukur realisasinya. Semakin tinggi capaian IKU ini mengindikasikan semakin tinggi kualitas BPK secara kelembagaan dalam mendorong perbaikan tata kelola keuangan negara.

7. Lingkungan Strategis BPK

Lingkungan Strategis BPK meliputi nasional dan lingkungan strategis internasional. BPK cukup aktif dalam kegiatan tingkat regional maupun internasional. BPK tergabung dalam tiga kerja sama multilateral yaitu: ASEANSAL, ASOSAI dan INTOSAI. BPK akan meningkatkan peranan internasional dalam berbagai kelompok kerja internasional seperti *Working Group on Extractive Industry*, *Working Group on Environmental Audit*, dan *Working Group on Big Data*. Sebagai bentuk kontribusi aktif dan penyebaran pengetahuan (*sharing Knowledge*) BPK terhadap komunitas internasional, BPK juga turut serta dalam melakukan penyebaran praktik terbaik dengan menjadi narasumber atau *subject matter Expert* dalam beberapa kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga internasional tersebut. Pada periode lalu, BPK mendapatkan Kepercayaan untuk menjadi auditor eksternal IAEA untuk tahun buku 2018-2019. Kepercayaan tersebut sekaligus menempatkan BPK sebagai anggota UN *panel of External Auditor*. Dengan peran tersebut, BPK memberikan masukan kepada sekjen PBB dalam memperbaiki tata kelola keuangan dalam komunitas PBB.

f. Program dan Kegiatan BPK

Dalam perencanaan nasional, sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004. Sesuai dengan SPPN tersebut, rencana pembangunan nasional meliputi rencana jangka panjang dua puluh tahun, rencana jangka menengah lima tahunan dan perencanaan tahunan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) nasional tahun 2005-2025 telah ditetapkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2007. RPJP Nasional tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) lima tahunan dan acuan RPJP Daerah.

RPJMN tersebut memuat antara lain strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program Kementerian/ Lembaga (KL) dan lintas KL, kewilayahan dan lintas Kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro. RPJMN tersebut dijabarkan dalam rencana pembangunan tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Selanjutnya, RKP disusun berdasarkan RPJM. Dokumen perencanaan RPJM dan RKP tersebut menjadi dasar penyusunan Renstra KL. Renstra KL tersebut memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan pembangunan KL dan bersifat indikatif.

e. Strategic Plan for 2020 - 2024 (Continued)

6. BPK Main Performance Indicators (Continued)

3. KPI Value of *Quality Assurance* for Bureaucratic Reform is a reflection of the evaluation results of external parties dhi. Ministry of PAN and RB in assessing the quality of BPK institutions. Until the end of the 2020 performance reporting period, the Ministry of PAN and RB have not published the results of their assessment so that the realization of this KPI cannot be measured. The higher the KPI achievement indicates the higher the quality of the BPK institutionally in encouraging improvements in state financial governance.

7. BPK's Strategic Environment

BPK's strategic environment includes national and international strategic environments. BPK is quite active in regional and international activities. BPK is part of three multilateral collaborations, namely: ASEANSAL, ASOSAI and INTOSAI. BPK will increase its international role in various international working groups such as the *Working Group on Extractive Industry*, the *Working Group on Environmental Audit*, and the *Working Group on Big Data*. As a form of active contribution and dissemination of BPK's knowledge to the international community, BPK also participates in disseminating best practices by becoming a resource person or *subject matter Expert* in several activities organized by these international institutions. In the past period, BPK received the Trust to become the IAEA external auditor for the 2018-2019 financial year. This trust also places BPK as a member of the UN panel of External Auditors. With this role, BPK provides input to the UN Secretary General in improving financial governance in the UN community.

f. BPK Programs and Activities

In national planning, the National Development Planning (SPPN) system has been established based on Law (UU) Number 25 of 2004. In accordance with the SPPN, the national development plan includes a twenty-year long-term plan, a five-year medium-term plan and an annual plan.

The National Long-Term Development Plan (RPJP) for 2005-2025 has been stipulated in Law Number 17 of 2007. The National RPJP serves as a guideline in the formulation of the five-year National Medium Term Development Plan (RPJMN) and the reference for the Regional RPJP.

The RPJMN contains, among others, the national development strategy, general policies, Ministry / Institution (KL) and cross-KL, regional and cross-regional programs, as well as a macroeconomic framework. The RPJMN is spelled out in an annual development plan in the form of a Government Work Plan (RKP).

Furthermore, the RKP is prepared based on the RPJM. The RPJM and RKP planning documents form the basis for the preparation of the KL Renstra. The KL Strategic Plan contains the vision, mission, objectives, strategies, policies, and development programs and activities of KL and is indicative.

1. INFORMASI UMUM (LANJUTAN)

1. GENERAL INFORMATION (CONTINUED)

f. Program dan Kegiatan BPK (Lanjutan)

Renstra KL tersebut menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan KL yang berisi kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.

Sebagai lembaga negara, BPK melakukan perencanaan dengan mempertimbangkan SPPN. Untuk itu, dokumen anggaran, khususnya RPJP dan RPJM Nasional, menjadi pertimbangan penyusunan Renstra BPK. Selanjutnya, Renstra BPK tersebut menjadi acuan penyusunan Renja BPK dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BPK sebagai dokumen anggaran tahunan BPK.

Unit Organisasi dan Satker BPK Tahun Anggaran 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

f. BPK Programs and Activities (Continued)

The KL Strategic Plan serves as a guideline for the formulation of the KL annual Work Plan (Renja) which contains policies, programs and development activities.

As a state institution, BPK plans to consider SPPN. For this reason, budget documents, in particular the RPJP and National RPJM, are taken into consideration in the preparation of the BPK Strategic Plan. Furthermore, the BPK Strategic Plan becomes the reference for the preparation of the BPK Renja and the BPK Work Plan and Budget (RKA) as the BPK annual budget document.

BPK Organizational Units and Satker for Fiscal Years 2020 and 2019 are as follows:

Bagian Anggaran/Unit organisasi/Satker/ Budget Section/	2020		2019	
Bagian Anggaran (BA)/ Budget Section (BS)	Badan Pemeriksa Keuangan/ The Audit Board (004)		Badan Pemeriksa Keuangan/The Audit Board (004)	
Unit Organisasi Eselon I/ Echelon I Organizational Unit	Badan Pemeriksa Keuangan/ The Audit Board (001)	Konsolidas (55)	Badan Pemeriksa Keuangan/ The Audit Board (001)	Konsolidas (55)
Satker / Work Unit	Aktif/ Active	Tidak Aktif/ Unactive	Aktif/ Active	Tidak Aktif/ Unactive
a. Kantor Pusat/ Central Office	2 Satker/ Unit	-	2 Satker/ Unit	-
b. Badan Diklat PKN	1 Satker/ Unit	-	1 Satker/ Unit	-
c. Balai Diklat PKN	3 Satker/ Unit	-	3 Satker/ Unit	-
d. Museum/ Museum	1 Satker/ Unit	-	1 Satker/ Unit	-
e. Perwakilan/ Representative	34 Satker/ Unit	-	34 Satker/ Unit	-
f. Konsolidasi BPK/ Consolidated	-	1 Satker/ Unit	-	1 Satker/ Unit
Total	41 Satker/ Unit	1 Satker/ Unit	41 Satker/ Unit	1 Satker/ Unit

Program/kegiatan BPK pada Tahun Anggaran 2020 secara rinci adalah sebagai berikut:

The detailed BPK programs / activities in the 2020 Fiscal Year are as follows:

Program/Kegiatan/ Program/Activities	Pengampu Eselon I/ Supporting Echelon I	Pengampu Eselon II/ Supporting Echelon II
004 : Badan Pemeriksa Keuangan/ The Audit Board		
01 : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPK/ /Management Support Program and Implementation of Other Technical Duties BPK		
1032 : Pelayanan Kesekretariatan, Kehumasan dan Kerja Sama Luar Negeri/ Secretariat Service, Public Relation and Cooperation.	Sekretariat Jenderal/Secretariat General	Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Internasional (Biro Humas dan KSI), Biro Sekretariat Pimpinan dan Museum BPK RI/ Bureau of Public Relations and International Cooperation (Bureau of Public Relations and KSI), Secretariat Bureau of the Chair and Museum of the BPK RI
1033 : Manajemen SDM/ Management of Human Resource	Sekretariat Jenderal/Secretariat General	Biro Sumber Daya Manusia (SDM)/ Bureau of Human Resource
1034 : Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara/ Management and Accountability of State Finance	Sekretariat Jenderal/Secretariat General	Biro Keuangan/ Bureau of Financial
1152 : Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Umum/ Management of Facilities and Infrastructure and Public Service	Sekretariat Jenderal/Secretariat General	Biro Umum/ Bureau of Public
2045 : Pelayanan kesekretariatan Badan	Sekretariat Jenderal/Secretariat General	Biro Sekretariat Pimpinan/ Bureau of Leadership Secretariat
2046 : Pengelolaan Sistem dan Teknologi Informasi	Sekretariat Jenderal/Secretariat General	Biro Teknologi informasi/ Bureau of Information Technology

1. INFORMASI UMUM (LANJUTAN)

1. GENERAL INFORMATION (CONTINUED)

f. Program dan Kegiatan BPK (Lanjutan)

f. BPK Programs and Activities (Continued)

Program/Kegiatan/ Program/Activities	Pengampu Eselon I/ Supporting Echelon I	Pengampu Eselon II/ Supporting Echelon II
08 : Program Pemeriksaan Keuangan Negara/ State Finance Auditing Program		
1043 : Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian kerugian negara/ State Finance Audit and Monitoring of State Losses	AKN I-VII, Auditorat Utama Investigasi dan Staf Ahli/ AKN I-VII, Main Auditorate Investigated, and the experts	- Auditorat pada AKN I - VII dan AUI/ Auditorate on AKN I-VII and AUI - BPK Perwakilan/ BPK Representative
1153 : Pengawasan Oleh Inspektorat/ Control by Inspectorate	Inspektorat Utama/ Main Inspectorate	Inspektorat PIMK, PKMP dan PI/ PIMK, PKMP and PI Inspectorate
1154 : Pelayanan Konsultasi Hukum dan Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah/ Legal Consultation Services and Courtesy of State Losses	Ditama Binbangkum/ Ditama Bingbangkum	Direktorat KHK/ KHK Directorate
1155 : Pelayanan Legislasi, Pengembangan, dan Bantuan Hukum/ Development Legislation Services and Legal Aid Services	Ditama Binbangkum/ Ditama Bingbangkum	Direktorat LPBH/ LPBH Directorate
1156 : Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja/ Strategic Planning and Performance	Ditama Revbang/ Ditama Revbang	Direktorat PSMK/ PSMK Directorate
1157 : Pengevaluasian dan Pelaporan Hasil Pemeriksaan/ Evaluating dan Reporting Audit Result	Ditama Revbang/ Ditama Revbang	Direktorat EPP/ EPP Directorate
1158 : Penelitian dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara/ Research and Development of State Finance Audit	Ditama Revbang/ Ditama Revbang	Direktorat Litbang/ R & D Directorate
1159 : Manajemen SDM Pemeriksaan Keuangan Negara/ HR Management Examining State Finance	Sekretariat Jendral/ Secretariat General	Biro Sumber Daya Manusia (SDM)/ Bureau of Human Resources Department
1167 : Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara/ State Financial Audit Education and Training	Badan Diklat PKN/ PKN Training Agency	Badan Diklat PKN dan Balai Diklat PKN/ State Financial Audit Education and Training
2039 : Investigasi atas Pengelolaan Keuangan Negara/ Investigation of State Financial Management	Auditorat utama Investigasi/ Principal Auditor of Investigation	Auditorat Utama Investigasi/ Investigative Principal Auditor

h. Capaian Output Strategis BPK TA 2020

h. BPK Strategic Output Achievements for 2020

Output Strategis BPK ada pada Program 08 yaitu Program Pemeriksaan Keuangan Negara. Adapun output Strategis yang telah dicapai oleh BPK sebagai berikut:

BPK's strategic output is in Program 08, namely the State Financial Audit Program. The strategic outputs that have been achieved by the BPK are as follows:

No	Kode Output Strategis/ Strategic Output Code	Uraian Output/ Output Description	Alokasi Anggaran/ Budget Allocation (Rp)	Realisasi Belanja/ Expenditure Realization (Rp)	% Penyerapan / Absorption	Target Output (Paket)/ Target Output (Package)	Realisasi Volume Output (Paket)/ Output Volume Realization (Package)	Progres Capaian Output / Progress of Output Performance (%)
1	143.001	LHP	338.231.128.000	316.103.642.901	93,46	6.574	6.456	98,21
	1043.083							
	1043.091-098							
	1043.101-133							
	1043.176							
	1043.190-224							
	2039.001							
2	1043.134-173	Laporan Pemantauan/	27.415.086.000	23.433.438.906	85,48	2.787	2.720	97,60
	1043.177	Monitoring Report						
3	1157.001	IHPS	2.706.960.000	2.706.636.502	99,99	2	2	100,00
4	1157.004	Konsep bahan Pendapat/ Material Concept of Opinion	176.000.000	175.999.000	100	1	1	100,00
5	1158.001	Hasil Kajian dan Penelitian	2.161.540.000	2.146.564.246	99,31	14	14	100,00

1. INFORMASI UMUM (LANJUTAN)

1. GENERAL INFORMATION (CONTINUED)

h. Capaian Output Strategis BPK TA 2020

1. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

Berdasarkan undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan, pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan aspek efektivitas dan PDTT adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja, termasuk pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif.

Pada tahun 2020, BPK telah melaksanakan pemeriksaan sesuai amanat Undang-Undang, baik yang bersifat Mandatory maupun merupakan inisiatif mandiri BPK. Tiap jenis pemeriksaan menghasilkan LHP dengan rincian sebagai berikut:

LHP	Target/ Target	Realisasi/ Realization	Anggaran/ Budget	Realisasi/ Realization
Pemeriksaan keuangan/ <i>Audit</i>	663	662	160.147.805.412	154.552.987.256
Pemeriksaan Kinerja/ <i>Performance Check</i>	223	218	61.024.540.677	52.792.744.300
PDTT	5.688	5.576	117.058.781.911	108.757.911.345
LHP dengan tujuan tertentu/ <i>LHP with a specific purpose</i>	306	268	96.826.558.911	90.924.629.778
LHP investigatif/ <i>Investigative LHP</i>	35	35	12.950.475.000	11.152.274.798
LHP Bantuan Partai Politik/ <i>LHP Political Party Assistance</i>	5.347	5.273	7.281.748	6.681.006.769
Total	6.574	6.456	338.231.128.000	316.103.642.901

a. Pemeriksaan Penanganan dan Pertanggungjawaban Dana COVID-19

Sebagai dampak dari pandemi COVID-19, Pemerintah menetapkan kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Sebagai institusi negara yang melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, keterlibatan BPK dalam penanganan COVID-19 sangat penting. Pada Kegiatan pemeriksaan tahun 2020, BPK mengambil kebijakan untuk melaksanakan pemeriksaan penanganan pandemi COVID-19. Pemeriksaan secara umum bertujuan untuk menilai efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam kondisi darurat pandemi COVID-19.

Pemeriksaan COVID-19 tahun 2020 menghasilkan sebanyak 236 LHP atau 100,43 % dari target *output* sebesar 235 LHP. Adapun realisasi anggaran mencapai Rp55.361.035.294 atau 91,17% jika dibandingkan dengan anggaran pemeriksaan COVID-19 tahun 2020 sebesar Rp60.726.006.422 seperti disajikan pada tabel berikut:

h. BPK Strategic Output Achievements for 2020

1. Inspection Result Report (LHP)

Based on Law No. 15 of 2004 concerning the Audit of State Financial Management and Responsibility, BPK carries out audits of the management and accountability of state finances which consist of financial audits, performance audits, and audits with specific objectives (PDTT). Financial examination is an examination of financial reports, a performance examination is an examination of economic and efficiency aspects, as well as an examination of effectiveness aspects and PDTT is an examination carried out with a special purpose outside of a financial examination and a performance examination, including an examination of other matters related to finance. and investigative investigations.

In 2020, BPK has carried out audits in accordance with the mandate of the Law, both Mandatory and BPK independent initiatives. Each type of inspection produces an LHP with the following details:

a. COVID-19 Fund Handling and Accountability Examination

As a result of the COVID-19 pandemic, the Government established state financial policies and financial system stability for handling the COVID-19 pandemic through a Government Regulation in Lieu of Law (Perpu) on State Financial Policy and Financial System Stability for Handling the 2019 Corona Virus Disease Pandemic (COVID-19) and / or in the context of dealing with Threats Endangering the National Economy and / or Financial System Stability. As a state institution that checks the management and responsibility of state finances, BPK's involvement in handling COVID-19 is very important. In the 2020 inspection activities, the BPK took a policy to carry out an examination of the handling of the COVID-19 pandemic. The general examination aims to assess the effectiveness, transparency, accountability and compliance of the management and responsibility of state finances in the emergency situation of the COVID-19 pandemic.

Examination of COVID-19 in 2020 resulted in 236 LHP or 100.43% of the target output of 235 LHP. The realization of the budget reached Rp55,361,035,294 or 91.17% when compared to the budget for the 2020 COVID-19 examination of Rp60,726,006,422 as presented in the following table:

1. INFORMASI UMUM (LANJUTAN)

1. GENERAL INFORMATION (CONTINUED)

h. Capaian Output Strategis BPK TA 2020 (Lanjutan)

h. BPK Strategic Output Achievements for 2020 (Continued)

LHP	Volume/ Volume			Anggaran (Rp)/ Budget (Rp)		
	Target/ Goals	Realisasi/ Realization	%	Rencana/ Plan	Realisasi/ Realization	%
LHP Kinerja/ LHP Performance	116	117	100,86	32.703.692.705	29.626.831.061	90,59
LHP DTT	119	119	100	28.022.313.717	25.734.204.233	91,83
Total	235	236	100,43	60.726.006.422	55.361.035.294	91,17

2. Laporan Pemantauan

Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Pasal 8 ayat (1), Ayat (2), Ayat (5) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan bahwa pejabat yang diperiksa dan/atau yang bertanggung jawab wajib menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut dipantau oleh BPK.

Selain itu, dalam Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian, BPK berwenang memantau penyelesaian dan pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah.

Capaian *Output* dan realisasi anggaran Laporan Pemantauan Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

2. Monitoring Report

Based on Article 20 of Law Number 15 Year 2004 regarding State Financial Management and Accountability Audit as well as Article 8 paragraph (1), article (2), article (5) Law Number 15 of 2006 concerning the Supreme Audit Agency states that officials who being examined and / or the person in charge is obliged to follow up on recommendations on the results of the BPK examination and the implementation of follow-up on the results of the examination is monitored by the BPK.

In addition, in Article 22 paragraph (4) of Law Number 15 of 2004 concerning Management and Responsibility of State Finances and Article 10 paragraph (1) of Law Number 15 of 2006 concerning the Supreme Audit Agency, to ensure the implementation of compensation payments , The BPK has the authority to monitor the settlement and implementation of the imposition of state / regional compensation.

Achievement of Output and realization of the 2020 Monitoring Report budget is presented in the following table:

No	Laporan Pemantauan/ Monitoring Report	Volume/ Volume			Anggaran (Rp) Budget (Rp)		
		Target/ Goals	Realisasi/ Realization	%	Rencana/ Plan	Realisasi/ Realization	%
1	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau daerah/ State or regional compensation settlement monitoring reports	1.293	1.293	100	16.205.540.000	13.830.777.317	85,35
2	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/ Monitoring Report of the Follow-up of Audit Results	1.494	1.427	95,52	11.209.546.000	9.602.662.589	85,67
Total		2.787	2.720	97,6	27.415.086.000	23.433.438.906	85,48

3. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS)

Pasal 18 Undang-Undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Mengamanatkan Kepada BPK untuk menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) kepada lembaga perwakilan, presiden, dan kepala daerah selambat-lambatnya 3 bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan. Pada tahun 2020, BPK telah menyampaikan 2 IHPS yaitu IHPS II Tahun 2019 dan IHPS I Tahun 2020. IHPS II Tahun 2019 merupakan ikhtisar dari 488 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK pada pemerintah Pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha milik Negara (BUMN) dan badan lainnya yang meliputi hasil pemeriksaan atas 1 laporan keuangan, 267 hasil pemeriksaan kinerja, dan 220 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (DTT).

3. Summary of Semester Examination Results (IHPS)

Article 18 of Law No. 15 of 2004 concerning State Financial Management and Responsibility Audit Mandates the BPK to submit an Overview of Semester Audit Results (IHPS) to representative institutions, the president, and regional heads no later than 3 months after the end of the semester concerned. In 2020, BPK has submitted 2 IHPS, namely IHPS II Year 2019 and IHPS I Year 2020. IHPS II Year 2019 is an overview of the 488 BPK Audit Result Reports (LHP) to the Central government, local governments, State-Owned Enterprises (BUMN) and other bodies which include the results of examination of 1 financial report, 267 results of performance audits, and 220 results of audits with specific purposes (DTT).

1. INFORMASI UMUM (LANJUTAN)

1. GENERAL INFORMATION (CONTINUED)

h. Capaian Output Strategis BPK TA 2020 (Lanjutan)

h. BPK Strategic Output Achievements for 2020 (Continued)

3. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) (Lanjutan)

3. Summary of Semester Examination Results (IHPS) (Continued)

IHP I Tahun 2020 merupakan ikhtisar dari 680 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK pada pemerintah Pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan lainnya yang meliputi hasil pemeriksaan atas 634 laporan keuangan, 7 hasil pemeriksaan kinerja, dan 39 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (DTT).

The IHP I Year 2020 is an overview of 680 BPK Audit Result Reports (LHP) at the Central government, local governments, State-Owned Enterprises (BUMN) and other entities that include the audit results of 634 financial reports, 7 performance audit results, and 39 audit results with a specific purpose (DTT).

4. Konsep Bahan Pendapat

4. Material Concept of Opinion

Sesuai dengan Pasal 11 Huruf a Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, menyatakan bahwa BPK dapat memberikan pendapatan kepada DPR, DPD, DPRD, Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah, Lembaga negara lain, Bank Indonesia, Badan usaha Milik Negara, badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik daerah, Yayasan, dan lembaga atau badan lain yang diperlukan karena sifat pekerjaannya. Pada tahun 2020, terdapat satu pendapat BPK yang telah disampaikan yaitu "Pengelolaan atas Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional".

In accordance with Article 11 Letter a Law Number 15 of 2006 concerning the Audit Board, states that the BPK can provide data to the DPR, DPD, DPRD, Central Government / regional governments, other state institutions, Bank Indonesia, State-owned enterprises, Public Services, regional Mlik Business Entities, Foundations, and other institutions or bodies that are required because of the nature of their work. In 2020, there is one BPK opinion that has been submitted, namely "Management of the Implementation of the National Health Insurance Program".

5. Hasil Kajian dan Penelitian

5. Results of Studies and Research

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, BPK berwenang memberi pertimbangan atas standar Akuntansi Pemerintah dan rancangan sistem pengendalian intern pemerintah pusat/daerah sebelum ditetapkan.

Based on Article 9 of Law Number 15 of 2006 concerning the Supreme Audit Agency, it is stated that in carrying out its duties, the BPK has the authority to give considerations to Government Accounting standards and the design of the internal control system of the central / regional government before being enacted.

Pasal 32 ayat(20) Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan negara juga menyatakan bahwa standar Akuntansi Pemerintahan disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Article 32 paragraph (20) of Law Number 17 of 2003 concerning State Finance also states that Government Accounting standards are prepared by an independent standard committee and stipulated by government regulations after first receiving consideration from the Audit Board of the Republic of Indonesia.

Memenuhi amanat undang-undang dan sehubungan dengan surat Menteri Keuangan RI nomor S-390/MK.05/2019 tanggal 15 Mei 2019 perihal permohonan pertimbangan Draft pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan: (1) Properti Investasi; (2) Sewa; (3) kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang dihentikan (Revisi PSAP 10) dan Nomor S-102/MK.05/2020 tanggal 11 Februari 2020 perihal permohonan pertimbangan Draft Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Pengaturan Konsesi jasa, pada tahun 2020 telah disampikan Pertimbangan BPK kepada Menteri Keuangan atas 4 Draf PSAP tersebut berdasarkan Surat Ketua BPK Nomor 56/S/I/04/2020 tanggal 16 April perihal Pertimbangan BPK atas Draft PSAP Pengaturan Konsesi Jasa dan Nomor 57/S/I/04/2020 tanggal 16 April 2020 tentang pertimbangan BPK atas Tiga Draft PSAP.

Fulfilling the mandate of the law and in connection with the letter of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia number S-390 / MK.05 / 2019 dated May 15, 2019 regarding the request for consideration of the Draft Declaration of Government Accounting Standards: (1) Investment Property; (2) Leases; (3) Accounting policies, Changes in Accounting Policies, Errors, changes in Accounting Estimates, and discontinued operations (Revised PSAP 10) and Number S-102 / MK.05 / 2020 dated February 11, 2020 regarding requests for consideration of the Draft Governmental Accounting Standard Statement of Concession Arrangements services, in 2020 BPK's considerations have been submitted to the Minister of Finance on the 4 PSAP Drafts based on the Suart of the Chairman of the BPK Number 56 / S / I / 04/2020 dated April 16 regarding BPK's Considerations on the PSAP Draft Service Concession Arrangement and Number 57 / S / I / 04/2020 dated April 16, 2020 regarding BPK's consideration of the Three PSAP Drafts.

2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

2. APPROACH TO DEVELOP FINANCIAL STATEMENTS

Laporan Keuangan tahun 2020 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BPK (Bagian Anggaran 004). Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Sistem Akuntansi Instansi terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAIBA dirancang untuk menghasilkan laporan keuangan satuan kerja (satker) yang terdiri dari laporan realisasi Anggaran (LRA), Neraca Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Sedangkan, SIMAK-BMN merupakan sistem akuntansi pendukung yang menghasilkan informasi persediaan, aset tetap dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara.

Dalam penyusunan laporan keuangan tingkat lembaga, BPK sebagai Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) melakukan konsolidasi laporan keuangan seluruh satuan kerja (satker) Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) di lingkungan BPK. Satker-satker tersebut bertanggungjawab dan berkewajiban menyusun laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran yang diterimanya kecuali satker konsolidasi yang merupakan satker tanpa DIPA.

Satker UAKPA penyusun laporan keuangan di lingkungan BPK berjumlah 42 satker yaitu terdiri dari:

This 2020 Financial Report is a report that covers all financial aspects managed by the BPK (Section Budget 004). This financial report is produced through the Agency Accounting System (SAI), which is a series of manual and computerized procedures ranging from data collection, recording and summarizing to reporting on financial position and financial operations at the State Ministries / Institutions.

The Agency Accounting System consists of the Accrual-Based Agency Accounting System (SAIBA) and the State Property Management and Accounting Information System (SIMAK-BMN). SAIBA is designed to produce financial reports for work units (satker) which consist of an Budget realization report (LRA), an operational report (LO), and a change in equity (LPE) report. Meanwhile, SIMAK-BMN is a supporting accounting system that produces information on inventories, fixed assets and other assets for the preparation of balance sheets and reports on state assets.

In the preparation of institutional-level financial reports, the BPK as the Budget User Accounting Unit (UAPA) consolidates the financial statements of all work units (satker) of the Budget accounting Unit Authority for User (UAKPA) within the BPK. The work units were responsible and obliged to prepare financial reports on the implementation of the budget they received, except for the consolidated satker which was a work unit without DIPA.

There are 42 UAKPA Satker compiling financial reports within the BPK, consisting of:

No	Nama Satker/ Name of Unit Works	KP/KD	Eselon I/ Echelon I		Jumlah Satker UAKPA/ Total UAKPA unit
			BPK (01)	Konsol/ Consol (01)	
1	Sekretariat Jenderal BPK/ <i>Secretariat General of BPK</i>	KP	1	-	1
2	Badan Pemeriksa Keuangan Pusat/BPK Headquarters	KP	1	-	1
3	Badan Pendidikan dan Pelatihan PKN/Education and Training Center	KP	1	-	1
4	BPK Perwakilan Provinsi Aceh/BPK Representative of Aceh Province	KD	1	-	1
5	BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara/BPK Representative of North Sumatera Province	KD	1	-	1
6	BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat/BPK Representative of West Sumatera Province	KD	1	-	1
7	BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan/BPK Representative of South Sumatera Province	KD	1	-	1
8	BPK Perwakilan Provinsi Riau/BPK Representative of Riau Province	KD	1	-	1
9	BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau/BPK Representative of Riau Islands Province	KD	1	-	1
10	BPK Perwakilan Provinsi Jambi/BPK Representative of Jambi Province	KD	1	-	1
11	BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu/BPK Representative of Bengkulu Province	KD	1	-	1
12	BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung/BPK Representative of Bangka Belitung Island Province	KD	1	-	1
13	BPK Perwakilan Provinsi Lampung/BPK Representative of Lampung Province	KD	1	-	1
14	BPK Perwakilan Provinsi Banten/BPK Representative of Banten Province	KD	1	-	1
15	BPK Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta/BPK Representative of the Province of Jakarta Capital Special Region (DKI)	KD	1	-	1
16	BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat/BPK Representative of West Java Province	KD	1	-	1
17	BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah/BPK Representative of Central Java Province	KD	1	-	1
18	BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa (D.I.) Yogyakarta/BPK Representative of Special Province (D.I.) Yogyakarta	KD	1	-	1
19	BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur/BPK Representative of East Java Province	KD	1	-	1
20	BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan/BPK Representative of South Kalimantan Province	KD	1	-	1
21	BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur/BPK Representative of East Kalimantan Province	KD	1	-	1
22	BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah/BPK Representative of Central Kalimantan Province	KD	1	-	1
23	BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat/BPK Representative of West Kalimantan Province	KD	1	-	1

2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)

2. APPROACH TO DEVELOP FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)

No	Nama Satker/ Name of Unit Works	KP/KD	Eselon I/ Echelon I		Jumlah Satker UAKPA/ Total UAKPA unit
			BPK (01)	Konsol/ Consol (01)	
24	BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara/BPK Representative of North Kalimantan Province	KD	1	-	1
25	BPK Perwakilan Provinsi Bali/BPK Representative of Bali Province	KD	1	-	1
26	BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)/BPK Representative of West Nusa Tenggara (NTB) Province	KD	1	-	1
27	BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)/BPK Representative of East Nusa Tenggara (NTT) Province	KD	1	-	1
28	BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara/BPK Representative of North Sulawesi Province	KD	1	-	1
29	BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah/BPK Representative of Central Sulawesi Province	KD	1	-	1
30	BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat/BPK Representative of West Sulawesi Province	KD	1	-	1
31	BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/BPK Representative of South Sulawesi Province	KD	1	-	1
32	BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara/BPK Representative of Southeast Sulawesi Province	KD	1	-	1
33	BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo/BPK Representative of Gorontalo Province	KD	1	-	1
34	BPK Perwakilan Provinsi Maluku/BPK Representative of Maluku Province	KD	1	-	1
35	BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara/BPK Representative of North Maluku Province	KD	1	-	1
36	BPK Perwakilan Provinsi Papua/BPK Representative of Papua Province	KD	1	-	1
37	BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat/BPK Representative of West Papua Province	KD	1	-	1
38	Balai Diklat PKN Medan/Medan Training Center	KD	1	-	1
39	Balai Diklat PKN D.I. Yogyakarta/Yogyakarta Training Center	KD	1	-	1
40	Balai Diklat PKN Gowa/Gowa Training Center	KD	1	-	1
41	Museum BPK RI/BPK RI Museum	KD	1	-	1
42	Konsolidasi BPK RI/BPK RI Consolidation	KP	-	1	1
Jumlah			41	1	42

Terdapat 1 (satu) Satker Konsolidasi BPK yang dibentuk berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-2228/PB/2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang petunjuk penggunaan satker konsolidasi.

There is 1 (one) BPK Consolidated Satker established based on the Letter of the Director General of Treasury Number S-2228 / PB / 2017 dated 28 February 2017 concerning the instructions for using the consolidated satker.

Satker konsolidasi tersebut dibentuk untuk mengakomodir jurnal take out revaluasi aset tetap pada tahun 2017, 2018 dan 2019 sesuai rekomendasi BPK yang berdampak pada seluruh Kementerian/Lembaga di Lingkup LKPP.

The consolidated working unit was formed to accommodate the fixed asset revaluation take-out journals in 2017, 2018 and 2019 according to the BPK recommendation which impacted all Ministries / Institutions in the LKPP Scope.

3. BASIS AKUNTANSI

3. ACCOUNTING BASIC

Dalam Menyusun laporan keuangan, BPK menerapkan basis akrual untuk penyusunan dan penyajian Neraca, LO, dan LPE serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian LRA. Basis akrual basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang standar Akuntansi Pemerintahan.

In preparing financial reports, BPK applies an accrual basis for the preparation and presentation of the balance sheet, LO and LPE as well as a cash basis for the preparation and presentation of the LRA. Accrual basis is an accounting basis that recognizes the effects of transactions and other events when they occur, regardless of when cash or cash equivalents are received or paid, whereas the cash basis is the accounting basis which recognizes the effect of transactions or other events when cash or cash equivalents are received or paid. This is in accordance with Government Accounting standards (SAP) which have been established by Government Regulation No. 71 of 2010 concerning Government Accounting standards.

4. DASAR PENGUKURAN

4. BASIC OF MEASUREMENT

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan oleh BPK dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Measurement is the process of determining the value for money to recognize and include each item in the financial statements. The measurement basis applied by the BPK in the preparation and presentation of the Financial Statements is to use historical cost.

4. DASAR PENGUKURAN (LANJUTAN)

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4. BASIC OF MEASUREMENT (CONTINUED)

Assets are recorded at the expense / use of economic resources or at the fair value of the consideration paid to acquire the asset. Liabilities are recorded at the fair value of the economic resources used by the government to fulfill the obligations concerned.

Measurement of financial report items uses the rupiah currency. Transactions using foreign currency are first converted and stated in rupiah currency.

5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2020 ini mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh BPK. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BPK adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan-Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada kas Umum Negara (KUN).

Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

2. Pendapatan-Laporan Operasional (LO)

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambahan ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada BPK adalah sebagai berikut:

- a) Pendapatan jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan;
- b) Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa;
- c) Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan;
- d) Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan penghapusan atau dokumen lain yang dipersamakan;
- e) Pendapatan Pelunasan Ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh Negara (TP/TGR) diakui saat dikeluarkannya surat keputusan TP/TGR atau dokumen lain yang dipersamakan.

5. ACCOUNTING POLICIES

The preparation and presentation of the 2020 Financial Statements refers to the Government Accounting Standards (SAP). Accounting policies are the principles, principles, conventions, rules and specific practices selected by a reporting entity in preparing and presenting financial statements. The accounting policies applied in this financial report are the policies set by the BPK. In addition, in its formulation, sound financial management principles have been applied in government circles.

Important accounting policies used in the preparation of BPK's Financial Statements are as follows:

1. Revenues-Statement of Budget Realization

Revenue-Statement of Budget Realization is all General Statement of Budget Realization Cash Account receipts that add more Budget Balance within the relevant fiscal year period to which the government is entitled and is not required to be repaid by the government. Revenue Statement of Budget Realization is recognized when the cash is received in the State Treasury.

The revenue-SoBR is executed on the basis of gross principle, by recording gross receipts, and not recording the net amount (after being offset). Revenue-Statement of Budget Realization is presented according to the classification of revenue sources.

2. Revenues-Statement of Operational

Revenue-Statement of Operational is a recognized central government right as an equity enhancer within the period of the fiscal year concerned and does not need to be repaid. Revenues- Statement of Operational are recognized when the right to revenue and/or Revenue is realized, ie the inflow of economic resources. In particular the revenue-Statement of Operational recognition to BPK is as follows:

- a) *Training Service Revenue is recognized after the training is completed;*
- b) *Building Rent Revenue is recognized proportionally between the value and the rental period;*
- c) *Fines Income is recognized at the time of issuance of fines or other equivalent documents;*
- d) *Revenues from the alienation of State of Goods shall be recognized upon the issuance of a decree of abolition or other equivalent documents;*
- e) *Revenue Reduction for Losses suffered by the State (Indemnification of Treasury/Claims Bills) is recognized upon the issuance of Indemnification of Treasury/Claims Bills decree or other equivalent documents.*

5. KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

5. ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

2. Pendapatan-Laporan Operasional (LO) (Lanjutan)

Akuntansi pendapatan LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

3. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran. Pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh kantor pelayanan perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyedia jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang, dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini, meliputi :

1) Kas

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. Kas terdiri atas :

a) Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Muka dari KPPN yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca.

2. Revenues-Statement of Operational (Continued)

The accounting revenue-Statement of Operational is carried out on a gross basis, by posting gross receipts, and not recording the net amount (after being offset). Revenue is presented according to the classification of revenue sources.

3. Expenditure

Expenditure is all spending from the State General Treasury Account which reduces the Budget Balance Over within the relevant fiscal year period that the government will not be repaid. Expenditures is recognized when a cash outflow is made from KUN. Specific expenditures through the expenditure treasurer, expenditure recognition occurs when the accountability of such expenditures is authorized by The Office of State Treasury Services. Expenditures are presented by economic classification/type of expenditure and subsequent classifications by organization and function shall be disclosed in the Notes to the Financial Statements.

4. Expenses

Expenses are the decline in economic benefits or potential services in the reporting period that decrease the equity, which may be the expenditure or consumption of assets or the incurrence of liabilities. Expenses are recognized when an obligation arises; asset consumption occurring; the decline in economic benefits or potential services. Expenses are presented under the economic classification/type of expenditure and subsequent classifications by organization and function are disclosed in the Notes to the Financial Statements.

5. Assets

Assets are economic resources that are controlled and/or owned by the government as a result of past events and from which future economic and/or social benefits are expected to be gained, either by the government or by society, and can be measured in units of money, including the non-financial resources necessary for the provision of services to the general public and resources maintained for historical and cultural reasons. In the sense of this asset does not include natural resources such as forests, wealth on the seabed, and mining content. Assets are recognized upon receipt or when ownership rights move.

Assets are classified into Current Assets, Fixed Assets, Long-Term Receivables, and Other Assets.

a. Current Assets

Current Assets include cash and cash equivalents that are expected immediately to be realized, used or owned for sale within 12 (twelve) months from the date of reporting. These current assets, including:

1) Cash

Cash is presented on the balance sheet using the nominal value. Cash in foreign currencies are presented on the balance sheet using the middle rate of BI at the balance sheet date. Cash consists of:

a) Cash in the Spending Treasurer is cash that is controlled, managed and under the responsibility of the Spending Treasurer derived from the Remnant Advance from The Office of State Treasury Service which has not been accounted or reimbursed to the State Treasury as of the balance sheet date.

5. KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

5. ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

5. Aset (Lanjutan)

a. Aset Lancar (Lanjutan)

1) Kas

a. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang sumbernya berasal dari uang muka dari KPPN yang belum disetor kembali ke Kas Negara pertanggal neraca.

b) Kas Lainnya dan Setara Kas mencakup Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran, yaitu kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari Uang Muka dari KPPN, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai.

Kas Lainnya dan Setara Kas berasal dari :

- Pendapatan yang Belum disetor

Pendapatan yang diterima oleh Bendahara Pengeluaran pada suatu periode anggaran namun pada akhir tahun anggaran belum disetorkan ke Kas Negara, yaitu berupa pajak, pengembalian belanja perjalanan dinas dan belanja pegawai (honor pegawai, TKPK, gaji), jasa giro, penerimaan PNBPN, dan lain-lain yang belum disetorkan.

Khusus untuk pengembalian Belanja tahun berjalan yang belum disetor, sesuai surat Dirjen Pembendaharaan No. S2875/PB.6/2016 tanggal 5 April 2016 menjelaskan bahwa pengembalian Belanja yang belum disetor diakui sebagai pengurangan Beban yang bersangkutan pada periode yang sama.

- Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya

Utang pihak ketiga yang berada pada Bendahara Pengeluaran yaitu berupa honor, gaji/TKPK, uang makan yang belum dibayarkan kepada pegawai, serta uang lainnya yang belum dibayarkan kepada pihak ketiga lainnya pada tanggal Neraca.

Perlakuan Akuntansinya adalah disisi Aset Lancar terdapat Kas Lainnya dan Setara Kas di Bendahara Pengeluaran, sedangkan disisi Kewajiban Jangka Pendek terdapat Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya.

- Utang Jangka Pendek Lainnya

Pajak yang dipotong oleh bendahara pengeluaran namun belum disetor ke Kas Negara sampai dengan tanggal pelaporan. Perlakuan Akuntansinya adalah disisi Aset Lancar terdapat kas Lainnya dan Setara Kas di Bendaharan Pengeluaran, sedangkan disisi Kewajiban Jangka Pendek terdapat Utang Pajak Bendahara yang belum disetor.

2) Belanja Dibayar Dimuka

Belanja Dibayar Dimuka berasal dari realisasi dari belanja tahun pelaporan, namun barang/jasa/fasilitas dari pihak ketiga belum seluruhnya diterima/dinikmati oleh satuan kerja.

Belanja dibayar dimuka berasal dari realisasi belanja barang untuk sewa gedung/bangunan dengan jangka sewa melebihi tahun pelaporan.

5. Assets (Continued)

a. Current Assets (Continued)

1) Cash

a. Cash in the Spending Treasurer covers all account balances of treasurer of expenditures, coins, notes, and other cash whose source comes from Advance from The Office of State Treasury Service which has not been paid back to the State Treasury as of the balance sheet date.

b) Other Cash and Cash Equivalents include Other Cash in the Spending Treasurer, which is cash which is under the responsibility of the treasurer of expenditures not originating from the Advance from the The Office of State Treasury Service, whether the account balance in the bank or cash balance.

Other Cash and Cash Equivalents come from:

- Unpaid Revenues

State income received by the Expenditure Treasurer in a budget period but at the end of the fiscal year has not been deposited to the State Treasury, there are of taxes, returns on official travel expenses and personnel expenses (salaries, TKPK, salaries), demand deposits, Non-Tax Income receipts, and others that have not been deposited.

Especially for the refund expenditures of the current year which has not been paid yet, pursuant to the letter of the Director General of Treasury No. S-2875/PB.6/2016 dated April 5, 2016 explains that the unpaid Refunds Expenditures are recognized as a deduction for the related Expenses in the same period.

- Debt to Other Third Parties

The third party's payable in the Spending Treasurer is in the form of honorarium, salary/TKPK, unpaid food allowance to the employee, and other unpaid money to other third parties at Balance Sheet period.

Accounting Treatment is on the Asset Current side there are Other Cash and Cash Equivalents in the Spending Treasurer, while in the Short Term Liability there is Debt to Other Third Parties.

- Other Short-Term Debts

Tax withheld by the spending Treasurer but not yet paid to the State Treasury up to the date of reporting. Accounting Treatment is on the Asset Current side there are Other Cash and Cash Equivalents in the Spending Treasurer, while in the Short-Term Liabilities there is Unpaid Treasury Payable.

2) Prepaid Expenditures

Prepaid Expenditures are derived from the actual expenditures of the reporting year, but goods/services/facilities from third parties have not been fully received/enjoyed by the unit work.

Prepaid expenditures originate from the realization of goods expenditures for the lease of buildings / buildings with a lease term that exceeds the reporting year.

5. KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

5. ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

5. Aset (Lanjutan)

a. Aset Lancar (Lanjutan)

2) Belanja Dibayar Dimuka (Lanjutan)

Belanja dibayar dimuka untuk masa lebih dari satu tahun tidak perlu dipisahkan sebagai akun tersendiri baik yang berjangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun maupun lebih dari 1 (satu) tahun seluruhnya dicatat sebagai aset lancar. Adapun metode perhitungan Belanja Barang Dibayar Dimuka adalah nilai sewa dibagi dengan jumlah sisa hari masa sewa yang masih belum digunakan.

3) Piutang bukan pajak

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Piutang berasal dari Piutang Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan tanggal neraca.

Akun Piutang Bukan pajak perlu diidentifikasi apakah masuk dalam kategori Pendapatan Yang Masih Harus Diterima atau Piutang PNPB dengan kebijakan yaitu :

a) Pendapatan yang Masih Harus Diterima adalah pendapatan PNPB yang berdasarkan perhitungan secara akuntansi sudah menjadi hak pemerintah tetapi belum ada hak tagihnya karena belum waktunya untuk dibayar/ditagih.

Kebijakan akuntansi untuk Pendapatan yang Masih Harus Diterima yaitu :

- Dasar pengakuan adalah perhitungan akuntansi atau tidak melalui penetapan.
- Dilakukan jurnal balik pada awal periode berikutnya.

- Tidak dilakukan perhitungan penyisihan atas Piutang Tak Tertagih

BPK tidak mempunyai akun pendapatan yang Masih Harus Diterima.

b) Piutang bukan pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Piutang Bukan Pajak terdiri atas :

1. Piutang PNPB adalah pendapatan PNPB tahun berjalan yang seharusnya sudah dibayarkan oleh Wajib Bayar dan telah timbul hak tagihnya oleh Pemerintah (telah jatuh tempo), namun belum diterima pembayarannya.

Kebijakan akuntansi untuk piutang PNPB yaitu :

- Dasar pengakuan adalah Surat Tagihan/Surat Penetapan/ yang dipersamakan.
- Tidak dilakukan jurnal balik pada awal periode berikutnya.
- Dilakukan perhitungan penyisihan atas Piutang Tak Tertagih.

Piutang PNPB berasal dari Piutang Pendapatan Sewa Rumah Dinas/Rumah Negeri, Pendapatan Sewa Gedung, Bangunan, dan Gudang yang belum dibayar oleh wajib bayar sampai dengan tanggal neraca, Kelebihan pembayaran belanja modal karena keterlambatan penyelesaian pekerjaan (yang dibayar melalui jaminan/ Bank garansi).

5. Assets (Continued)

a. Current Assets (Continued)

2) Prepaid Expenditures (Continued)

Prepaid expenditures for periods of more than one year need not be separated as separate accounts, whether with a maturity of less than 1 (one) year or more than 1 (one) year, are all recorded as current assets. The calculation method for Prepaid Goods Expenditures is the rental value divided by the remaining days of the rental period that are still unused.

3) Non Tax - Receivables

Accounts receivable are expressed in the balance sheet according to the value arising under the rights issued by the billing or equivalent letters which are expected to be returned within 12 (twelve) months after the date of reporting.

Receivables are from Non Taxes Received from non-tax state revenues up to the balance sheet date.

Non Tax Account Accounts should be identified whether they clasified into the Unearned Revenue category or Non-Tax Income Receivables with the following policies:

a) Unearned Revenue is the revenue of Non-Tax Income based on accounting calculation has become the right of the government but there is no right to collect because it is not yet time to be paid/collected.

The accounting policies for Unearned Revenue are:

- The basis for recognition is accounting or not through determination*
- A journal is conducted at the beginning of the next period.*
- Not calculated allowance for Uncollectible Receivable.*

BPK does not have an Unearned Revenue account.

b) Non-Tax Receivables are receivables arising from non-tax state revenues that have not been paid until the end of the financial statement period.

Non-Tax Receivables consist of:

1. Non-Tax Income Receivables are Non-Tax Income income for the current year that should have been paid by the obligatory payers and have been collected by the government (due dated) but have not yet received the payment.

The accounting policies for Non-Tax Income Receivables are:

- The basis for recognition is the Bills/Letter of Establishment/ Equalization.*
- No reverse journal was performed at the beginning of the next period.*
- The allowance for uncollectible accounts is calculated.*

Non-Tax Income receivables are derived from the Office/Home Office Revenue Receipt, Building Revenue, Buildings and Warehouse Unpaid by the obligation to pay up to the balance sheet date, Excess payment of capital expenditures due to late settlement ofwork (paid by guarantee/Bank Guarantee).

5. KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

5. ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

5. Aset (Lanjutan)

a. Aset Lancar (Lanjutan)

3) Piutang bukan pajak (Lanjutan)

2. Piutang Lainnya berasal dari Piutang yang berasal dari selain Piutang Bukan Pajak dan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi misalnya :

- Kelebihan belanja perjalanan dinas yang telah dipertanggungjawabkan rampung jumlahnya, namun pada tanggal neraca masih belum diselesaikan oleh pelaksana perjalanan dinas, serta
- Kelebihan pembayaran gaji/TKPK kepada pegawai.

Kebijakan akuntansi untuk piutang lainnya adalah :

- Tidak dilakukan jurnal balik pada awal periode berikutnya melainkan saat penyetoran ke kas Negara.
 - Dilakukan perhitungan penyisihan atas Piutang Tak Tertagih.
- Sesuai Surat Dirjen Pembendaharaan No. S-2875/PB.6/2016 tanggal 5 April 2016 menjelaskan bahwa Pengembalian Belanja yang belum disetor diakui sebagai pengurang Beban yang bersangkutan pada periode yang sama.

4) Piutang disajikan dalam Neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihan adalah sebagai berikut :

Kualitas Piutang/ <i>Quality of Receivables</i>	Uraian/ <i>Descriptions</i>	Penyisihan/ <i>Allowance</i>
Lancar/ <i>Current</i>	Belum dilakukukan pelunasan s.d. Tanggal jatuh tempo/ <i>Not to be repaid until the maturity date</i>	0,50%
Kurang Lancar/ <i>Non Current</i>	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan/ <i>One month commencing from the date of the First Billing Letter not being repaid</i>	10%
Diragukan/ <i>Doubtful</i>	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan/ <i>One month from date of the Second Receipt Letter is not repaid</i>	50%
Macet/ <i>Loss</i>	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan/ <i>One month commencing from the date of the Third Tax Return is not redeemed</i> 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN/ <i>Receivables have been submitted to the State Receivables Management Committee/DJKN</i>	100%

5) Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian Lancar Tagihan TP/TGR

6) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan dalam kondisi baik yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dibalikan dengan :

- a) Harga Pembelian terakhir, Apabila diperoleh dengan pembelian;

5. Assets (Continued)

a. Current Assets (Continued)

3) Non Tax - Receivables (Continued)

2. Other Receivables come from accounts receivable from non-taxable receivables and Current Portion of Claims on Compensation for example:

- The excess of official travel expenses that have been accounted for is completed, but at the balance sheet date has not been resolved by the official travel officer, as well as
- Advantages of salary payment/TKPK to employees.

The accounting policies for Other Receivables are as follows:

- No reverse journal was made at the beginning of the next period but at the time of deposit to the State Treasury.
- The allowance for uncollectible accounts is calculated.

In accordance with the letter of Director General of Treasury No. S-2875/PB.6/2016 dated April 5, 2016 explains that the unpaid refunds are recognized as a deduction for the related Expenses during the same period.

4) Receivables are presented in the Balance Sheet at a realizable value. This is realized by establishing an allowance for doubtful accounts. The allowance is based on the quality of receivables determined on the basis of maturity and collection efforts by the government. The allowance is as follows:

5) Indemnification of Treasury/Claims which will mature 12 (twelve) months after the balance sheet date is presented as Current Section of Indemnification of Treasury/Claims Bills.

6) Inventory is a current asset in the form of goods or equipment in good condition intended to support the government's operational activities, and goods intended to be delivered in service to the public. Inventory Value is recorded based on the result of physical calculation at balance sheet date multiplied by:

- a) The last purchase price, when acquired by purchase;

5. KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

5. ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

5. Aset (Lanjutan)

a. Aset Lancar (Lanjutan)

- b) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Dalam menghitung harga pokok produksi, dapat digunakan biaya standar dalam hal perhitungan biaya riil sulit dilakukan;
- c) Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Sesuai dengan kebijakan akuntansi, beban persediaan hanya diperhitungkan untuk persediaan yang sifatnya umum, tidak termasuk persediaan yang berasal dari belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat. Untuk persediaan yang bersifat umum, beban persediaan tahun berjalan termasuk didalamnya persediaan yang masih ada digudang dengan kondisi rusak atau usang. walaupun secara fisik persediaan masih ada tidak diperhitungkan sebagai saldo persediaan. Apabila saldo persediaan akhir yang sebelum opname fisik nilainya lebih besar dari hasil opname fisik maka dicatat sebagai pengurang persediaan.

b. Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap meliputi tanah; peralatan dan mesin, gedung dan bangunan; jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya; serta konstruksi dalam pengerjaan. Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar. Sesuai dengan Peraturan Menteri keuangan 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN pengakuan perolehan aset tetap sejak 2018 didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut :

- Pengeluaran untuk persatuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
- Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut diatas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Akibat dari penerapan perubahan kebijakan kapitalisasi aset tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang penatausahaan BMN, data BMN menjadi terbagi dua, yaitu:

- 1) Daftar BMN Intrakomptable, mencakup BMN berupa aset tetap yang memenuhi kriteria kapitalisasi dan seluruh BMN yang diperoleh sebelum berlakunya kebijakan kapitalisasi, dan BMN yang diperoleh melalui transaksi Transfer Masuk/Penerimaan dari pertukaran/pengalihan Masuk BMN yang dipindahbukukan dari daftar BMN Ekstrakomtable pada saat nilai akumulasi biaya perolehan dan nilai pengembangannya telah mencapai batas minimum kapitalisasi.

5. Assets (Continued)

a. Current Assets (Continued)

- b) *The cost of production if obtained by producing itself. In calculating the cost of production, standard cost can be used in terms of real cost calculation is difficult;*
- c) *Fair price or estimated sales value if obtained by other means.*

In accordance with the accounting policy, inventory expenses are only calculated for general inventories, excluding inventories derived from goods purchases to be delivered to the public. For general inventories, the current year's inventory expenses include the remaining inventories in the warehouse with damaged or obsolete conditions. Although physical inventory still exists not counted as inventory balance. If the balance of the ending inventory which prior to the physical opname is greater than that of the physical hospital shall be recorded as a deduction of Inventory.

b. Fixed Assets

Fixed assets include all tangible assets utilized by the government or for the benefit of the public with a useful life of more than one year. Fixed assets include land; equipment and machinery; properties and buliding; roads, irrigation, and networks; other fixed assets; as well as Construction in Progress. The value of Property and Equipment is presented at cost or fair value. In accordance with Minister of Finance Regulation No. 181/PMK.06/2016 concerning Administration of BMN, the recognition of acquisition of property, plant and equipment since 2018 is based on the value of the minimum capitalization unit as follows:

- *Expenditures of unit of equipment and machinery and sports equipment equal to or more than Rp1,000,000 (one million rupiah);*
- *Expenditures on Properties and Buliding equal to or more than Rp25,000,000 (twenty five million rupiah);*
- *Expenditures not covered by the minimum capitalization limits mentioned above are treated as expenses except land, road/irrigation/network expenditures and other fixed assets in the form of library and art-related collections.*

As a result of the implementation of the asset capitalization policy, as stated in Regulation of the Minister of Finance No. 181/PMK.06/2016, State of Goods data is divided into two categories:

- 1) *List of State of Goods Intracomptables, including State of Goods in the form of fixed assets that meet the capitalization criteria and all State of Goods acquired prior to the enactment of capitalization policies, and State of Goods obtained through Incoming/ Receipt Transfers from Exchange/Inbound Transfer as well as State of Goodss transferred from the List of State of Goods Ekstrakomptabel at the time of accumulated value the cost of acquisition and development value has reached the minimum limit of capitalization.*

5. KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

5. ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

5. Aset (Lanjutan)

b. Aset Tetap (Lanjutan)

- 2) Daftar BMN Ekstrakomtable, mencakup BMN berupa aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.

Peralatan dan mesin yang diperoleh sebelum 1 Januari 2002, yang diperoleh sejak 1 Januari 2002 s.d. 31 Desember 2017 dengan nilai satuan minimum lebih dari atau sama dengan Rp300.000,- dan yang diperoleh sejak 1 Januari 2018 dengan nilai satuan minimum lebih dari atau sama dengan Rp1.000.000,- serta yang diperoleh dari pengalihan dikapitalisasi sebagai aset tetap. Peralatan dan mesin dengan kategori ini dibukukan dan dilaporkan di dalam Daftar BMN dan Laporan BMN Intrakomtable. Peralatan dan mesin yang diperoleh sejak 1 Januari 2018 tetapi nilai satuannya kurang dari Rp1.000.000 tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap. Peralatan dan mesin dengan kategori ini dibukukan didalam Daftar BMN dan Laporan BMN Ekstrakomtable.

Gedung dan bangunan yang diperoleh sebelum 1 Januari 2002, yang diperoleh sejak 1 Januari 2002 s.d. 31 Desember 2017 dengan nilai satuan minimum lebih dari atau sama dengan Rp10.000.000,- dan yang diperoleh sejak 1 Januari 2018 dengan nilai satuan minimum lebih dari atau sama dengan Rp25.000.000,- serta yang diperoleh dari pengalihan dikapitalisasi sebagai aset tetap. Gedung dan Bangunan dengan kategori ini dibukukan dan dilaporkan didalam Daftar BMN dan Laporan BMN Intrakomtable. Gedung dan bangunan yang diperoleh sejak 1 Januari 2002 s.d. 31 Desember 2017 tetapi nilai satuannya kurang dari Rp25.000.000,- tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap. Gedung dan Bangunan dengan kategori ini dibukukan di dalam Daftar BMN dan Laporan BMN Ekstrakomtable.

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan /buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan, hewan, ikan dan tanaman.

Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset tetap Renovasi. Renovasi dapat dilakukan terhadap semua barang milik dalam kelompok aset tetap. Dalam hal Aset tetap yang direnovasi tersebut memenuhi kriteria kapitalisasi dan bukan milik suatu satker, maka renovasi tersebut dicatat sebagai aset tetap renovasi.

Akun Aset Tetap Renovasi di BPK terjadi karena 3 hal, yaitu:

- 1) Renovasi aset tetap milik satuan kerja lain dalam satu K/L (BPK).
Satuan kerja yang melaksanakan renovasi (satker Setjen) tidak mencatatnya sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait karena kepemilikan aset tetap tersebut ada pada satuan kerja lain (BPK Perwakilan Provinsi/Badan Diklat PKN/Balai Diklat PKN/Museum BPK;

5. Assets (Continued)

b. Fixed Assets (Continued)

- 2) List of State of Goods Extracomtables, including State of Goods in the form of fixed assets that do not meet the criteria of capitalization.

Equipment and machines obtained before January 1, 2002, obtained from January 1, 2002 s.d. December 31, 2017 with a minimum unit value of more than or equal to Rp300,000 and those obtained from January 1 2018 with a minimum unit value of more than or equal to Rp1,000,000 and those obtained from transfers are capitalized as fixed assets. Equipment and machines with this category are recorded and reported in the BMN List and BMN Intrakomtable Report. Equipment and machines acquired since January 1, 2018 but the unit value of less than Rp1,000,000 are not capitalized as fixed assets. Equipment and machines with this category are recorded in the BMN List and BMN Extracomtable Report.

Properties and Buildings acquired before January 1, 2002, obtained from January 1, 2002 s.d. December 31, 2017 with a minimum unit value of more than or equal to IDR 10,000,000 and those obtained from January 1, 2018 with a minimum unit value of more than or equal to IDR 25,000,000 and those obtained from the transfer are capitalized as fixed assets. Properties and Buildings with this category are recorded and reported in the BMN List and BMN Intrakomtable Report. Buildings and structures acquired since January 1, 2002 s.d. December 31, 2017 but the unit value is less than Rp. 25,000,000, - not capitalized as fixed assets. Properties and Buildings with this category are recorded in the BMN List and the BMN Extracomtable Report.

Other fixed assets include fixed assets that can not be grouped into groups Land; Equipment and Engineering; Building and Construction; Roads, Irrigation and Networks, acquired and used for the operations of government and in ready to use. The assets included in the category of Other Fixed Assets is a collection of libraries/book and non-book items patterned art/culture, animals, fish, and plants.

Included in the category Other Fixed Assets Fixed Assets Renovation is. Remodeling can be conducted on all belongings in a group of fixed assets. In the case of the fixed assets that meet the capitalization criteria remodeled and does not belong to a work unit, the renovations were recorded as fixed assets renovation.

Accounts Fixed Assets Renovation in BPK occur because of three things:

- 1) Renovation of fixed assets belonging to other work units in a K/L (BPK).
Carrying out renovation work units (satker Secretariat) not recorded as additions to fixed assets related to the acquisition value of fixed assets such as ownership exist in other work unit (BPK Representative/Pusdiklat BPK).

5. KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

5. ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

5. Aset (Lanjutan)

b. Aset Tetap (Lanjutan)

2) Renovasi aset tetap milik satuan kerja K/L lain.

Satuan kerja yang melaksanakan renovasi (satker BPK) tidak mencatatnya sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait karena kepemilikan aset tetap tersebut ada pada satuan kerja K/L lain;
Pada poin 1) dan 2) apabila renovasi tersebut telah selesai pengerjaannya sebelum tanggal pelaporan maka akan dibukukan sebagai Aset tetap Lainnya- Aset Tetap Renovasi dan disajikan di neraca sebagai kelompok Aset Tetap. Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut masih dalam proses pengerjaan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahkan (dari kontraktor kepada satker BPK), maka akan dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

3) Renovasi aset tetap milik instansi pemerintah lainnya (Pemda) dan renovasi aset tetap milik pihak lain selain pemerintah (Swasta, BUMN/BUMD, Yayasan, dan lain-lain).

Satuan kerja yang melaksanakan renovasi (satker BPK) tidak mencatatnya sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait kepemilikan aset tetap tersebut ada pada pihak lain.

Apabila renovasi tersebut telah selesai pengerjaannya sebelum tanggal pelaporan maka akan dibukukan sebagai aset tetap lainnya- Aset tetap Renovasi dan disajikan di neraca sebagai kelompok Aset Tetap. Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut masih dalam proses pengerjaan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahkan (dari kontraktor kepada satker BPK), maka akan dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

Aset tetap (termasuk Aset Tetap renovasi) yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos Aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2017 tentang Penilaian Kembali barang Milik Negara/daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali barang Milik Negara.

Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta jalan, jaringan dan irigasi berupa jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodifikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jendral Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Pada Badan Pemeriksa Keuangan RI revaluasi dilakukan pada tahun 2017.

5. Assets (Continued)

b. Fixed Assets (Continued)

2) Renovation of fixed assets belonging to the working unit K/L others.

Carrying out renovation work units (satker BPK) did not record it as an addition to the value of acquisition of fixed assets related to the ownership of the fixed assets is on a working unit K/L others;
At points 1) and 2) when the renovation is complete the process before the reporting date, the assets will be recorded as Other Fixed-Fixed Assets Renovation and presented in the balance sheet as fixed assets group. If up to the reporting date the renovations are still in progress, or completed but not yet handed over the process (of a contractor to work unit BPK), it will be recorded as Construction In Work (KDP).

3) Renovation of fixed assets belonging to other government agencies (local government) and the renovation of fixed assets owned by other parties other than the government (private, state/enterprises, foundations, etc.).

Unit works undertaking renovations (BPK unit works) do not record them as additions to the related fixed asset value due to the ownership of such fixed assets to others.

If the renovation has been completed prior to the reporting date it will be recorded as Other Fixed Assets Renovations and Assets Renovated and presented on the balance sheet as a Group of Property Assets. Up to the date of reporting the renovation is still under construction, or has been completed but not yet handed over (from contractor to BPK), it will be recorded as Construction In Progress.

Fixed assets (including Renewal Assets) terminated from active use of the government do not meet the definition of fixed assets and must be transferred to Other Assets item at their carrying amount.

The government revalues (revaluation) based on the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 75 of 2017 concerning Reassessment of State/Regional Property and Minister of Finance Regulation Number 118/PMK.06/2017 concerning Guidelines for Implementing the Reassessment of State Property.

Revaluation is carried out on fixed assets in the form of land, buildings and buildings, as well as roads, networks and irrigation in the form of bridges and water structures at the State Ministries / Institutions according to the codification of State Property acquired up to December 31, 2015. included in the scope of revaluation objects are assets still at the Ministries / Institutions that are being implemented the Utilization. The implementation of the assessment in the context of revaluation is carried out using the market data approach, cost approach, and / or income approach by the Government appraiser within the Directorate General of State Assets, Ministry of Finance. revaluations were carried out in 2017 and 2018. In the Republic of Indonesia Audit Agency, revaluations were carried out in 2017.

5. KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

5. ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

5. Aset (Lanjutan)

b. Aset Tetap (Lanjutan)

Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.

Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutan adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.

Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari Neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

Penyajian hasil revaluasi BMN dalam Laporan Neraca (laporan posisi BMN di Neraca) disajikan dengan nilai wajar hasil revaluasi tanpa akumulasi penyusutan. Secara umum akan terdapat tiga jurnal atas transaksi Penilaian kembali BMN (kecuali atas Tanah) yaitu:

- Jurnal untuk menghapus akumulasi penyusutan (kode 205).
- Jurnal koreksi semu untuk menurunkan nilai perolehan menjadi nilai buku (kode 223).
- Jurnal untuk menyesuaikan nilai buku menjadi nilai hasil revaluasi (kode 205)

c. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No. 65/PMK.06/2017 tentang penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset tetap pada Entitas Pemerintahan Pusat.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk :

- a. Menyajikan nilai Aset tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- b. Mengetahui potensi BMN dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu BMN yang masih diharapkan dapat diperoleh dalam beberapa tahun kedepan;
- c. Memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset tetap yang sudah dimiliki.

5. Assets (Continued)

b. Fixed Assets (Continued)

Based on the consideration of budget efficiency and completion time, the implementation of the appraisal was carried out with a field survey for the valuation object in the form of land and without a field survey for the valuation object other than land.

The value of fixed assets resulting from the revaluation is a new acquisition value and the accumulated value of depreciation is zero. In the event that the value of a fixed asset revalued is higher than the previous book value, the difference is recognized as an increase in equity in the Financial Report. However, if the value of a fixed asset revalued is lower than the previous book value, the difference is recognized as a reduction in equity in the Financial Report.

Fixed Assets Unused in government operations caused by, among others, worn out, out of date with the needs of the growing organization, severely damaged, inconsistent with the General Spatial Plan, or their useful life has ended up reclassified to Assets Others on Other Assets post.

Fixed assets that are permanently discontinued, are removed from the balance sheet at the time of any proposed removal from the entity in accordance with the provisions of legislation in the management of State of Goods.

Presentation of BMN revaluation in the Balance Sheet Report (position report at BMN on the Balance Sheet) is presented with the fair value of the revaluation result without accumulated depreciation. In general, there will be three journals for BMN Revaluation transactions (except for land), namely:

- Journal to delete accumulated depreciation (code 205).
- A quasi-correction journal to reduce the acquisition value to book value (code 223).
- A journal to adjust the book value becomes a revalued value (code 205).

c. Depreciation of Fixed Assets

Depreciation of property and equipment is a value adjustment in relation to the decrease in the capacity and benefits of a fixed asset. Depreciation policy of fixed assets is based on Regulation of the Minister of Finance No. 65/PMK.06/2017 concerning Depreciation of State Property in the Form of Fixed Assets in Central Government Entities.

Depreciation of Fixed Assets is done for:

- a. Present the value of the Property Equivalent Assets in accordance with the economic benefits of assets in the Central Government Financial Statements;
- b. Knowing the potential of State of Goods by reporting the remainder the expected benefits of a State of Goods can be obtained in the next few years;
- c. Provide a more systematic and logical approach to budgeting maintenance expenditures or capital expenditures to replace or add to existing fixed assets.

5. KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

5. ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

5. Aset (Lanjutan)

c. Penyusutan Aset tetap (Lanjutan)

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

- Tanah;
- Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP);
- Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola barang untuk dilakukan penghapusan;
- Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan kewenangan untuk dilakukan pemindahatanganan, pemusnahan, atau penghapusan;
- Aset Tetap Renovasi berupa Tanah; dan
- Aset Tetap renovasi yang tidak menambah Masa Manfaat.

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa meperhitungkan adanya nilai residu. Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset tetap secara merata setiap semester selama masa Manfaat.

Masa Manfaat Aset tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 59/KMK.06/2013 tentang tabel masa manfaat dalam rangka penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Kelompok Aset Tetap	Masa Mafaat/ Estimated Useful Life	Fixed Asset Group
Peralatan dan Mesin	2 - 20 tahun/ years	Equipment and Machine
Gedung dan Bangunan	10 - 50 tahun/ years	Properties and Buildings
Jalan, Jaringan, dan irigasi	5 - 40 tahun/ years	Roads, Network and Irrigation
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun/ years	Other Fixed Assets (Modern Musical Instruments)

d. Piutang Jangka Panjang

Piutang jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang jangka Panjang adalah Piutang tagihan Tuntutan Pembendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.

Tuntutan Pembendaharaan adalah tangguhan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.

Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Piutang TP/TGR yang telah diserahkan penagihannya kepada Kementerian Keuangan dalam hal ini DJKN, karena macet dicatat sebagai Tagihan TP/TGR.

5. Assets (Continued)

c. Depreciation of Fixed Assets (Continued)

Depreciation of fixed assets is not carried out against:

- Land;*
- Construction in Progress;*
- Fixed Assets declared to be lost on the basis of valid source documents or in conditions of serious damage and/or obsolescence that have been proposed to the Goods Manager for removal;*
- Fixed Assets in a heavily and/or obsolete condition that has been proposed to the Goods Manager or the Goods Users in accordance with their authority for alienation, destruction or removal;*
- Fixed Assets Renovation of Land; and*
- Fixed Assets Renovations that do not add to the Benefit Period.*

The calculation and recording of Depreciation of Fixed Assets shall be done at the end of each semester without taking into account the residual value. Depreciation of Fixed Assets is done using the straight-line method by allocating depreciable value of fixed assets equally each semester during the Benefit Period.

The Useful Life of Fixed Assets is determined by referring to Decree of the Minister of Finance No. 59/KMK.06/2013 concerning Table of Benefit Period in the Framework of Depreciation of State Property in the form of Fixed Assets in Central Government Entities. In general, the useful life table is as follows:

d. Long-Term Receivables

Long-term Receivables are receivable that will be due or will be realized more than 12 months from the date of reporting. Included in Long-term Receivables are Accounts Receivable Indemnification of Treasury/Claims Bills that are due for more than one year.

Treasury Demands shall be claims set by the State Audit Board to treasurers who due to negligence or unlawful acts result in losses of the State/region.

Indemnification Claims is a process done to a civil servant or not a treasurer of a treasurer in order to claim the replacement of a loss suffered by the state as a direct or indirect consequence of an act which is unlawful by the employee or the negligence in the execution the task.

Indemnification of Treasury/Claims receivables that have been submitted to the Ministry of Finance in this case DJKN, since the loss is recorded as Indemnification of Treasury/Claims bills.

5. KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

5. ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

5. Aset (Lanjutan)

e. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Aset lainnya ini meliputi :

- 1) Aset Tak Berwujud meliputi *software*, Lisensi, serta Aset tak Berwujud Lainnya. Aset tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset tak Berwujud disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi amortisasi.

Pada Aset lainnya-Aset Tak Berwujud dilakukan amortisasi mulai Tahun 2016 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang tatacara Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Amortisasi yang terjadi pada Aset Lainnya-Aset Tak Berwujud yang diperoleh sebelum tahun 2016 dilakukan dengan mengoreksi nilai Ekuitas tahun sebelumnya.

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Masa manfaat Aset tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan No. 620/KMK.6/2015 tentang Masa Manfaat dalam Rangka Amortisasi barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara Umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Kelompok Aset tak Berwujud	Masa Mafaat/ Estimated Useful Life	Intangible Asset Group
<i>Software</i> Komputer	4 tahun/ years	Computer Software
Franchise	5 tahun/ years	Franchise
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10 tahun/ years	License, Simple Patent, Brand, Industrial Design, Trade Secret, Layout Design of Integrated Circuit
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun/ years	Economic Rights of Broadcasting Institution, Common Patents, Crop Variety Protection Annual.
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas tanaman Tahunan	25 tahun/ years	Copyright of Applied Art Works, Annual Plant Variety Protection
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Prosedur Fonogram	50 tahun/ years	Copyright on Goal Creation. II, Economic Rights Performer Performance, Economic Rights Procedur Phonogram.
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 tahun/ years	Copyright on Gol Creation.I

- 2) Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas dan disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

5. Assets (Continued)

e. Other Assets

Other Assets are government assets other than current assets, fixed assets, and long-term receivables. Other Assets include:

- 1) *Intangible assets include software, licenses, and other Intangible Assets. Intangible Assets are identifiable assets that have no physical form and are held for use in the production of goods or services or used for other purposes including intellectual property rights. Intangible Assets are stated at net carrying amount at cost less amortization.*

On Other Assets - Intangible Assets is amortized starting 2016 in accordance with Regulation of the Minister of Finance No. 251/PMK.06/2015 on Amortization Procedures of State Property in the form of Intangible Assets of Government Entities. Amortization occurring on Other Assets - Intangible Assets acquired in 2016 becomes the amortization expense of Other Assets - the Intangible Assets concerned. Amortization occurring on Other Assets Intangible Assets acquired prior to 2016 is effected by adjustment the value of the previous year's Equity.

The amortization of Intangible Assets with a limited useful life is performed on a straight - line method and residual value of nil. While on Intangible Assets with unlimited period of utilization is not made amortization.

The useful life of Intangible Assets is determined by referring to Decree of the Minister of Finance No. 620/KMK.6/2015 on The Useful life for the Amortization of State Assets in the form of Intangible Assets in Government Entities. In general, the useful life table is as follows:

- 2) *Other Assets in the form of government fixed assets that are discontinued from the operational use of the entity and are presented at book value at cost less accumulated depreciation.*

5. KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

5. ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

6. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek dalam pengelolaan keuangan BPK terdiri dari:

1) Utang kepada Pihak Ketiga berasal dari :

- Belanja yang masih harus dibayar yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal.
- Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya yang merupakan kontra akun dari Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran.

Kewajiban ini timbul akibat hak atas barang/jasa telah diterima dan dinikmati dan/atau perjanjian komitmen telah dilakukan oleh kementerian negara/Lembaga/ Pemerintah, namun sampai akhir periode pelaporan belum dilakukan pembayaran/pelunasan/realisasi atas hak/perjanjian/komitmen tersebut. Khusus untuk belanja modal yang masih harus dibayar tidak mempengaruhi beban laporan operasional, tetapi bersamaan dengan pengakuan belanja modal yang masih harus dibayar harus diakui adanya aset yang diperoleh. dengan demikian apabila terdapat aset yang sudah diperoleh yang belum dibayar diakui sebagai kewajiban.

Pada saat pembayaran belanja yang masih harus dibayar tahun sebelumnya, dilakukan penyesuaian dengan cara mendebet akun belanja yang masih harus dibayar dan mengkredit akun beban pada tanggal yang sama. Dalam hal penyesuaian tidak dapat dilakukan pada tanggal transaksi, maka harus diperhitungkan pada akhir tahun untuk menentukan besarnya nilai pada jurnal penyesuaian.

- 2) Pendapatan diterima dimuka adalah pendapatan pajak dan/ atau pendapatan bukan pajak yang sudah diterima di rekening kas negara tetapi belum menjadi hak pemerintah sepenuhnya karena masih melekat kewajiban pemerintah untuk memberikan barang. Jasa di kemudian hari kepada pihak ketiga atau adanya kelebihan pembayaran oleh pihak ketiga tetapi belum dikembalikan. Pendapatan diterima dimuka di BPK antara lain berupa Pendapatan Sewa Diterima untuk masa lebih dari satu tahun tidak dipisahkan sebagai akun tersendiri baik berjangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun maupun lebih dari 1 (satu) tahun seluruhnya dicatat sebagai kewajiban jangka pendek. Adapun metode perhitungan Pendapatan Sewa Diterima Dimuka adalah jumlah hari sisa masa sewa yang belum dinikmati oleh pihak ketiga dibagi jumlah hari seluruhnya dikalikan dengan nilai sewa yang dibayarkan oleh pihak ketiga.**

- 3) Akun Uang Muka dari KPPN merupakan jumlah kas di Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan (UP) dan tambahan uang Persediaan (TUP) yang digunakan untuk membayar belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.**

6. Liabilitas

Liability is a debt arising from past events whose settlement resulted in a flow of government economic resources. Government liabilities are classified into short-term liabilities and long-term liabilities.

a. Short Term Liabilities

An liabilities are classified as a short-term liability if expected to be paid or due within twelve months after the date of reporting. Short-term liabilities in BPK financial management consist of:

1) Payable to Third Parties from:

- *Accrued expenditures consisting of employee expenditures, goods expenditures, and capital*
- *Debt to Other Third Parties which is the contra account counter from Other Cash in the Spending Treasurer.*

This liabilities accrued because the right to goods/services has been received and enjoyed and/or the commitment agreement has been made by the state ministries/Institutions/government, but until the end of the reporting period has not been paid/settlement/realization of the rights/agreements/commitments. Specifically for the accrued capital expenditures does not affect the burden of the operational report, but simultaneously with the recognition of the accrued capital expenditure an asset is recognized. Thus, if any unearned assets are recognized as liabilities.

At the time of payment of expenditures accrued in the previous year, adjustments are made by debiting the accrued expense account and crediting the expense account on the same date. In the event that the adjustment can not be made on the date of the transaction, it must be calculated at the end of the year to determine the value of the adjusting entries.

- 2) Revenue received in advance are tax revenues and/or non-tax revenues already received in the state treasury account but are not yet entirely entitled to the government because they are still inherent in the government's obligation to provide future goods/services to third parties or any excess payment by third parties but not been restored. Revenue received in advance at the BPK is in the form of Rental Income Received Upfront. Rental Income Accepted Advance for more than one year is not separated as a separate account whose terms of less than 1 (one) year or more than 1 (one) year are all recorded as short-term liabilities. The method of calculating the Rent Revenue received in advance is the amount of remaining days of rental period not used yet by the Third Party divided by the total number of days multiplied by the rent paid by the third party.**

- 3) The Advance Payment Account of The Office of State Treasury Service is the amount of cash in the Spending Treasurer derived from the Inventory money and Additional Inventory Money used to pay personnel expenditures, goods expenditures and capital expenditures.**

5. KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

5. ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

6. Kewajiban (Lanjutan)

a. Kewajiban Jangka Pendek

4) Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan kontra akun kas Lainnya dan Setara Kas yang berasal dari pajak yang sudah dipotong oleh Bendahara Pengeluaran namun belum disetor ke Kas Negara sampai dengan tanggal Neraca.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. sampai saat ini BPK tidak mempunyai kewajiban jangka Panjang.

7. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Nilai Ekuitas Awal merupakan Nilai Ekuitas yang berasal dari nilai Ekuitas Akhir tahun lalu.

Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

6. Liabilitas (Continued)

a. Short Term Liabilities

4) Other Short Term payable contra-account is the counter of other Cash and Cash Equivalents account derived from taxes already withheld by the Spending Treasurer but not yet paid to the State Treasury up to the Balance Sheet date.

b. Long Term - Liabilities

Liabilities are classified as long-term liabilities if expected to be paid or matured more than twelve months after the date of reporting. Liabilities are recorded at nominal value, which is the value of the government's liabilities at the first transaction. To date, BPK has no Long-Term Liabilities.

7. Equity

Equity represents the difference between assets and liabilities in a period. Beginning Balance of Equity represents the Equity Value derived from the value of the Equity at the End of the previous year.

Further disclosures of equity are presented in the Statement of Changes in Equity.

6. KEBIJAKAN KHUSUS PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

6. SPECIFIC POLICY FOR THE PREPARATION OF THE 2020 FINANCIAL STATEMENTS

Penyusunan Laporan Keuangan tahun 2020 ini mengacu pada surat Direktur Jendral Pembendaharaan Nomor S-947/PB/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Jadwal Rekonsiliasi, penyusunan, dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2020 *Audited* serta perlakuan Akuntansi atas Transaksi Akhir Tahun yang mengatur secara khusus hal-hal tertentu terkait mekanisme dan proses dalam penyusunan Laporan Keuangan tahun 2020 *Audited*.

The preparation of the 2020 Financial Statements refers to the Director General of Treasury's letter Number S-947 / PB / 2020 dated 30 December 2020 concerning the Reconciliation Schedule, Preparation, and Submission of the 2020 Audited State Ministries / Institutions (LKKL) Financial Statements as well as the Accountant's treatment of the Final Transaction. A year that specifically regulates certain matters related to the mechanisms and processes in the preparation of the 2020 Audited Financial Statements.

7. ANGGARAN DAN REALISASI PENDAPATAN

7. BUDGET AND REALIZATION OF REVENUES

Anggaran dan realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

The budget and realization of revenues FY 2020 are as follows:

No	Uraian/ Descriptions	Estimasi dan Anggaran/ Estimation and Budget	Realisasi (Netto)/ Realization (Neto)	% Realisasi/ %Realization
1	Pendapatan/ Revenue	8.995.794.000	25.364.103.898	281,96
	- Penerimaan Negara Bukan Pajak/ Non-Tax Income	8.995.794.000	25.364.103.898	281,96

Selama periode Tahun Anggaran 2020, BPK telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari penetapan awalnya. Hal ini disebabkan adanya program *refocusing* anggaran pemerintah terkait penanganan Pandemi COVID-19 dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan.

During the period of Fiscal Year 2020, BPK has revised the Budget Implementation List (DIPA) from its initial determination. This is due to the government budget refocusing program related to the handling of the COVID-19 Pandemic and changes in activities according to the needs and situations and conditions at the time of implementation.

7. ANGGARAN DAN REALISASI PENDAPATAN (LANJUTAN)

7. BUDGET AND REALIZATION OF REVENUES (CONTINUED)

Perubahan estimasi pendapatan Tahun Anggaran 2020 berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Changes in estimated revenue budget for Fiscal Year 2020 based on revenue sources and types of expenditure are as follows:

No	Uraian/ Descriptions	Estimasi dan Anggaran Awal/ Estimates and Initial Budgets	Estimasi dan Anggaran Setelah Revisi/ Estimates and Budget After Revision
1	Pendapatan/ Revenue	8.995.794.000	8.995.794.000
	- Penerimaan Negara Bukan Pajak/ Non-Tax Income	8.995.794.000	8.995.794.000

Realisasi Pendapatan dan Hibah pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp25.364.103.898 atau mencapai 281,96% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp8.995.794.000. Pendapatan ini terdiri dari Pendapatan dari Pengelolaan BMN, Pendapatan Pendidikan, Pendapatan Jasa Lainnya, Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening dan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Denda dan Pendapatan Lain-lain.

Realization of Income and Grants in the 2020 Fiscal Year amounted to Rp25,364,103,898 or reached 281.96% of the estimated income set at Rp8,995,794,000. This income consists of income from BMN management, education income, other service income, interest income, account management and financial management, income from fines and other income.

Rincian estimasi dan realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

The details of the estimated and realized revenue for Fiscal Year 2020 are as follows:

No	Uraian Pendapatan & Hibah/ Descriptions Revenues and Grants	Estimasi Pendapatan/ Revenues Estimation	Realisasi Pendapatan/ Revenues Realization	%
1	Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN (4251)/ Revenues from Sales, BMN Management, Business Entity Contributions and BMN Insurance Claims Receipt (4251)	1.959.066.000	5.776.159.992	294,84
2	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi (4254)/ Revenues from Education, Culture, Research and Technology (4254)	3.864.530.000	5.359.070.031	138,67
3	Pendapatan Jasa Lainnya (4256)/ Other Service Revenues (4256)	3.172.198.000	4.191.457.353	132,13
4	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan (4257)/ Interest Income, Banking Account Management and Financial Management (4257)	-	62.977.767	-
5	Pendapatan Denda (4258)/ Fine Income (4258)	-	56.462.820	-
6	Pendapatan Lain-Lain (4259)/ Other Income (4259)	-	9.917.975.935	-
Jumlah/ Total		8.995.794.000	25.364.103.898	281,96

Realisasi pendapatan mencapai 281,96% dari estimasinya yang antara lain berasal dari:

Revenue realization reached 281.96% of the estimation which, among others, came from:

- Adanya pendapatan yang melebihi target yang ditetapkan untuk pendapatan dari pengelolaan BMN, pendapatan PNPB fungsional dari Badiklat PKN dan pendapatan dari Audit Fee atas pemeriksaan Laporan Keuangan IAEA.
- Adanya pendapatan dari penyelesaian ganti kerugian negara dan pendapatan denda yang tidak ditetapkan sebagai target penerimaan.
- Adanya pendapatan lain-lain berupa penerimaan kembali belanja pegawai TAYL dan setoran pengembalian pegawai dari temuan Inspektorat Utama.

- There is revenue that exceeds the target set for revenue from BMN management, functional PNPB revenue from PKN Training Center and revenue from Audit Fees for auditing IAEA Financial Statements.*

- There is income from the settlement of state compensation and fine income which is not set as the target of revenue.*

- The existence of other income in the form of receiving TAYL employee expenditure returns and employee return deposits from the findings of the Main Inspectorate.*

Pendapatan Tahun Anggaran 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp2.988.641.319 atau sebesar 13,36% dari realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp22.375.462.579.

Revenue for Fiscal Year 2020 has increased by Rp2,988,641,319 or 13.36% of the realization of revenue for Fiscal Year 2019 amounting to Rp22,375,462,579.

7. ANGGARAN DAN REALISASI PENDAPATAN (LANJUTAN)

7. BUDGET AND REALIZATION OF REVENUES (CONTINUED)

Perbandingan realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

A detailed comparison of revenue realization for Fiscal Year 2020 and Fiscal Year 2019 can be seen in the following table:

No	Uraian Pendapatan & Hibah/ Descriptions Revenues and Grants	Tahun Anggaran/ Fiscal Year		Kenaikan/(Penurunan)/ Increase/(Decrease)	
		2020	2019	Rp	%
1	Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, luran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN (4251)/ <i>Revenues from Sales, BMN Management, Business Entity Contributions and BMN Insurance Claims Receipt (4251)</i>	5.776.159.992	5.003.929.762	772.230.230	15,43
2	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi (4254)/ <i>Revenues from Education, Culture, Research and Technology (4254)</i>	5.359.070.031	6.107.570.158	(748.500.127)	(12,26)
3	Pendapatan Jasa Lainnya (4256)/ <i>Other Service Revenues (4256)</i>	4.191.457.353	3.910.261.032	281.196.321	7,19
4	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan (4257)/ <i>Interest Income, Banking Account Management and Financial Management (4257)</i>	62.977.767	50.550.640	12.427.127	24,58
5	Pendapatan Denda (4258)/ <i>Fine Income (4258)</i>	56.462.820	30.307.118	26.155.702	86,30
6	Pendapatan Lain-Lain (4259)/ <i>Other Income (4259)</i>	9.917.975.935	7.272.843.869	2.645.132.066	36,37
Jumlah/ Total		25.364.103.898	22.375.462.579	2.988.641.319	13,36

1. Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, luran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN

Realisasi Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, luran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp5.776.159.992 atau 294,84% dari estimasi pendapatan sebesar Rp1.959.066.000. Realisasi pendapatan ini mengalami kenaikan sebesar Rp772.230.230 atau 15,43% dari realisasi pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN, luran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp5.003.929.726.

Kenaikan realisasi pendapatan tersebut antara lain disebabkan:

- Adanya kenaikan pendapatan dari penjualan Peralatan dan Mesin dari kegiatan lelang BMN.
- Adanya kenaikan pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya karena peningkatan pendapatan dari kegiatan lelang BMN.
- Adanya kenaikan pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan karena adanya kontrak sewa ATM yang diperbaharui kembali.

Rincian perbandingan realisasi dari Penjualan, Pengelolaan BMN, luran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

1. Revenues from Sales, BMN Management, Business Entity Contributions and BMN Insurance Claims Receipt

Realized Revenue from Sales, Management of BMN, Business Entity Fees, and Receipt of BMN Insurance Claims in the 2020 Fiscal Year amounted to Rp5,776,159,992 or 294.84% of the estimated income of Rp1,959,066,000. This revenue realization increased by Rp772,230,230 or 15.43% of the realization of revenue from sales, BMN management, Business Entity Fees and Insurance Claims Receipt for the 2019 Fiscal Year amounting to Rp5,003,929,726.

The increase in revenue realization was due to, among others:

- There was an increase in revenue from the sale of equipment and machines from BMN auction activities.
- There was an increase in revenue from the transfer of other BMN due to the increase in revenue from BMN auction activities.
- There was an increase in rental income for land, properties and buildings due to the renewed ATM rental contracts.

The details of the comparison of the realization of Sales, Management of BMN, Business Entity Fees and Receipt of BMN Insurance Claims for Fiscal Year 2020 and Fiscal Year 2019 are as follows:

Kode Akun/ Code Account	Uraian/ Descriptions	Tahun Anggaran/ Fiscal Year		Kenaikan/(Penurunan)/ Increase/(Decrease)	
		2020	2019	Rp	%
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin/ <i>Revenue from sales Tools and Machine</i>	1.269.093.924	948.954.552	320.139.372	33,74
245129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya/ <i>Other Revenues from the alienation of State of Goods</i>	2.161.382.637	1.732.978.332	428.404.305	24,72
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan/ <i>Rental Land, Properties, and Building Revenue</i>	1.718.540.313	1.678.421.878	40.118.435	2,39
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai Tusi/ <i>Revenue for the Use of Facilities and Infrastructure according to duties and functions</i>	661.925.000	695.575.000	(33.650.000)	(4,84)
Realisasi Pendapatan Bruto / Realization Revenue Bruto		5.810.941.874	5.055.929.762	755.012.112	14,93
Pengembalian Pendapatan/ Refund Revenue		34.781.882	52.000.000	(17.218.118)	(33,11)
Realisasi Pendapatan Neto/ Realization Revenue Netto		5.776.159.992	5.003.929.762	772.230.230	15,43

7. ANGGARAN DAN REALISASI PENDAPATAN (LANJUTAN)

7. BUDGET AND REALIZATION OF REVENUES (CONTINUED)

2. Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi

2. Revenues from Education, Culture, Research and Technology

Realisasi Pendapatan dari Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp5.359.070.031 atau 138,67% dari estimasi pendapatan sebesar Rp3.864.530.000.

Realization of Revenue from Education, Culture, Research and Technology in the 2020 Fiscal Year amounted to Rp5,359,070,031 or 138.67% of the estimated income of Rp3,864,530,000.

Realisasi pendapatan ini mengalami penurunan sebesar Rp748.500.127 atau 12,26% dari realisasi pendapatan sejenis Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp6.107.570.158. Hal ini disebabkan antara lain karena adanya penurunan pendapatan layanan pendidikan dan/atau pelatihan pada Satker Badan Diklat PKN karena pengaruh Pandemi Covid-19.

This revenue realization decreased by Rp748,500,127 or 12.26% from the realization of similar revenue for the 2019 Fiscal Year amounting to Rp6,107,570,158. This was due to, among other things, a decrease in income from education and / or training services at the PKN Training and Education Agency work unit due to the influence of the Covid-19 Pandemic.

Rincian perbandingan realisasi pendapatan pendidikan, budaya, riset dan teknologi Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

The details of the comparison of the realization of income from education, culture, research and technology for the 2020 Fiscal Year and the 2019 Fiscal Year are as follows:

Kode Akun/ Code Account	Uraian/ Descriptions	Tahun Anggaran/ Fiscal Year		Kenaikan/(Penurunan)/ Increase/(Decrease)	
		2020	2019	Rp	%
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan/ Education and / or Training Service Income	5.423.970.031	6.107.570.158	(683.600.127)	(11,19)
Realisasi Pendapatan Bruto / Realization Revenue Bruto		5.423.970.031	6.107.570.158	(683.600.127)	(11,19)
Pengembalian Pendapatan/ Refund Revenue		64.900.000	-	64.900.000	
Realisasi Pendapatan Neto/ Realization Revenue Netto		5.359.070.031	6.107.570.158	(748.500.127)	(12,26)

3. Pendapatan Jasa Lainnya

3. Other Service Revenues

Realisasi Pendapatan Jasa Lainnya pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp4.191.457.353 atau 132,13% dari estimasi pendapatan sebesar Rp3.172.198.000. Realisasi pendapatan ini mengalami kenaikan sebesar Rp281.196.321 atau 7,19% dari realisasi pendapatan jasa lainnya Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp3.910.261.032.

Realization of Other Services Revenue in the 2020 Fiscal Year amounted to Rp4,191,457,353 or 132.13% of the estimated income of Rp3,172,198,000. This revenue realization increased by Rp281,196,321 or 7.19% of the realization of other service revenues for the 2019 Fiscal Year amounting to Rp3,910,261,032.

Pendapatan jasa lainnya merupakan penerimaan Audit Fee dari International Atomic Energy Agency (IAEA). Penyetoran Audit Fee atas pemeriksaan Laporan Keuangan IAEA dan pemeriksaan tiga entitas yang dikelola IAEA dengan menggunakan valuta Euro dilakukan langsung ke Rekening Kas Umum Negara di Bank Indonesia dengan nomor rekening 600.502991980 dengan bukti pemindahbukuan tanggal 17 Maret 2020 sebesar Rp1.913.513.117, tanggal 3 November 2020 sebesar Rp377.606.621 dan 16 November 2020 sebesar Rp1.900.337.615.

Other service revenues are received by the Audit Fee from the International Atomic Energy Agency (IAEA). Deposit of the Audit Fee for the examination of the IAEA Financial Statements and the examination of three entities managed by the IAEA using Euro currency is carried out directly to the State General Treasury Account at Bank Indonesia with account number 600.502991980 with proof of transfer dated 17 March 2020 amounting to Rp1,913,513,117, dated 3 November 2020 amounting to Rp377,606,621 and November 16, 2020 amounting to Rp1,900,337,615.

Rincian perbandingan realisasi Pendapatan Jasa Lainnya untuk periode yang berakhir sampai dengan Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

Details of the comparison of the realization of Other Service Revenue for the period ending up to Fiscal Year 2020 and Fiscal Year 2019 are as follows:

Kode Akun/ Code Account	Uraian/ Descriptions	Tahun Anggaran/ Fiscal Year		Kenaikan/(Penurunan)/ Increase/(Decrease)	
		2020	2019	Rp	%
425699	Pendapatan Jasa Lainnya/ Other Service Revenues	4.191.457.353	3.910.261.032	281.196.321	7,19
Realisasi Pendapatan Bruto / Realization Revenue Bruto		4.191.457.353	3.910.261.032	281.196.321	7,19
Pengembalian Pendapatan/ Refund Revenue		-	-	-	-
Realisasi Pendapatan Neto/ Realization Revenue Netto		4.191.457.353	3.910.261.032	281.196.321	7,19

7. ANGGARAN DAN REALISASI PENDAPATAN (LANJUTAN)

7. BUDGET AND REALIZATION OF REVENUES (CONTINUED)

4. Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan

Realisasi Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp62.977.767. Tidak ada estimasi pendapatan untuk pendapatan ini. Realisasi pendapatan ini mengalami kenaikan sebesar Rp12.427.127 atau 24,58% dari realisasi pendapatan sejenis Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp50.550.640.

Kenaikan tersebut disebabkan karena adanya kenaikan pendapatan penyelesaian ganti kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain.

Rincian perbandingan realisasi Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

4. Interest Income, Banking Account Management and Financial Management

Realization of Interest Income, Banking Account Management and Financial Management in the 2020 Fiscal Year amounted to Rp62,977,767. There is no revenue estimate for this income. This revenue realization increased by Rp12,427,127 or 24.58% from the realization of similar revenue for the 2019 Fiscal Year amounting to Rp50,550,640.

The increase was due to an increase in state compensation settlement income for civil servants who are not treasurers or other officials.

Details of the comparison of the realization of Interest Income, Banking Account Management and Financial Management for Fiscal Year 2020 and Fiscal Year 2019 are as follows:

Kode Akun/ Code Account	Uraian/ Descriptions	Tahun Anggaran/ Fiscal Year		Kenaikan/(Penurunan)/ Increase/(Decrease)	
		2020	2019	Rp	%
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)/ Income from Financial Institution Services (Giro Services)	47.067	929.515	(882.448)	(94,94)
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap PNS bukan Bendahara atau Pejabat Lain/ Settlement Income for State Compensation for Civil Servants who are not Treasurers or Other Officials	48.530.700	35.221.125	13.309.575	37,79
425792	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara/ State Compensation Settlement Income to the Treasurer	14.400.000	14.400.000	-	-
Realisasi Pendapatan Bruto / Realization Revenue Bruto		62.977.767	50.550.640	12.427.127	24,58
Pengembalian Pendapatan/ Refund Revenue		-	-	-	-
Realisasi Pendapatan Neto/ Realization Revenue Netto		62.977.767	50.550.640	12.427.127	24,58

Realisasi Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan/Jasa Giro (425764) sebesar Rp47.067 merupakan realisasi pendapatan pada satuan kerja BPK Perwakilan Kepulauan Riau pada periode Bulan Januari 2020 saja dan tidak muncul kembali pada bulan berikutnya. Hal ini terjadi karena rekening atas nama BPG 137 BPK Batam di Bank Negara Indonesia Cabang Batam dengan Nomor Rekening 7784685752 belum terdaftar dalam Treasury National Pooling (TNP) sebelum dilakukan perubahan ke Rekening Induk dan Rekening Virtual yang saat ini diterapkan di BPK RI.

Realization of Income from Financial Institution Services / Giro Services (425764) amounting to Rp47,067 is the realization of revenue at the Riau Islands Representative BPK work unit in the January 2020 period only and does not reappear in the following month. This occurs because the account in the name of BPG 137 BPK Batam at Bank Negara Indonesia Batam Branch with Account Number 7784685752 has not been registered in the Treasury National Pooling (TNP) prior to changes to the Master Account and Virtual Account currently implemented at BPK RI.

5. Pendapatan Denda

Realisasi Pendapatan Denda pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp56.462.820. Tidak ada estimasi pendapatan untuk pendapatan ini. Realisasi pendapatan ini mengalami kenaikan sebesar Rp26.155.702 atau 86,30% dari realisasi pendapatan sejenis pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp30.307.118.

5. Fines Income

Realized Fines Revenue in the 2020 Fiscal Year amounted to Rp56,462,820. There is no revenue estimate for this income. This revenue realization increased by Rp26,155,702 or 86.30% of the realization of similar income in the 2019 Fiscal Year amounting to Rp30,307,118.

7. ANGGARAN DAN REALISASI PENDAPATAN (LANJUTAN)

7. BUDGET AND REALIZATION OF REVENUES (CONTINUED)

5. Pendapatan Denda (Lanjutan)

Rincian perbandingan realisasi Pendapatan Denda Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

5. Fines Income (Continued)

The details of the comparison of the realization of Fines Revenue for Fiscal Year 2020 and Fiscal Year 2019 are as follows:

Kode Akun/ Code Account	Uraian Descriptions	Tahun Anggaran/ Fiscal Year		Kenaikan/(Penurunan)/ Increase/(Decrease)	
		2020	2019	Rp	%
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah/ Income of Fines Delayed Completion of Government	56.462.820	30.307.118	26.155.702	86,30
Realisasi Pendapatan Bruto / Realization Revenue Bruto		56.462.820	30.307.118	26.155.702	86,30
Pengembalian Pendapatan/ Refund Revenue		-	-	-	-
Realisasi Pendapatan Neto/ Realization Revenue Netto		56.462.820	30.307.118	26.155.702	86,30

6. Pendapatan Lain-lain

Realisasi Pendapatan Lain-lain pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp9.917.975.935. Tidak ada estimasi pendapatan untuk pendapatan ini. Realisasi pendapatan ini mengalami kenaikan sebesar Rp2.646.212.066 atau 36,38% dari realisasi pendapatan sejenis pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp7.272.843.869. Kenaikan ini diantaranya disebabkan karena kenaikan pendapatan sebagai berikut:

- Kenaikan yang berasal dari Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (425911);
- Kenaikan yang berasal dari Pendapatan Lain-lain (425999) berupa setoran pengembalian pegawai dari temuan Inspektorat Utama;

Rincian perbandingan realisasi Pendapatan Lain-lain Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

6. Other Revenue

Realization of Other Income in the 2020 Fiscal Year amounted to Rp9,917,975,935. There is no revenue estimate for this income. This revenue realization increased by Rp2,646,212,066 or 36.38% of the realization of similar income in the 2019 Fiscal Year amounting to Rp7,272,843,869. This increase was due to, among others, an increase in income as follows:

- The increase came from TAYL Employee Returns of Expenditures (425911);
- The increase originating from Other Income (425999) is in the form of employee repayments from the findings of the Main Inspectorate;

The details of the comparison of the realization of Other Income for Fiscal Year 2020 and Fiscal Year 2019 are as follows:

Kode Akun/ Code Account	Uraian/ Descriptions	Tahun Anggaran/ Fiscal Year		Kenaikan/(Penurunan)/ Increase/(Decrease)	
		2020	2019	Rp	%
425911	Pendapatan Kembali Belanja Pegawai TAYL/ TAYL Employees Return Expenditure Income	2.061.698.713	1.447.698.288	614.000.425	42,41
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL/ Acceptance of Return of Goods expenditure TAYL	2.958.757.646	5.809.674.237	(2.850.916.591)	(49,07)
425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Uang Non TP/TGR/ Deposit Income from Remaining Money Non TP / TGR	17.759.576	13.309.304	4.450.272	33,44
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji/ Receipt of Persekot Returns / Salary Advances	-	2.162.040	(2.162.040)	(100,00)
425999	Pendapatan Anggaran Lain-Lain/ Other Budget Income	4.880.840.000	-	4.880.840.000	100,00
Realisasi Pendapatan Bruto / Realization Revenue Bruto		9.919.055.935	7.272.843.869	2.646.212.066	36,38
Pengembalian Pendapatan/ Refund Revenue		1.080.000	-	1.080.000	-
Realisasi Pendapatan Neto/ Realization Revenue Netto		9.917.975.935	7.272.843.869	2.645.132.066	36,38

8. ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA

8. BUDGET AND REALIZATION OF EXPENDITURE

Anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

The budget and realization of expenditure FY 2020 are as follows:

No	Uraian/ Descriptions	Estimasi dan Anggaran/ Estimation and Budget	Realisasi (Netto)/ Realization (Netto)	% Realisasi/ %Realization
1	Belanja/ Expenditure	3.599.443.771.000	3.439.084.663.084	95,54
	- Belanja Pegawai/ Employee Expenditure	2.021.936.812.000	1.961.586.733.636	97,02
	- Belanja Barang/ Goods Expenditure	1.300.598.499.000	1.213.615.416.985	93,31
	- Belanja Modal/ Capital Expenditure	276.908.460.000	263.882.512.463	95,30

8. ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA (LANJUTAN)

8. BUDGET AND REALIZATION OF EXPENDITURE (CONTINUED)

Perubahan estimasi belanja Tahun Anggaran 2020 berdasarkan sumber belanja dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Changes in estimated expenditure budget for Fiscal Year 2020 based on expenditure sources and types of expenditure are as follows:

No	Uraian/ Descriptions	Estimasi dan Anggaran Awal/ Estimates and Initial Budgets	Estimasi dan Anggaran Setelah Revisi/ Estimates and Budget After Revision
1	Belanja/ Expenditure		
	- Belanja Pegawai/ Employee Expenditure	2.062.842.758.000	2.021.936.812.000
	- Belanja Barang/ Goods Expenditure	1.359.783.938.000	1.300.598.499.000
	- Belanja Modal/ Capital Expenditure	94.239.510.000	276.908.460.000

Realisasi Belanja pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp3.439.084.663.084 atau 95,54% dari anggaran belanja sebesar Rp3.599.443.771.000.

Expenditure Realization in the 2020 Fiscal Year amounted to Rp3,439,084,663,084 or 95.54% of the expenditure budget of Rp3,599,443,771,000.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja serta pengembalian Belanja Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

The details of the budget and the realization of Expenditures and the return of the 2020 Fiscal Year Expenditures are as follows:

Kode/ Code	Uraian/ Descriptions	Tahun Anggaran/ Fiscal Year 2020		
		Anggaran / Budget	Realisasi / Realization	%
51	Belanja Pegawai/ Employee Expenditure	2.021.936.812.000	1.966.379.462.308	97,25
52	Belanja Barang/ Goods Expenditure	1.300.598.499.000	1.218.670.369.553	93,70
53	Belanja Modal/ Capital Expenditure	276.908.460.000	263.882.512.463	95,30
Total Belanja Bruto/ Total Gross Expenditures		3.599.443.771.000	3.448.932.344.324	95,82
Pengembalian Belanja/ Expenditure Returns		-	9.847.681.240	
Total Belanja Neto/ Total Netto Expenditure		3.599.443.771.000	3.439.084.663.084	95,54

Rincian anggaran dan realisasi belanja berdasarkan jenis program dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Details of budget and expenditure realization by program type can be seen in the following table:

Kode/ Code	Uraian/ Descriptions	Tahun Anggaran/ Fiscal Year 2020		
		Anggaran / Budget	Realisasi / Realization	%
01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis/ Management Support and Technical Implementation Program	698.213.457.000	667.403.550.423	95,59
08	Program Pemeriksaan Keuangan Negara/ State Financial Audit Program	2.901.230.314.000	2.771.681.112.661	95,53
Jumlah/ Total		3.599.443.771.000	3.439.084.663.084	95,54

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2020 mengalami penurunan sebesar Rp291.691.212.164 atau 7,82% dari realisasi belanja Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut:

Expenditure Realization for Fiscal Year 2020 decreased by Rp291,691,212,164 or 7.82% of the realization of expenditure for Fiscal Year 2019 with the following details:

Kode/ Code	Uraian/ Descriptions	Tahun Anggaran/ Fiscal Year		Kenaikan/(Penurunan)/ Increase/(Decrease)	
		2020	2019	Rp	%
51	Belanja Pegawai/ Employee Expenditure	1.961.586.733.636	1.981.552.016.470	(19.965.282.834)	(1,01)
52	Belanja Barang/ Goods Expenditure	1.213.615.416.985	1.551.898.330.200	(338.282.913.215)	(21,80)
53	Belanja Modal/ Capital Expenditure	263.882.512.463	197.325.528.578	66.556.983.885	33,73
Jumlah/ Total		3.439.084.663.084	3.730.775.875.248	(291.691.212.164)	(7,82)

Penurunan realisasi belanja Tahun Anggaran 2020 dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2019 antara lain disebabkan:

The decline in expenditure realization for Fiscal Year 2020 compared to expenditure realization for Fiscal Year 2019 is due to, among others:

1 Penurunan realisasi belanja pegawai disebabkan karena adanya penurunan realisasi atau tidak dibayarkannya pembayaran Tunjangan Jabatan Tertentu pegawai periode bulan 14 dan Tunjangan Kinerja Pegawai periode bulan 13 dan 14 sesuai dengan ketentuan Pemerintah.

1 The decrease in the realization of personnel expenditure was due to a decrease in the realization or non-payment of Employee Benefits for the 14th month period and the Employee Performance Allowance for the 13th and 14th months period in accordance with Government regulations.

8. ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA (LANJUTAN)

8. BUDGET AND REALIZATION OF EXPENDITURE (CONTINUED)

2 Penurunan realisasi belanja barang disebabkan pengaruh pandemi Covid-19 yang merubah pelaksanaan penyelesaian target keluaran melalui penugasan dari rumah (*work from home*) sehingga mengurangi tingkat penyerapan anggaran pada belanja barang seperti Langganan daya dan jasa listrik, telepon, dan air; perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri; rapat/pertemuan di luar kantor (paket *meeting*)/konsinyering yang melibatkan banyak peserta dan menggunakan jasa pihak ketiga.

2 The decrease in the realization of goods spending was due to the influence of the Covid-19 pandemic which changed the implementation of completion of output targets through assignments from home (*work from home*) thereby reducing the level of budget absorption on goods expenditures such as electricity, telephone and water subscriptions; domestic and foreign official travel; meetings / meetings outside the office (package meeting) / consigning which involves many participants and uses the services of a third party.

a. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp1.961.586.733.636 atau 97,25% dari anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp2.021.936.812.000. Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2020 ini mengalami penurunan sebesar Rp19.965.282.834 atau 1,01% dari realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.981.552.016.470.

Hal ini disebabkan antara lain oleh:

- Penurunan realisasi belanja gaji dan tunjangan pejabat negara karena tidak dibayarkannya pembayaran gaji dan tunjangan pejabat negara periode bulan 13 dan 14 sesuai dengan ketentuan Pemerintah;
- Penurunan realisasi belanja lembur karena pengaruh pandemi Covid-19 yang merubah pelaksanaan penyelesaian target keluaran melalui penugasan dari rumah (*work from home*) sehingga mengurangi tingkat penyerapan anggaran pada belanja lembur;
- Penurunan realisasi belanja tunjangan khusus dan belanja pegawai transito karena tidak dibayarkannya pembayaran Tunjangan Jabatan Tertentu pegawai periode bulan 14 dan Tunjangan Kinerja Pegawai periode bulan 13 dan 14 sesuai dengan ketentuan Pemerintah.

Rincian perbandingan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

a. Employee Expenditures

Realization of Employee Expenditures in the 2020 Fiscal Year amounted to Rp1,961,586,733,636 or 97.25% of the Employee Expenditure budget of Rp2,021,936,812,000. Realization of Employee Expenditures for Fiscal Year 2020 decreased by Rp19,965,282,834 or 1.01% of the realization of Personnel Expenditures for Fiscal Year 2019 amounting to Ra1.981.552.016.470.

This is due to, among others:

- Decrease in realization of expenditure on salaries and allowances for state officials due to non-payment of salaries and allowances for state officials for the 13th and 14th month periods in accordance with Government regulations;
- Decrease in the realization of overtime spending due to the influence of the Covid-19 pandemic which has changed the implementation of completion of output targets through assignments from home (*work from home*) thereby reducing the level of budget absorption in overtime spending;
- The decrease in the realization of special allowance expenditures and transfer personnel expenditures was due to the non-payment of the payment for Certain Employment Allowances for the 14th month period and the Employee Performance Allowance for the 13th and 14th month periods in accordance with Government regulations.

The details of the comparison of the realization of Employee Expenditures for Fiscal Year 2020 and Fiscal Year 2019 are as follows:

Kode Akun/ Code Account	Uraian/ Descriptions	Tahun Anggaran/ Fiscal Year		Kenaikan/(Penurunan)/ Increase/(Decrease)	
		2020	2019	Rp	%
5111	Belanja gaji & tunjangan PNS/ <i>Expenditures for salaries & allowances for civil servants</i>	411.110.929.100	396.561.893.751	14.549.035.349	3,67
5113	Belanja gaji & tunjangan pejabat negara/ <i>Expenditures for salaries & allowances for state officials</i>	1.956.279.540	3.561.357.259	(1.605.077.719)	(45,07)
5122	Belanja lembur/ <i>Overtime Expenditure</i>	6.958.658.000	8.250.852.200	(1.292.194.200)	(15,66)
5124	Belanja Tunj.Khusus & Belanja Pegawai Transito/ <i>Special Allowance Expenditures & Transito Employee Expenditures</i>	1.546.353.595.668	1.582.192.311.222	(35.838.715.554)	(2,27)
Realisasi Belanja Bruto/ <i>Realization of Gross Expenditures</i>		1.966.379.462.308	1.990.566.414.432	(24.186.952.124)	(1,22)
Pengembalian Belanja/ <i>Expenditure Returns</i>		4.792.728.672	9.014.397.962	(4.221.669.290)	(46,83)
Realisasi Belanja Neto/ <i>Realization of Netto Expenditures</i>		1.961.586.733.636	1.981.552.016.470	(19.965.282.834)	(1,01)

8. ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA (LANJUTAN)

8. BUDGET AND REALIZATION OF EXPENDITURE (CONTINUED)

a. Belanja Pegawai

Realisasi Pengembalian Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp4.792.728.672 terdiri dari:

- Pengembalian belanja gaji dan tunjangan PNS sebesar Rp1.256.638.583;
- Pengembalian belanja lembur sebesar Rp384.550;
- Pengembalian belanja tunjangan khusus dan belanja pegawai transito sebesar Rp3.535.705.539.

b. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp1.213.615.416.985 atau 93,70% dari anggaran Belanja Barang sebesar Rp1.300.598.499.000. Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2020 ini mengalami penurunan sebesar Rp338.282.913.215 atau 21,80% dari realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.551.898.330.200.

Rincian perbandingan realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

a. Employee Expenditures

Realization of Returns on Employee Expenditures for Fiscal Year 2020 amounted to Rp4,792,728,672, consisting of:

- Refunds on salary and allowances for civil servants amounting to Rp1,256,638,583;
- Returns for overtime expenditure of Rp384,550;
- Returns for special allowance expenditures and transito employee expenses amounting to Rp3,535,705,539.

b. Good Expenditure

Realization of Goods Expenditures in the 2020 Fiscal Year amounted to Rp1,213,615,416,985 or 93.70% of the Goods Expenditure budget of Rp1,300,598,499,000. The Realization of Expenditure for Fiscal Year 2020 decreased by Rp338,282,913,215 or 21.80% of the realization of Goods Expenditures for Fiscal Year 2019 amounting to Rp1,551,898,330,200.

The details of the comparison of the realization of goods spending for the 2020 fiscal year and 2019 fiscal year are as follows:

Kode Akun/ Code Account	Uraian/ Descriptions	Tahun Anggaran/ Fiscal Year		Kenaikan/(Penurunan)/ Increase/(Decrease)	
		2020	2019	Rp	%
5211	Belanja Barang Operasional/ Operational Goods Expenditure	241.962.847.987	235.201.320.274	6.761.527.713	2,87
5212	Belanja Barang Non Operasional/ Non-Operational Goods Expenditure	141.569.704.815	213.802.022.270	(72.232.317.455)	(33,78)
5218	Belanja Barang Persediaan/ Inventory Expenditure	34.649.931.882	38.875.301.402	(4.225.369.520)	(10,87)
5221	Belanja Jasa/ Service Expenditure	173.496.072.087	157.325.172.923	16.170.899.164	10,28
5231	Belanja Pemeliharaan/ Maintenance Expenditure	158.846.824.761	138.913.722.736	19.933.102.025	14,35
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri/ Domestic Travel Expenditures	456.153.438.580	714.216.967.922	(258.063.529.342)	(36,13)
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri/ Overseas Travel expenditure	11.991.549.441	60.332.562.204	(48.341.012.763)	(80,12)
Realisasi Belanja Bruto/ Realization of Gross Expenditures		1.218.670.369.553	1.558.667.069.731	(339.996.700.178)	(21,81)
Pengembalian Belanja/ Expenditure Returns		5.054.952.568	6.768.739.531	(1.713.786.963)	(25,32)
Realisasi Belanja Neto/ Realization of Netto Expenditures		1.213.615.416.985	1.551.898.330.200	(338.282.913.215)	(21,80)

Realisasi Pengembalian Belanja Barang Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp5.054.952.568 terdiri dari:

- Pengembalian Belanja Barang Operasional sebesar Rp638.101.260;
- Pengembalian Belanja Barang Non Operasional sebesar Rp17.571.120;
- Pengembalian Belanja Jasa sebesar Rp117.188.000;
- Pengembalian Belanja Pemeliharaan sebesar Rp30.000;
- Pengembalian Belanja Perjalanan Dalam Negeri sebesar Rp4.200.481.854;
- Pengembalian Belanja Perjalanan Luar Negeri sebesar Rp81.580.334

Pada Tahun 2020 BPK mengalokasikan belanja barang untuk penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp26.714.736.000 dengan realisasi sebesar Rp23.311.068.085 atau 87,26%, yang terdiri dari:

Realization of Returns on Goods Expenditures for Fiscal Year 2020 amounted to Rp5,054,952,568, consisting of:

- Return on Expenditures for Operational Goods, amounting to Rp638,101,260;
- Returns for Expenditures for Non-Operational Goods amounting to Rp17,571,120;
- Refund of Service Expenditures, amounting to Rp 117,188,000;
- Refund of Maintenance Expenditure, amounting to Rp30,000;
- Returns for Domestic Travel Expenses amounting to Rp4,200,481,854;
- Refund of Overseas Travel Expenses amounting to Rp81,580,334

In 2020, the BPK allocated goods expenditure for handling the COVID-19 pandemic amounting to Rp26,714,736,000 with a realization of Rp23,311,068,085 or 87.26%, consisting of:

8. ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA (LANJUTAN)

8. BUDGET AND REALIZATION OF EXPENDITURE (CONTINUED)

b. Belanja Barang (Lanjutan)

b. Good Expenditure (Continued)

Kode/ Code	Uraian/ Descriptions	Tahun Anggaran/ Fiscal Year 2020		
		Anggaran / Budget	Realisasi / Realization	%
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19/ Operational Goods Expenditure - Handling the COVID-19 Pandemic	6.851.419.000	6.287.238.169	91,77
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19/ Non-Operational Goods Expenditure - Handling the COVID-19 Pandemic	1.474.058.000	1.098.836.663	74,55
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19/ Inventory Expenditure - Handling the COVID-19 Pandemic	5.535.478.000	5.406.510.693	97,67
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19/ Service Expenditure - Handling the COVID-19 Pandemic	11.535.108.000	9.266.124.965	80,33
523114	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19/ Property and Building Maintenance Expenditure - Handling the COVID-19 Pandemic	430.673.000	387.907.595	90,07
524115	Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19/ Official Travel Expenditure - Handling the COVID-19 Pandemic	888.000.000	864.450.000	97,35
Jumlah/ Total		26.714.736.000	23.311.068.085	87,26

Realisasi Belanja Barang (52) Tahun Anggaran 2020 yang dikapitalisasi ke aset tetap adalah sebesar Rp8.000.211.975 dengan rincian sebagai berikut:

Realization of Goods Expenditures (52) for Fiscal Year 2020 which were capitalized into fixed assets amounting to Rp8,000,211,975 with the following details:

1	Kapitalisasi pada Peralatan dan Mesin	1.376.502.347	Capitalization of Equipment and Machinery
2	Kapitalisasi pada Gedung dan Bangunan	5.261.678.670	Capitalization of Properties and Buildings
3	Kapitalisasi pada Jalan dan Jembatan	128.730.800	Capitalization of Road and Bridges
4	Kapitalisasi pada Jaringan	99.426.800	Capitalization on the Network
5	Kapitalisasi pada Peralatan dan Mesin Ekstrakomptabel	1.075.127.858	Capitalization of Equipment and Machinery Extracomptable
6	Kapitalisasi pada Gedung dan Bangunan Ekstrakomptabel	58.745.500	Capitalization of Properties and Buildings Extracomptable
Jumlah		8.000.211.975	Total

c. Belanja Modal

c. Capital Expenditure

Realisasi Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp263.882.512.463 atau 95,30% dari anggaran Belanja Modal sebesar Rp276.908.460.000. Realisasi Belanja Modal TA 2019 ini mengalami kenaikan sebesar Rp66.556.983.885 atau 33,73% dari realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp197.325.528.578. Hal ini disebabkan oleh adanya penambahan anggaran dan realisasi belanja modal pada tahun 2020, yaitu:

Realization of Capital Expenditure in the 2020 Fiscal Year amounted to Rp263,882,512,463 or 95.30% of the Capital Expenditure budget of Rp276,908,460,000. Realization of Capital Expenditure for FY 2019 increased by Rp66,556,983,885 or 33.73% of the realization of Capital Expenditure for Fiscal Year 2019 amounting to Rp197,325,528,578. This is due to the additional budget and realization of capital expenditures in 2020, namely:

- Adanya penambahan anggaran belanja modal tanah yang direalisasikan pada tahun 2020 yang tahun sebelumnya tidak ada;
- Adanya penambahan anggaran belanja peralatan dan mesin yang direalisasikan pada tahun 2020 karena kebijakan refocusing atau penajaman kegiatan di BPK, efisiensi anggaran pemeriksaan dan penunjang pemeriksaan selama tahun 2020 digeser menjadi belanja modal untuk pengadaan laptop dan peralatan yang dibutuhkan pemeriksa saat melaksanakan tugas.
- Adanya penambahan anggaran belanja modal lainnya yang direalisasikan pada tahun 2020 karena kebijakan refocusing atau penajaman kegiatan di BPK untuk pengadaan aset tidak berwujud dalam rangka pembangunan laboratorium forensik.

- The additional land capital expenditure budget realized in 2020 which did not exist in the previous year;
- With the additional budget for equipment and machinery realized in 2020 due to the policy of refocusing or sharpening activities at the BPK, the efficiency of the audit and audit support budget during 2020 has been shifted to capital expenditure for the procurement of laptops and equipment needed by examiners when carrying out their duties.
- Another additional capital expenditure budget will be realized in 2020 due to the policy of refocusing or sharpening activities at the BPK for the procurement of intangible assets in the context of building a forensic laboratory.

8. ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA (LANJUTAN)

8. BUDGET AND REALIZATION OF EXPENDITURE (CONTINUED)

c. Belanja Modal (Lanjutan)

Rincian perbandingan realisasi Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

c. Capital Expenditure (Continued)

The details of the comparison of the realization of Capital Expenditures in the 2020 Fiscal Year and the 2019 Fiscal Year are as follows:

Kode Akun/ Code Account	Uraian/ Descriptions	Tahun Anggaran/ Fiscal Year		Kenaikan/(Penurunan)/ Increase/(Decrease)	
		2020	2019	Rp	%
5311	Belanja Modal Tanah/ Land Capital Expenditure	915.667.370	-	915.667.370	-
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin/ Capital Expenditures for Equipment and Machinery	206.732.666.653	112.551.619.954	94.181.046.699	83,68
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan/ Properties and Building Capital Expenditures	39.509.375.133	79.282.372.914	(39.772.997.781)	(50,17)
5361	Belanja Modal Lainnya/ Other Capital Expenditures	16.724.803.307	5.491.535.710	11.233.267.597	204,56
Realisasi Belanja Bruto/ Realization of Gross Expenditures		263.882.512.463	197.325.528.578	66.556.983.885	33,73
Pengembalian Belanja/ Expenditure Returns		-	-	-	-
Realisasi Belanja Neto/ Realization of Netto Expenditures		263.882.512.463	197.325.528.578	66.556.983.885	33,73

1) Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp915.667.370 atau 99,04% dari anggaran Belanja Modal Tanah sebesar Rp924.589.000. Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2020 ini mengalami kenaikan sebesar Rp915.667.370 dari realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp0. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan anggaran dan realisasi belanja modal tanah untuk pengurukan dan pematangan tanah pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan. Rincian perbandingan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

1) Land Capital Expenditure

Realization of Land Capital Expenditure in the 2020 Fiscal Year amounted to Rp915,667,370 or 99.04% of the Land Capital Expenditure budget of Rp924,589,000. Realization of Land Capital Expenditure for Fiscal Year 2020 has increased by Rp915,667,370 from the realization of Land Capital Expenditure for Fiscal Year 2019 of Rp0. This is due to an increase in the budget and the realization of land capital expenditures for land filling and land clearing at the BPK Representative of South Kalimantan Province. Details of the comparison of the realization of Capital Expenditures for Equipment and Machinery for Fiscal Year 2020 and Fiscal Year 2019 are as follows:

Uraian/ Descriptions	Tahun Anggaran/ Fiscal Year		Kenaikan/(Penurunan)/ Increase/(Decrease)	
	2020	2019	Rp	%
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah/ Capital Expenditures for Backfill and Land Development	915.667.370	-	915.667.370	-
Realisasi Belanja Bruto/ Realization of Gross Expenditures	915.667.370	-	915.667.370	-
Pengembalian Belanja/ Expenditure Returns	-	-	-	-
Realisasi Belanja Neto/ Realization of Netto Expenditures	915.667.370	-	915.667.370	-

Realisasi Belanja Modal Tanah pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp915.667.370 dikapitalisasi pada aset-aset sebagai berikut:

Realization of Land Capital Expenditure in the 2020 Fiscal Year amounting to Rp915,667,370 capitalized in the following assets:

1 Kapitalisasi pada Tanah	915.667.370	Capitalization of Land
2 Kapitalisasi pada Peralatan dan Mesin	-	Capitalization of Equipment and Machinery
3 Kapitalisasi pada Gedung dan Bangunan	-	Capitalization of Properties and Buildings
4 Kapitalisasi pada Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	Capitalization of Road, Bridges and Network
5 Kapitalisasi pada KDP	-	Capitalization Work In Progress
Jumlah	915.667.370	Total

8. ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA (LANJUTAN)

8. BUDGET AND REALIZATION OF EXPENDITURE (CONTINUED)

c. Belanja Modal (Lanjutan)

c. Capital Expenditure (Continued)

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

2) Capital Expenditures for Equipment and Machinery

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp206.732.666.653 atau 96,76% dari anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp213.648.132.000. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2020 ini mengalami kenaikan sebesar 94.141.046.699 atau 83,68% dari realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp112.551.619.954. Hal ini disebabkan oleh bertambahnya anggaran dan realisasi belanja modal peralatan dan mesin untuk tahun 2020 karena kebijakan *refocusing* kegiatan di BPK.

Realization of Capital Expenditures for Equipment and Machinery in the 2020 Fiscal Year amounted to Rp206,732,666,653 or 96.76% of the Equipment and Machinery Capital Expenditure budget of Rp213,648,132,000. Realization of Capital Expenditure for Equipment and Machinery for Fiscal Year 2020 has increased by 94,141,046,699 or 83.68% of the realization of Capital Expenditure for Equipment and Machinery for Fiscal Year 2019 amounting to Rp112,551,619,954. This is due to an increase in the budget and realization of capital expenditure for equipment and machinery for 2020 due to the policy of *refocusing* activities at the BPK.

Rincian perbandingan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

Details of the comparison of the realization of Capital Expenditures for Equipment and Machinery for Fiscal Year 2020 and Fiscal Year 2019 are as follows:

Uraian/ Descriptions	Tahun Anggaran/ Fiscal Year		Kenaikan/(Penurunan)/ Increase/(Decrease)	
	2020	2019	Rp	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin/ <i>Capital Expenditures for Equipment and Machinery</i>	201.085.546.055	108.973.406.354	92.112.139.701	84,53
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID-19/ <i>Capital Expenditures for Equipment and Machinery- Handling the COVID-19 Pandemic</i>	454.198.050	-	454.198.050	-
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin/ <i>Value Added Expenditure for Equipment and Machinery</i>	5.192.922.548	3.578.213.600	1.614.708.948	45,13
Realisasi Belanja Bruto/ <i>Realization of Gross Expenditures</i>	206.732.666.653	112.551.619.954	94.181.046.699	83,68
Pengembalian Belanja/ <i>Expenditure Returns</i>	-	-	-	-
Realisasi Belanja Neto/ <i>Realization of Netto Expenditures</i>	206.732.666.653	112.551.619.954	94.181.046.699	83,68

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp206.732.666.653 dikapitalisasi pada aset-aset sebagai berikut:

Realization of Capital Expenditures for Equipment and Machinery in the 2020 Fiscal Year amounting to Rp206,732,666,653 were capitalized in the following assets:

1 Kapitalisasi pada Peralatan dan Mesin	197.720.536.780	<i>Capitalization of Equipment and Machinery</i>
2 Kapitalisasi pada Gedung dan Bangunan	-	<i>Capitalization of Properties and Buildings</i>
3 Kapitalisasi pada Jaringan	1.786.867.000	<i>Capitalization on the Network</i>
4 Kapitalisasi pada Aset Tetap Lainnya	51.092.272	<i>Capitalization of Other Fixed Assets</i>
5 Kapitalisasi pada Aset Renovasi	76.648.000	<i>Capitalization of Renovation Assets</i>
6 Kapitalisasi pada Software	1.000.000.000	<i>Capitalization of Software</i>
7 Kapitalisasi pada Lisensi	875.765.000	<i>Capitalization of Licence</i>
8 Kapitalisasi pada Peralatan dan Mesin Ekstrakomptabel	360.591.221	<i>Capitalization of Equipment and Machinery Extracomptable</i>
9 Kapitalisasi pada Gedung dan Bangunan Ekstrakomptabel	30.250.000	<i>Capitalization of Properties and Buildings Extracomptable</i>
10 Tidak dikapitalisasi (Pemeliharaan)	2.778.780	<i>Uncapitalized (Maintenance)</i>
11 Tidak dikapitalisasi	4.828.137.600	<i>Uncapitalized</i>
Jumlah	206.732.666.653	Total

8. ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA (LANJUTAN)

8. BUDGET AND REALIZATION OF EXPENDITURE (CONTINUED)

c. Belanja Modal (Lanjutan)

c. Capital Expenditure (Continued)

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

3) Properties and Building Capital Expenditures

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp39.509.375.133 atau 89,07% dari anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp44.358.562.000. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2020 ini mengalami penurunan sebesar Rp39.772.997.781 atau 50,17% dari realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp79.282.372.914. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya anggaran belanja modal gedung dan bangunan karena tidak adanya alokasi anggaran untuk pembangunan fisik atas Gedung dan Bangunan pada tahun 2020.

Realization of Properties and Buildings Capital Expenditures in the 2020 Fiscal Year amounted to Rp39,509,375,133 or 89.07% of the Properties and Buildings Capital Expenditure budget of Rp44,358,562,000. Realization of Capital Expenditures for Properties and Buildings for the 2020 Fiscal Year decreased by Rp39,772,997,781 or 50.17% of the realization of Capital Expenditures for Properties and Buildings for Fiscal Year 2019 amounting to Rp79,282,372,914. This is due to a reduction in the capital expenditure budget for Properties and Buildings due to the absence of a budget allocation for physical construction of buildings and structures in 2020.

Rincian perbandingan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

The details of the comparison of the realization of Properties and Buildings Capital Expenditures for Fiscal Year 2020 and Fiscal Year 2019 are as follows:

Uraian/ Descriptions	Tahun Anggaran/ Fiscal Year		Kenaikan/(Penurunan)/ Increase/(Decrease)	
	2020	2019	Rp	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan/ Property and Building Capital Expenditures	1.466.435.900	47.589.627.065	(46.123.191.165)	(96,92)
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis/ Capital Expenditures for Labor Wages and Fees for Technical Managers	-	3.590.000	(3.590.000)	(100,00)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19/ Property and Building Capital Expenditure - Handling the COVID-19 Pandemic	22.495.000	-	22.495.000	-
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan/ Value Added Expenditures for properties and Buildings	38.020.444.233	31.689.155.849	6.331.288.384	19,98
Realisasi Belanja Bruto/ Realization of Gross Expenditures	39.509.375.133	79.282.372.914	(39.772.997.781)	(50,17)
Pengembalian Belanja/ Expenditure Returns	-	-	-	-
Realisasi Belanja Neto/ Realization of Netto Expenditures	39.509.375.133	79.282.372.914	(39.772.997.781)	(50,17)

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp39.509.375.133 dikapitalisasi pada aset sebagai berikut:

Realization of Properties and Buildings Capital Expenditures in the 2020 Fiscal Year amounting to Rp39,509,375,133 were capitalized in assets as follows:

1 Kapitalisasi pada Tanah	2.271.744.600	Capitalization of Land
2 Kapitalisasi pada Peralatan dan Mesin	1.051.545.511	Capitalization of Equipment and Machinery
3 Kapitalisasi pada Gedung dan Bangunan	30.847.105.522	Capitalization of Properties and Buildings
4 Kapitalisasi pada Jalan dan Jembatan	430.772.700	Capitalization of Road and Bridges
5 Kapitalisasi pada Irigasi	1.034.689.000	Capitalization of Irrigation
6 Kapitalisasi pada Jaringan	72.112.500	Capitalization on the Network
7 Kapitalisasi pada Aset Tetap Renovasi	86.449.000	Capitalization of Renovation Assets
8 Kapitalisasi pada Aset Tetap Lainnya	-	Capitalization of Other Fixed Assets
9 Kapitalisasi pada KDP	3.430.059.000	Capitalization of Work In Progress
10 Kapitalisasi pada Peralatan dan Mesin Ekstrakomptabel	16.740.350	Capitalization of Equipment and Machinery Extracomptable
11 Kapitalisasi pada Gedung dan Bangunan Ekstrakomptabel	225.471.950	Capitalization of Properties and Buildings Extracomptable
12 Tidak dikapitalisasi (Pemeliharaan)	42.685.000	Uncapitalized (Maintenance)
Jumlah	39.509.375.133	Total

8. ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA (LANJUTAN)

8. BUDGET AND REALIZATION OF EXPENDITURE (CONTINUED)

c. Belanja Modal (Lanjutan)

c. Capital Expenditure (Continued)

4) Belanja Modal Lainnya

4) Other Capital Expenditure

Realisasi Belanja Modal Lainnya pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp16.724.803.307 atau 93,03% dari anggaran Belanja Modal Lainnya sebesar Rp17.977.177.000. Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahun Anggaran 2020 ini mengalami kenaikan sebesar Rp11.233.267.597 atau 204,56% dari realisasi Belanja Modal Lainnya Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp5.491.535.710. Hal ini disebabkan adanya penambahan anggaran belanja modal lainnya karena adanya kebijakan refocusing kegiatan di BPK dan direalisasikan berupa Aset Tetap Tak Berwujud untuk menunjang pemeriksaan keuangan negara.

Realization of Other Capital Expenditures in the 2020 Fiscal Year amounted to Rp16,724,803,307 or 93.03% of the Other Capital Expenditure budget of Rp17,977,177,000. Realization of Other Capital Expenditures for Fiscal Year 2020 experienced an increase of Rp 11,233,267,597 or 204.56% of the realization of Other Capital Expenditures for Fiscal Year 2019 amounting to Rp 5,491,535,710. This is due to the addition of other capital expenditure budgets due to the policy of refocusing activities at BPK and the realization of Intangible Fixed Assets to support audits of state finances.

Rincian perbandingan realisasi Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

The details of the comparison of the realization of the 2020 Fiscal Year and the 2019 Fiscal Year are as follows:

Uraian/ Descriptions	Tahun Anggaran/ Fiscal Year		Kenaikan/(Penurunan)/ Increase/(Decrease)	
	2020	2019	Rp	%
Belanja Modal Lainnya/ Other Capital Expenditure	7.672.835.712	2.116.358.192	5.556.477.520	262,55
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya/ Value Added Expenditures for Other Fixed Assets / Other Assets	9.051.967.595	3.375.177.518	5.676.790.077	168,19
Realisasi Belanja Bruto/ Realization of Gross Expenditures	16.724.803.307	5.491.435.710	11.233.367.597	204,56
Pengembalian Belanja/ Expenditure Returns	-	-	-	-
Realisasi Belanja Neto/ Realization of Netto Expenditures	16.724.803.307	5.491.435.710	11.233.367.597	204,56

Realisasi Belanja Modal Lainnya pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp16.724.803.307 dikapitalisasi pada aset-aset sebagai berikut:

Realization of Other Capital Expenditures in the 2020 Fiscal Year amounting to Rp16,724,803,307 were capitalized in the following assets:

1 Kapitalisasi pada Peralatan dan Mesin	45.896.000	Capitalization of Equipment and Machinery
2 Kapitalisasi pada Aset Tetap Lainnya	406.457.574	Capitalization of Other Fixed Assets
3 Kapitalisasi pada Software	5.044.942.497	Capitalization of Software
4 Kapitalisasi pada Lisensi	11.138.444.196	Capitalization of Licence
5 Kapitalisasi pada ATB Lainnya	89.063.040	Capitalization of Other Intigible Asset
Jumlah	16.724.803.307	Total

Pada Tahun 2020 BPK mengalokasikan belanja modal untuk penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp486.079.000 dengan realisasi sebesar Rp476.693.050 atau 98,07% berupa peralatan untuk menunjang penanganan pandemi COVID-19.

In 2020, the BPK allocated capital expenditure for handling the COVID-19 pandemic amounting to Rp486,079,000 with the realization of Rp476,693,050 or 98.07% in the form of equipment to support the handling of the COVID-19 pandemic.

Kode/ Code	Uraian/ Descriptions	Tahun Anggaran/ Fiscal Year 2020		
		Anggaran / Budget	Realisasi / Realization	%
532119	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID-19/ Capital Expenditures for Equipment and Machinery - Handling the COVID-19 Pandemic	463.579.000	454.198.050	97,98
533119	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19/ Properties and Buildings Capital Expenditure - Handling the COVID-19 Pandemic	22.500.000	22.495.000	99,98
Jumlah/ Total		486.079.000	476.693.050	98,07

9. KAS LAINNYA DAN SETARA KAS

9. OTHER CASH AND CASH EQUIVALENT

	31 Desember/December 31		
	2020	2019	
Pendapatan yang Belum Disetor ke Kas Negara	1.252.475.130	5.864.902.611	Unpaid Revenue to State Treasury
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	109.697.000	32.337.150	Account Payable to Other Related Parties
Utang Jangka Pendek Lainnya	-	1.979.850	Other Short-Term Payables
Jumlah	1.362.172.130	5.899.219.611	Total

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp1.362.172.130 dan Rp5.899.219.611 terjadi penurunan sebesar Rp4.537.047.481 atau 76,91%.

Other Cash and Cash Equivalents as of December 31, 2020 and 2019 each of them amounting to Rp1,362,172,130 and Rp5,899,219,611 decreased by Rp4,537,047,481 or 76,91%.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai.

Other Cash and Cash Equivalents are cash which are under the responsibility of the expenditure treasurer that are not derived from the UP/TUP, whether bank account balances or cash.

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas yang telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara dan telah dibayarkan kepada pihak ketiga lainnya adalah sebagai berikut:

Other Cash Balances and Cash Equivalents that have been deposited into the State Treasury and have been paid to other third parties are as follows:

- a. Penyetoran Pendapatan yang sudah disetor atas saldo per 31 Desember 2019 ke Kas Negara sampai dengan 31 Desember 2020

- a. Deposit of Income that has been deposited on the balance as of December 31, 2019 to the State Treasury until December 31, 2020

Kode Code	Uraian Eselon I/ Echelon I Description	Saldo Kas/ Cash balance	Koreksi/ Correction	Penyetoran ke Kas Negara/ Deposit to the State Treasury	Sisa Kas yang belum disetor/ The remaining unpaid cash
01	Badan Pemeriksa Keuangan/ Audit Board of the Republic of Indonesia	5.864.902.611	(870.922.274)	4.660.087.197	333.893.140
	Jumlah	5.864.902.611	(870.922.274)	4.660.087.197	333.893.140

Sisa kas yang belum disetor ke Kas Negara setelah tanggal neraca sebesar Rp333.893.140 berasal dari satuan kerja sebagai berikut:

The remaining cash that has not been paid up to the State Treasury after the balance sheet date amounting to Rp333,893,140 comes from the following work units:

- 1) Sekretariat Jenderal BPK sebesar Rp159.711.140 terdiri dari:

- 1) The Secretariat General of the BPK, amounting to Rp159,711,140 consists of:

- Kelebihan TKPK Tahun 2017 yang belum disetor ke Kas Negara sebesar Rp8.600.000;
- Kelebihan TKPK Tahun 2018 yang belum disetor ke Kas Negara sebesar Rp1.550.000;
- Kelebihan TPT Tahun 2018 yang belum disetor ke Kas Negara sebesar Rp59.900.000;
- Kelebihan TPT Tahun 2019 yang belum disetor ke Kas Negara sebesar Rp77.676.000;
- Kelebihan Honor Tahun 2019 yang belum disetor ke Kas Negara sebesar Rp4.378.640;
- Kelebihan Gaji Tahun 2019 yang belum disetor ke Kas Negara sebesar Rp7.606.500.

- The 2017 TKPK excess that has not been paid to the State Treasury is Rp8,600,000;
- The 2018 TKPK excess that has not been deposited into the State Treasury is Rp1,550,000;
- The excess of TPT in 2018 that has not been deposited into the State Treasury is Rp59,900,000;
- The excess of TPT in 2019 that has not been deposited into the State Treasury is Rp77,676,000;
- Excess Honor 2019 that has not been paid to the State Treasury amounting to Rp4,378,640;
- The excess of 2019 salaries that have not been paid to the State Treasury is Rp7,606,500.

- 2) BPK Pusat sebesar Rp174.182.000 terdiri dari:

- 2) Central BPK, amounting to Rp174,182,000, consisting of:

- Kelebihan TPT Tahun 2018 yang belum disetor ke Kas Negara sebesar Rp166.732.000;
- Kelebihan TKPK Tahun 2018 yang belum disetor ke Kas Negara sebesar Rp1.550.000;
- Kelebihan Gaji Tahun 2019 yang belum disetor ke Kas Negara sebesar Rp5.900.000.

- The excess of TPT in 2018 that has not been deposited into the State Treasury is Rp166,732,000;
- The excess TKPK in 2018 that has not been deposited into the State Treasury is Rp1,550,000;
- The excess of 2019 Salary that has not been paid to the State Treasury is Rp5,900,000.

9. KAS LAINNYA DAN SETARA KAS (LANJUTAN)

9. OTHER CASH AND CASH EQUIVALENT (CONTINUED)

b. Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya atas saldo per 31 Desember 2019 kepada Pihak Ketiga Lainnya sampai dengan 31 Desember 2020:

b. *Payment of Debt to Other Third Parties on balances as of December 31, 2019 to Other Third Parties up to December 31, 2020:*

Kode <i>Code</i>	Uraian Eselon I/ <i>Echelon I Description</i>	Saldo Kas/ <i>Cash balance</i>	Koreksi/ <i>Correction</i>	Pembayaran ke Pihak Lainnya/ <i>Payment to Other Parties</i>	Sisa Kas yang belum disetor/ <i>The remaining unpaid cash</i>
01	Badan Pemeriksa Keuangan/ <i>Audit Board of the Republic of Indonesia</i>	32.337.150	-	32.337.150	-
	Jumlah	32.337.150	-	32.337.150	-

c. Penyetoran Utang Jangka Pendek Lainnya atas saldo 31 Desember 2019 ke Kas Negara sampai dengan 31 Desember 2020:

c. *Deposit of Other Short-Term Debt on the balance on December 31, 2019 to the State Treasury until December 31, 2020:*

Kode <i>Code</i>	Uraian Eselon I/ <i>Echelon I Description</i>	Saldo Kas/ <i>Cash balance</i>	Penyetoran ke Kas Negara/ <i>Deposit to the State Treasury</i>	Sisa Kas yang belum disetor/ <i>The remaining unpaid cash</i>
01	Badan Pemeriksa Keuangan/ <i>Audit Board of the Republic of Indonesia</i>	1.979.850	1.979.850	-
	Jumlah	1.979.850	1.979.850	-

10. BELANJA DIBAYAR DI MUKA

10. PREPAID EXPENSES

	31 Desember/December 31 2020	2019
Belanja Barang Dibayar Dimuka	169.600.126	365.650.226
Belanja Modal Dibayar Dimuka	-	-
Jumlah	169.600.126	365.650.226

Prepaid Goods Expenditure
Prepaid Capital Expenditure
Total

Saldo Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp169.600.126 dan Rp365.650.226, terjadi penurunan sebesar Rp196.050.100 atau 53,62%.

The balance of Prepaid Expenditures as of December 31, 2020 and December 31, 2019 amounted to Rp169,600,126 and Rp365,650,226, respectively, a decrease of Rp196,050,100 or 53.62%.

Belanja Dibayar di muka berasal dari realisasi belanja tahun pelaporan, namun barang/jasa/fasilitas dari pihak ketiga belum seluruhnya diterima/ dinikmati oleh satuan kerja.

Prepaid expenditures originate from the actual expenditure for the reporting year, however, the goods / services / facilities from third parties have not been fully received / enjoyed by the work unit.

a. Belanja Barang Dibayar di Muka
Saldo Belanja Barang Dibayar di Muka per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp169.600.126,00 dan Rp365.650.226,00 terjadi penurunan sebesar Rp196.050.100,00 atau 53,62%.
Rincian penambahan dan pengurangan Belanja Barang Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

a. *Prepaid Goods Expenses*
The balance of Prepaid Goods Expenditures as of December 31, 2020 and December 31, 2019 amounted to Rp169,600,126.00 and Rp365,650,226.00, respectively, there was a decrease of Rp196,050,100.00 or 53.62%.
The details for the addition and reduction of Prepaid Goods Expenditures are as follows:

Jenis Transaksi	Nilai	Type of Transaction
Saldo per 31 Desember 2019	365.650.226	Balance as of December 31, 2019
Mutasi Tambah:		Mutations Add:
Nilai sewa rumah dinas yang belum digunakan pada Satker BPK Perwakilan Kaltara Per 31 Desember 2020	168.438.117	Rental value for official homes that have not been used by the BPK Representative Office for Kaltara as of December 31, 2020
Nilai sewa Frekuensi Handy Talky yang belum digunakan pada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2020	1.162.009	Rental value for Handy Talky Frequency that has not been used by BPK Representative of Riau Islands Province as of December 31, 2020
Total Mutasi Tambah	169.600.126	Total Mutations Add
Mutasi Kurang:		Less Mutations:
Jurnal balik per 2 Januari 2020 atas saldo Belanja Dibayar di muka per 31 Desember 2019	365.650.226	Reverse entry as of January 2, 2020 on the balance of Prepaid expenditure as of December 31, 2019
Total Mutasi Kurang	365.650.226	Total Less Mutations
Total Mutasi	(196.050.100)	Total Mutations
Saldo per 31 Desember 2020	169.600.126	Balance as of December 31, 2020

10. BELANJA DIBAYAR DI MUKA (LANJUTAN)

10. PREPAID EXPENSES (CONTINUED)

Mutasi tambah sebesar Rp169.600.126 berasal dari:

1. Nilai sewa rumah dinas yang belum digunakan pada satker BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara per 31 Desember 2020 sebesar Rp168.438.117
2. Nilai sewa Frekuensi Handy Talky yang belum digunakan pada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.162.009.

Additional movements of Rp 169,600,126 came from:

1. *The rental value for official housing that has not been used by the BPK Representative Office of North Kalimantan Province as of 31 December 2020 is Rp168,438,117*
2. *The rental value for Handy Talky Frequency that has not been used at the BPK Representative of Riau Islands Province as of 31 December 2019 is Rp1,162,009.*

Mutasi kurang sebesar Rp365.650.226 berasal dari:

1. Jurnal balik per 2 Januari 2010 atas nilai sewa rumah dinas yang belum digunakan pada satker BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara per 31 Desember 2019 sebesar Rp364.488.217.
2. Jurnal balik per 2 Januari 2010 atas Nilai sewa Frekuensi Handy Talky yang belum digunakan pada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.162.009.

Movements of less than Rp365,650,226 originate from:

1. *A reverse journal as of January 2, 2010, of the unused rental value of official housing at the BPK Representative Office of North Kalimantan Province as of December 31, 2019, amounting to Rp364,488,217.*
2. *Reverse journal as of January 2, 2010 on Handy Talky Frequency rental value that has not been used at the BPK Representative of Riau Islands Province as of December 31, 2019, amounting to Rp1,162,009.*

11. PIUTANG BUKAN PAJAK

11. NON TAX RECEIVABLE

	31 Desember/December 31 2020	2019	
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	56.263.242	5.400.000	<i>Non Tax Receivable</i>
Piutang Lainnya	5.542.068.478	912.262.114	<i>Other Receivable</i>
Jumlah	5.598.331.720	917.662.114	Total

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp5.598.331.720 dan Rp917.662.114 terjadi kenaikan sebesar Rp4.680.669.606 atau 510,06%.

The balance of Non-Tax Receivables as of December 31, 2020 and December 31, 2019 amounted to Rp5,598,331,720 and Rp917,662,114, respectively, an increase of Rp4,680,669,606 or 510.06%.

Piutang bukan pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Non-tax receivables are receivables originating from non-tax state revenues that have not been paid until the end of the financial reporting period.

a. Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

a. Non-Tax State Revenue Receivables (PNBP)

Saldo Piutang PNBP per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp56.263.242 dan Rp5.400.000 terjadi kenaikan sebesar Rp50.863.242 atau 941,91%.

The balance of PNBP Receivables as of 31 December 2020 and 31 December 2019 amounted to Rp56,263,242 and Rp5,400,000, respectively, an increase of Rp50,863,242 or 941.91%.

Piutang PNBP adalah pendapatan PNBP tahun berjalan yang seharusnya sudah dibayarkan oleh wajib bayar dan telah timbul hak tagihnya oleh pemerintah (telah jatuh tempo) namun belum diterima pembayarannya.

PNBP receivables are PNBP revenues for the current year that should have been paid by the payer and the government has received the right to collect (due) but the payment has not been received.

Rincian penambahan dan pengurangan nilai Piutang PNBP adalah sebagai berikut:

The details for adding and reducing the value of PNBP Receivables are as follows:

Jenis Transaksi	Nilai/ Value	Type of Transaction
Saldo per 31 Desember 2019	5.400.000	Balance as of December 31, 2019
Mutasi Tambah :		Mutations Add:
Sewa Mess & Sewa Rumah Dinas	4.585.242	<i>Rent Mess & Office House Rentals</i>
Pelaksanaan Pekerjaan Belum Selesai 100%	-	<i>Work Execution Unfinished 100%</i>
Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	51.678.000	<i>Rent Land, Properties and Buildings</i>
Koreksi Jurnal	2.067.120	<i>Journal Correction</i>
Total Mutasi Tambah	58.330.362	Total Mutations Add
Mutasi Kurang :		Less Mutations:
Pelunasan s.d 31 Desember 2020	5.400.000	<i>Repayment until December 31, 2020</i>
Koreksi Jurnal	2.067.120	<i>Journal Correction</i>
Total Mutasi Kurang	7.467.120	Total Mutations Less
Total Mutasi	50.863.242	Total Mutations
Saldo per 31 Desember 2020	56.263.242	Balance as of December 31, 2020

11. PIUTANG BUKAN PAJAK (LANJUTAN)

11. NON TAX RECEIVABLE (CONTINUED)

a. Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) (Lanjutan)

Mutasi tambah sebesar Rp58.330.362 berasal dari:

- a. Sewa rumah dinas yang belum disetor Rp4.585.242 pada BPK Perwakilan Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Gorontalo.
- b. Sewa Tanah Gedung dan Bangunan berupa sewa penempatan Mesin ATM yang belum disetor pada BPK Perwakilan Papua Rp51.678.000.
- c. Koreksi Jurnal sebesar Rp2.067.120 pada BPK Perwakilan Papua.

Mutasi kurang sebesar Rp7.467.120 berasal dari:

- a. Pelunasan dan penyetoran ke kas negara atas sewa kantin sebesar Rp5.400.000 pada BPK Perwakilan Jawa Timur.
- b. Koreksi Jurnal sebesar Rp2.067.120 pada BPK Perwakilan Papua.

b. Piutang lainnya

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp5.542.068.478 dan Rp912.262.114 terjadi kenaikan sebesar Rp4.629.806.364 atau 507,51%

Piutang Lainnya berasal dari piutang yang berasal dari selain Piutang PNBP, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, dan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi. Piutang lainnya berasal dari kelebihan belanja perjalanan dinas yang telah dipertanggungjawabkan rampung jumlahnya, namun pada tanggal neraca masih belum diselesaikan oleh pelaksana perjalanan dinas serta kelebihan pembayaran gaji/TKPK kepada pegawai.

Rincian penambahan dan pengurangan nilai Piutang Lainnya adalah sebagai berikut:

a. Non-Tax State Revenue Receivables (PNBP) (Continued)

Mutations added of Rp 58,330,362 came from:

- a. Rental of official houses that have not been paid up is Rp4,585,242 at the BPK Representatives of Central Java, DI Yogyakarta and Gorontalo.
- b. Rental of Land for Properties and Buildings in the form of lease for placement of ATM Machines that have not been paid up to the BPK Representative of Papua Rp51,678,000.
- c. Journal corrections amounting to Rp2,067,120 at BPK Representative of Papua.

Mutations less than Rp7,467,120 originating from:

- a. Repayment and deposit to the state treasury for the canteen rental amounting to Rp5,400,000 to the BPK Representative of East Java.
- b. Journal corrections amounting to Rp2,067,120 at BPK Representative of Papua.

b. Other Receivable

The balance of Other Receivables as at 31 December 2020 and 31 December 2019 amounted to Rp5,542,068,478 and Rp912,262,114, respectively, there was an increase of Rp4,629,806,364 or 507.51%

Other Receivables come from receivables originating from other than PNBP Receivables, Current Portion of Installment Sales Receivables, and Current Portion of Indemnity Claims. Other receivables come from excess official travel expenditures which have been accounted for for completion, but on the balance sheet date it has not been completed by the official travel operator as well as excess salary / TKPK payments to employees.

The details for adding and reducing the value of Other Receivables are as follows:

Jenis Transaksi	Nilai/ Value	Type of Transaction
Saldo per 31 Desember 2019	912.262.114	Balance as of December 31, 2019
Mutasi Tambah :		Mutations Add:
Kelebihan pembayaran belanja Pegawai	273.054.922	Excess employee expenditure payments
Kelebihan pembayaran belanja barang	222.489.895	Excess payment for goods purchases
Koreksi Lainnya	4.681.750	Other Corrections
Kelebihan pengembalian belanja modal peralatan dan mesin	4.828.137.600	Excess returns on equipment and machinery capital expenditures
Total Mutasi Tambah	5.328.364.167	Total Mutations Add
Mutasi Kurang :		Mutations Less:
Pelunasan atas saldo s.d 31 Desember 2020	698.557.803	Repayment of balance until December 31, 2020
Total Mutasi Kurang	698.557.803	Total Mutations Less
Total Mutasi	4.629.806.364	Total Mutations
Saldo per 31 Desember 2020	5.542.068.478	Balance as of December 31, 2020

Mutasi tambah sebesar Rp5.328.364.167 berasal dari:

1. Kelebihan pembayaran belanja pegawai yang belum disetor ke kas negara per 31 Desember 2020 sebesar Rp273.054.922, yaitu:
 - a. TPT sebesar Rp221.935.850 pada Satuan Kerja Sekretariat Jenderal dan BPK Pusat
 - b. Uang makan sebesar Rp30.352.650 pada satuan kerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat dan Lampung
 - c. Gaji Pokok dan Tunjangan Lainnya sebesar Rp20.766.422 pada satuan kerja BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta

Mutations added of Rp5,328,364,167 came from:

1. The overpayment of employee expenditure that has not been deposited into the state treasury as of December 31, 2020 is Rp273,054,922, namely:
 - a. TPT, amounting to Rp221,935,850 at the Secretariat General Work Unit and the Central BPK
 - b. Food allowance of Rp30,352,650 at the BPK Representative Office for the Provinces of East Kalimantan, West Kalimantan, West Sulawesi and Lampung
 - c. Basic Salary and Other Benefits of Rp20,766,422 at the BPK Representative Office for the DKI Jakarta Province

11. PIUTANG BUKAN PAJAK (LANJUTAN)

11. NON TAX RECEIVABLE (CONTINUED)

b. Piutang lainnya (Lanjutan)

2. Kelebihan pembayaran belanja barang yang belum disetor ke kas negara per 31 Desember 2020 sebesar Rp222.489.895, yaitu:
 - a. Perjalanan dinas sebesar Rp201.376.895 pada Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera, Papua Barat, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur, Maluku dan NTT.
 - b. Pembayaran Jasa Lainnya sebesar Rp15.420.000 pada Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat
 - c. Pembayaran Belanja Barang Operasional sebesar Rp1.661.000 pada Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dan Jawa barat
 - d. Pembayaran Honorarium PPNPN sebesar Rp4.032.000 pada Satuan Kerja BPK Pusat.
3. Koreksi Lainnya sebesar Rp4.681.750 pada Satuan Kerja BPK Perwakilan DKI Jakarta dan Jawa Barat.
4. Kelebihan belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp4.828.137.600 pada Badiklat PKN

Mutasi kurang sebesar Rp698.557.803 berasal dari:

1. Pelunasan atas kelebihan pembayaran belanja pegawai per 31 Desember 2019 sebesar Rp181.542.828 yaitu:
 - a. Uang makan sebesar Rp53.194.250 pada satuan kerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku dan Lampung.
 - b. Gaji pokok dan tunjangan lainnya sebesar Rp18.251.578 pada satuan kerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Aceh, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat.
 - c. TPT sebesar Rp103.113.000 pada satuan kerja Sekretariat Jenderal dan BPK Pusat.
 - d. Tunjangan Struktural sebesar Rp6.804.000 pada satuan kerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dan Riau.
 - e. Tunjangan Umum PNS sebesar Rp180.000 pada satuan kerja BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pelunasan atas kelebihan belanja barang per 31 Desember 2019 sebesar Rp517.014.975 yaitu:
 - a. Perjalanan Dinas per 31 Desember 2019 sebesar Rp511.235.841 pada satuan kerja Sekretariat Jenderal, BPK Pusat, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, Papua Barat, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur dan Lampung.
 - b. Kelebihan Pembayaran Honor Operasional sebesar Rp570.000 pada satuan kerja BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat.
 - c. Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Operasional sebesar Rp5.209.134 pada satuan kerja BPK Perwakilan Propinsi Papua Barat, Jawa Barat dan NTT.

b. Other Receivable (Continued)

2. The excess of payment for goods expenditure that has not been deposited to the state treasury as of December 31, 2020 is Rp222,489,895, namely:
 - a. Official trips amounting to Rp201,376,895 at the BPK Representative Unit for the Provinces of Sumatera, West Papua, West Java, West Kalimantan, South Sumatra, Southeast Sulawesi, East Kalimantan, Maluku and NTT.
 - b. Payment for Other Services, amounting to Rp15,420,000 at the BPK Representative Office for West Java Province
 - c. Payment for Operational Goods Expenditures amounting to Rp1,661,000 at the BPK Representative Unit for the Provinces of South Sumatra and West Java
 - d. Payment of PPNPN Honorarium of Rp4,032,000 to the Central BPK Work Unit.
3. Other corrections amounting to Rp4,681,750 at the BPK Representative Unit for DKI Jakarta and West Java.
4. The excess of capital expenditure for equipment and machinery was Rp4,828,137,600 at the PKN Badiklat

Movements less than Rp698,557,803 originate from:

1. Repayment of excess employee expenditure payments as of December 31, 2019 amounting to Rp181,542,828, namely:
 - a. Food allowance of Rp 53,194,250 at the BPK Representative Office unit of the Provinces of South Sumatra, East Kalimantan, West Kalimantan, Southeast Sulawesi, West Sulawesi, Maluku and Lampung.
 - b. Basic salary and other allowances of Rp 18,251,578 at the BPK Representative Office for West Java, Aceh, South Sulawesi, and West Nusa Tenggara Provinces.
 - c. TPT, amounting to Rp103,113,000 at the Secretariat General and Central BPK work units.
 - d. Structural allowance of Rp6,804,000 for the BPK Representative Office unit of South Sulawesi and Riau
 - e. General PNS allowance of Rp180,000 at the BPK Representative Office for West Nusa Tenggara Province.
2. Repayment of excess goods expenditure as of December 31, 2019 amounting to Rp517,014,975, namely:
 - a. Official trips as of December 31, 2019 amounting to Rp511,235,841 in the work units of the Secretariat General, Central BPK, BPK Representatives for West Sumatra, West Papua, West Java, West Kalimantan, Southeast Sulawesi, East Kalimantan and Lampung.
 - b. Excess Payment of Operational Fees amounting to Rp570,000 at the BPK Representative Office for West Papua Province.
 - c. Excess Payment for Operational Goods Expenditures amounting to Rp5,209,134 at the BPK Representative Office for West Papua, West Java and NTT Provinces.

12. PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH - PIUTANG BUKAN PAJAK	12. ALLOWANCE FOR DOUBTFUL ACCOUNTS- NON TAXES ACCOUNTS
---	---

	31 Desember/December 31 2020	2019	
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih- Piutang PNPB	(281.317)	(27.000)	Allowance for Doubtful Accounts - Non Tax Receivable
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih- Piutang Lainnya	(104.220.868)	(81.071.836)	Allowance for Doubtful Accounts - Other Receivable
Jumlah	(104.502.185)	(81.098.836)	Total

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp104.502.185 dan Rp81.098.836 terjadi kenaikan sebesar Rp23.403.349 atau 28,86%.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besarnya tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.

a. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak
Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp281.317 dan Rp27.000 terjadi kenaikan sebesar Rp254.317 atau 941,91%.

b. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya
Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp104.220.868 dan Rp81.071.836 terjadi kenaikan sebesar Rp23.149.032 atau 28,55%.

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya sebesar Rp104.220.031 berasal dari:

1. Piutang Lainnya yang dikategorikan dalam kualitas Rp27.325.867
2. Piutang Lainnya yang dikategorikan dalam macet sebesar Rp76.895.000.

The balance of Allowance for Uncollectible Accounts - Non-Tax Receivables as of 31 December 2020 and 31 December 2019 amounting to Rp104,502,185 and Rp81,098,836, respectively, an increase of Rp23,403,349 or 28.86%.

Allowance for Doubtful Accounts is a reserve that must be established at a certain percentage of the accounts receivable based on the classification of the quality of the receivables. The classification of receivables quality is one of the bases for determining the amount of allowance for accounts receivable. Accounts receivable quality assessment is carried out by taking into account the maturity date and progress of collection efforts undertaken by the government. The quality of receivables is based on the condition of each receivable at the reporting date in accordance with the Minister of Finance Regulation Number 69 / PMK.06 / 2014 concerning Determination of Receivables Quality and Establishment of Allowance for Uncollectible Accounts at State Ministries / Institutions and State General Treasurer

a. Allowance for Uncollectible Accounts Receivable - Non-Tax State Receivables
The balance of Allowance for Uncollectible Accounts - Non-tax State Revenue Receivables as of 31 December 2020 and 31 December 2019 amounted to Rp281,317 and Rp27,000, respectively, an increase of Rp254,317 or 941.91%.

b. Allowance for Doubtful Accounts - Other Receivables
The balance of Allowance for Uncollectible Accounts - Other Receivables as of December 31, 2020 and December 31, 2019, amounting to Rp104,220,868 and Rp81,071,836, respectively, there was an increase of Rp23,149,032 or 28.55%.

The balance of Allowance for Uncollectible Accounts - Other Receivables, amounting to Rp104,220,031 originated from:

1. Other Receivables categorized as quality Rp27,325,867
2. Other Receivables categorized as loss amounted to Rp76,895,000.

13. BAGIAN LANCAR TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/ TUNTUTAN GANTI RUGI (TP/TGR)	13. CURRENT PORTION INDEMNIFICATION OF TREASURY/CLAIMS BILLS-NET
--	---

	31 Desember/December 31 2020	2019	
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan	14.400.000	14.400.000	Current Portion Indemnification of Treasury Bill
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	85.576.996	75.576.996	Current Portion Indemnification of Claims Bill
Jumlah	99.976.996	89.976.996	Total

**13. BAGIAN LANCAR TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/
TUNTUTAN GANTI RUGI (TP/TGR) (LANJUTAN)**

**13. CURRENT PORTION INDEMNIFICATION OF TREASURY/CLAIMS
BILLS-NET (CONTINUED)**

Saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp99.976.996 dan Rp89.976.996 terjadi kenaikan sebesar Rp10.000.000 atau 11,11%. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang.

The current portion of TP / TGR Bills as of 31 December 2020 and 31 December 2019 amounted to Rp99,976,996 and Rp89,976,996, respectively, an increase of Rp10,000,000 or 11.11%. Current Portion of TP / TGR Receivables is TP / TGR Claims that have not been settled on the balance sheet date which are due in 12 months or less.

Sesuai dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 43 Tahun 2015 dinyatakan bahwa pada awal periode pelaporan harus dilakukan jurnal balik (*reversing entries*) atas reklasifikasi bagian lancar atas piutang jangka panjang.

In accordance with the Regulation of the Director General of Treasury Number 43 of 2015, it is stated that at the beginning of the reporting period, reversing entries must be made to reclassify the current portion of long-term receivables.

a. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan (TP)

a. Current Portion of Treasury Claims (TP)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan (TP) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp14.400.000 dan Rp14.400.000. Tidak terdapat kenaikan/penurunan atas saldo akun ini.

The balance of the Current Share of Treasury Claims (TP) as of December 31, 2020 and December 31, 2019 is Rp14,400,000 and Rp14,400,000, respectively. There is no increase / decrease in this account balance.

Rincian penambahan dan pengurangan nilai Bagian Lancar Tagihan TP adalah sebagai berikut:

The details for adding and reducing the value of the Current Portion of TP Receivables are as follows:

Jenis Transaksi	Nilai/ Value	Type of Transaction
Saldo per 31 Desember 2019	14.400.000	Balance as of December 31, 2019
Mutasi Tambah :		Mutation Add:
Reklasifikasi Masuk dari Piutang Tagihan TP/TGR	14.400.000	Reclassification of Entry of TP / TGR Receivables
Total Mutasi Tambah	14.400.000	Total Mutation Add
Mutasi Kurang :		Mutation Less:
Reklasifikasi Keluar dari Bagian Lancar Tagihan TP	14.400.000	Reclassification of Exit from Current Section of TP Receivables
Total Mutasi Kurang	14.400.000	Total Mutation Less
Total Mutasi	-	Total Mutation
Saldo per 31 Desember 2020	14.400.000	Balance as of December 31, 2020

Mutasi tambah sebesar Rp14.400.000 berasal dari reklasifikasi masuk dari Piutang TP/TGR pada tanggal 31 Desember 2020 yang berasal dari piutang TP seorang pegawai.

Added movements of Rp 14,400,000 originating from the incoming reclassification of TP / TGR Receivables on December 31, 2020 originating from accounts receivable by TP of an employee.

Mutasi kurang sebesar Rp14.400.000 berasal dari adanya reklasifikasi keluar dari Bagian Lancar Tagihan TP ke Piutang Tagihan TP/TGR pada tanggal 2 Januari 2020 yang berasal dari piutang TP seorang pegawai.

Movements of less than Rp14,400,000 originated from the reclassification out of the Current Section of TP Receivables to TP / TGR Receivables on January 2, 2020 originating from accounts receivable by TP of an employee.

b. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

b. Current Portion of Claims for Indemnity Claims (TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan TGR Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp85.576.996 dan Rp75.576.996 Terjadi penurunan sebesar Rp10.000.000 atau 11,11%.

The Current Share of TGR Bills as of 31 December 2020 and 31 December 2019 amounted to Rp85,576,996 and Rp75,576,996, respectively. There was a decrease of Rp10,000,000 or 11.11%.

Rincian penambahan dan pengurangan nilai Bagian Lancar Tagihan TGR adalah sebagai berikut:

The details for adding and subtracting the value of the Current Portion of the TGR Bill are as follows:

Jenis Transaksi	Nilai/ Value	Type of Transaction
Saldo per 31 Desember 2019	75.576.996	Balance as of December 31, 2019
Mutasi Tambah :		Mutation Add:
Reklasifikasi Masuk dari Piutang Tagihan TP/TGR	85.576.996	Reclassification in of TP / TGR Receivables
Total Mutasi Tambah	85.576.996	Total Mutation Add
Mutasi Kurang :		Mutation Less:
Reklasifikasi Keluar dari Bagian Lancar Tagihan TP	75.576.996	Reclassification out of TP / TGR Receivables
Total Mutasi Kurang	75.576.996	Total Mutation Less
Total Mutasi	10.000.000	Total Mutation
Saldo per 31 Desember 2020	85.576.996	Balance as of December 31, 2020

**13. BAGIAN LANCAR TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/
TUNTUTAN GANTI RUGI (TP/TGR) (LANJUTAN)**

**13. CURRENT PORTION INDEMNIFICATION OF TREASURY/CLAIMS
BILLS-NET (CONTINUED)**

b. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) (Lanjutan)

**b. Current Portion of Claims for Indemnity Claims (TGR)
(Continued)**

Mutasi tambah sebesar Rp85.576.996 berasal dari reklasifikasi masuk dari Piutang TP/TGR pada tanggal 31 Desember 2020 yang berasal dari piutang TGR tiga orang pegawai.

Additional movements of Rp 85,576,996 came from the reclassification of the TP / TGR Receivables on December 31, 2020, which came from TGR receivables from three employees.

Mutasi kurang sebesar Rp75.576.996 berasal dari adanya reklasifikasi keluar dari Bagian Lancar Tagihan TGR ke Piutang Tagihan TP/TGR pada tanggal 2 Januari 2020 yang berasal dari piutang TGR tiga orang pegawai.

Movements of less than Rp75,576,996 originated from the reclassification out of the Current Section of TGR Bills to TP / TGR Receivables on January 2, 2020, which came from TGR receivables of three employees.

**14. PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH - BAGIAN LANCAR TAGIHAN
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/ TUNTUTAN GANTI RUGI (TP/TGR)**

**14. ALLOWANCE FOR DOUBTFUL ACCOUNTS- CURRENT PORTION
INDEMNIFICATION OF TREASURY/CLAIMS BILLS-NET**

	31 Desember/December 31		
	2020	2019	
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Bagian Lancar Tagihan TP	(72.000)	(72.000)	Current Portion Indemnification of Treasury Bill
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Bagian Lancar Tagihan TGR	(13.815.801)	(13.765.802)	Current Portion Indemnification of Claims Bill
Jumlah	(13.887.801)	(13.837.802)	Total

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp13.887.801 dan Rp13.837.802, terjadi penurunan sebesar Rp49.999 atau 0,36%.

The balance of Allowance for Uncollectible Accounts - Current Portion of TP / TGR Receivables as of 31 December 2020 and 31 December 2019 amounting to Rp13,887,801 and Rp13,837,802, respectively, a decrease of Rp49,999 or 0.36%.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Allowance for Uncollectible Accounts - Current Portion of Treasury Claims / Indemnity Claims (TP / TGR) is an estimate of the uncollectible Current Section of Treasury Claims / Claims for Indemnification (TP / TGR) which is determined by the quality of each receivable.

15. PERSEDIAAN

15. INVENTORY

	31 Desember/December 31		
	2020	2019	
Barang Konsumsi	11.825.655.538	11.775.626.080	Consumer Goods
Bahan untuk pemeliharaan	1.294.908.857	1.276.359.579	Materials for Maintenance
Suku Cadang	95.036.656	192.948.449	Spare Parts
Persediaan Lainnya	2.965.844.155	1.877.796.084	Others Inventory
Jumlah	16.181.445.206	15.122.730.192	Total

Saldo Persediaan Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp16.181.445.206 dan Rp15.122.730.192 terjadi kenaikan sebesar Rp1.058.715.014 atau 7,00%. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Inventory balances as of December 31, 2020 and December 31, 2019 amounted to Rp16,181,445,206 and Rp15,122,730,192, respectively, there was an increase of Rp1,058,715,014 or 7.00%. Inventory is a type of asset in the form of goods or supplies at the balance sheet date which are obtained for the purpose of supporting operational activities and to be delivered for service to the public.

15. ASET TETAP

15. FIXED ASSETS

	2020				
	Saldo Awal/ <i>Beginning Balance</i>	Penambahan/ Reklasifikasi/ <i>Addi on/ Reklasification</i>	Pengurangan/Reklasi fikasi/ <i>Disposal/ Reklasifikasi</i>	Saldo Akhir/ <i>Ending Balance</i>	
Harga Perolehan					Acquisition Cost
Tanah	5.980.428.125.661	278.313.420.270	337.941.467.968	5.920.800.077.963	Land
Peralatan dan Mesin	1.991.163.973.440	261.626.185.996	93.399.053.127	2.159.391.106.309	Mechinery and Equipment
Gedung dan Bangunan	2.508.643.269.633	167.065.064.346	131.557.446.629	2.544.150.887.350	Properties and Buildings
Jalan, Irigasi dan Jaringan	390.041.392.700	4.569.106.613	607.600.460	394.002.898.853	Road, Irrigation and Network
Aset Tetap Lainnya	17.891.717.899	4.745.216.766	2.672.850.590	19.964.084.075	Other Fixed Assets
Konstruksi dalam Pekerjaan	48.800.000	7.150.967.306	7.051.472.306	148.295.000	Constrution in Progress
	10.888.217.279.333	723.469.961.297	573.229.891.080	11.038.457.349.550	
Akumulasi Penyusutan					Accumulation Depreciation
Peralatan dan Mesin	1.696.950.217.916	160.197.381.753	40.118.424.040	1.817.029.175.629	Mechinery and Equipment
Gedung dan Bangunan	167.143.122.339	83.945.864.995	9.057.789.040	242.031.198.294	Properties and Buildings
Jalan, Irigasi dan Jaringan	222.238.352.732	18.607.931.503	227.922.863	240.618.361.372	Road, Irrigation and Network
Aset Tetap Lainnya	599.270.781	163.424.883	-	762.695.664	Other Fixed Assets
	2.086.930.963.768	262.914.603.134	49.404.135.943	2.300.441.430.959	
Nilai Buku Bersih	8.801.286.315.565			8.738.015.918.591	Book Value -Net
	2019				
	Saldo Awal/ <i>Beginning Balance</i>	Penambahan/Rekla sifikasi/ <i>Addition/ Reklasifikasi</i>	Pengurangan/Reklasi fikasi/ <i>Disposal/ Reklasifikasi</i>	Saldo Akhir/ <i>Ending Balance</i>	
Harga Perolehan					Acquisition Cost
Tanah	1.989.704.672.051	4.176.069.077.610	185.345.624.000	5.980.428.125.661	Land
Peralatan dan Mesin	1.971.544.524.387	164.832.383.159	145.212.935.106	1.991.163.973.440	Mechinery and Equipment
Gedung dan Bangunan	2.332.971.508.643	609.760.120.347	434.088.359.357	2.508.643.269.633	Properties and Buildings
Jalan, Irigasi dan Jaringan	352.549.239.113	48.237.458.538	10.745.304.951	390.041.392.700	Road, Irrigation and Network
Aset Tetap Lainnya	24.329.110.328	113.822.949.454	20.260.341.883	17.891.717.899	Other Fixed Assets
Konstruksi dalam Pekerjaan	18.925.965.286	65.584.991.803	84.462.157.089	48.800.000	Constrution in Progress
	6.690.025.019.808	5.078.306.981.911	880.114.772.386	10.888.217.279.333	
Akumulasi Penyusutan					Accumulation Depreciation
Peralatan dan Mesin	1.630.757.004.133	175.790.021.588	109.599.807.805	1.696.950.217.916	Mechinery and Equipment
Gedung dan Bangunan	316.182.639.145	61.894.546.550	210.934.063.356	167.143.122.339	Properties and Buildings
Jalan, Irigasi dan Jaringan	216.390.289.863	17.204.112.410	11.356.049.531	222.238.352.732	Road, Irrigation and Network
Aset Tetap Lainnya	482.415.781	139.355.000	22.500.000.000	599.270.781	Other Fixed Assets
	2.163.812.348.922	255.031.035.548	331.912.420.702	2.086.930.963.768	
Nilai Buku Bersih	4.526.212.670.886			8.801.286.315.565	Book Value -Net

16. PIUTANG JANGKA PANJANG

16. LONG TERM - RECEIVABLE

	31 Desember/December 31 2020	2019	
Piutang Tagihan TP/TGR	3.070.515.603	3.055.767.909	Receivables of Indemnification of Treasury/Claims Bills
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR	(2.626.452.252)	(2.588.888.511)	Allowance for Doubtful Accounts - Indemnification of Treasury/Claims Bills
Jumlah	444.063.351	466.879.398	Total

Saldo Piutang Jangka panjang per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp444.063.351 dan Rp466.879.398. Terjadi penurunan sebesar Rp22.816.047 atau 4,89%.

Long-term accounts receivable balances as of December 31, 2020 and December 31, 2019 amounted to Rp444,063,351 and Rp466,879,398, respectively. There was a decrease of Rp 22,816,047 or 4.89%.

Piutang Jangka Panjang merupakan piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Long-term receivables are receivables that are due or will be realized more than 12 months from the reporting date.

a. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

a. Treasury Claims Receivable / Indemnification Claims

Saldo piutang tagihan Tuntutan Perbendaharaan/tuntutan Ganti Rugi Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp3.070.515.603 dan Rp3.055.767.909, terjadi kenaikan sebesar Rp14.747.694 atau 0,48%.

The balance of accounts receivable for Treasury Claims / claims for Compensation As of December 31, 2020 and December 31, 2019 amounting to Rp3,070,515,603 and Rp3,055,767,909, respectively, an increase of Rp14,747,694 or 0.48%.

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada Bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.

Treasury Claims are claims determined by the Supreme Audit Agency to the Treasurer which due to negligence or acts against the law result in losses to the State / regions.

Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu Perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Meanwhile, Claims for Compensation is a process carried out against civil servants or non-treasurer civil servants with the aim of demanding compensation for a loss suffered by the state as a direct or indirect result of an unlawful act committed by said employee or negligence in implementation of their duties.

Saldo Piutang Tagihan tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Per 31 Desember 2020 berasal dari Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.

The balance of Accounts Receivable Claims for Treasury / Indemnity Claims as of December 31, 2020 comes from Treasury Claims and Indemnity Claims.

Rincian penambahan dan pengurangan nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi adalah sebagai berikut:

The details for the addition and reduction of the value of the Treasury Claims / Indemnity Claims are as follows:

Jenis Transaksi	Nilai/ Value	Type of Transaction
Saldo per 31 Desember 2019	3.055.767.909	Balance as of December 31, 2019
Mutasi Tambah :		Mutation Add:
Pengakuan piutang karena penerbitan SKTJM a.n. Rusyda A	50.000.000	Receivables recognition due to the issuance of SKTJM a.n. Rusyda A.
Reklasifikasi Masuk dari Bagian Lancar Tagihan TGR	75.576.996	Reclassification of Entry from Current Section of TGR Bill
Reklasifikasi Masuk dari Bagian Lancar Tagihan TP	14.400.000	Reclassification of Entry from Current Section of TP Bills
Penyesuaian Kurs s.d per 30 Juni 2020	74.062.055	Exchange Rate Adjustments up to June 30, 2020
Penyesuaian Kurs s.d per 30 September 2020	113.773.974	Exchange Rate Adjustments up to September 30, 2020
Total Mutasi Tambah	327.813.025	Total Mutation Add:
Mutasi Kurang :		Mutation Less:
Pembayaran TGR	48.530.700	TGR payment
Pembayaran TP	14.400.000	TP payment
Reklasifikasi Keluar ke Bagian Lancar Tagihan TGR 2020	85.576.996	Reclassification Out to Current Section of TGR 2020 Bill
Reklasifikasi Keluar ke Bagian Lancar Tagihan TP 2020	14.400.000	Reclassification Out to the Current Section of TP 2020 Bills
Penyesuaian Kurs s.d per 31 Desember 2020	150.157.635	Exchange Rate Adjustments up to December 31, 2020
Total Mutasi Kurang	313.065.331	Total Mutation Less
Total Mutasi	14.747.694	Total Mutation
Saldo per 31 Desember 2020	3.070.515.603	Balance as of December 31, 2020

16. PIUTANG JANGKA PANJANG (LANJUTAN)

16. LONG TERM - RECEIVABLE (LANJUTAN)

a. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Mutasi tambah sebesar Rp327.813.025 berasal dari:

1. Adanya tambahan pengakuan piutang karena adanya SKTJM yang sudah ditandatangani oleh pegawai yang melakukan wanprestasi wajib kerja a.n. Rusyda Afina sebesar Rp50.000.000.
2. Adanya reklasifikasi masuk dari bagian lancar Tagihan TGR ke piutang Tagihan TP/TGR pada tanggal 2 Januari 2020 sebesar Rp75.576.996;
3. Adanya reklasifikasi masuk dari bagian Lancar Tagihan TP ke Piutang Tagihan TP/TGR pada tanggal 2 Januari 2020 sebesar Rp14.400.000.
4. Penyesuaian selisih kenaikan kurs US\$ ke mata uang Rupiah terhadap Piutang TGR yang telah dialihkan pengaiannya ke Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Per 30 Juni 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp74.062.055 (Rp2.660.604.439-Rp2.586.542.384).
5. Penyesuaian selisih kenaikan Kurs US\$ ke mata uang Rupiah terhadap piutang TGR yang telah dialihkan penagihannya ke Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) per 30 September 2020 dibandingkan dengan 30 Juni 2020 sebesar Rp113.773.974 (Rp2.774.378.413-Rp2.660.604.439).

Mutasi Kurang sebesar Rp313.065.331 berasal dari:

1. Pembayaran Piutang TGR yang berasal dari dua orang pegawai karena wanprestasi wajib kerja Per 31 Desember 2020 sebesar Rp48.580.700);
2. Pembayaran Piutang TP yang berasal dari seorang pegawai karena kelalaian dalam pelaksanaan tugas perbendaharaan Per 30 September 2020 sebesar Rp14.400.000.
3. Adanya Reklasifikasi keluar dari Piutang Tagihan TP/TGR ke Bagian Lancar Tagihan TGR ke pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp85.576.996;
4. Adanya reklasifikasi keluar dari Piutang Tagihan TP/TGR ke Bagian Lancar Tagihan TP ke pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp14.400.000;
5. Penyesuaian selisih penurunan kurs US\$ ke mata uang Rupiah terhadap piutang TGR yang telah dialihkan penagihannya ke Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal kekayaan Negara (DJKN) per 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 30 September 2020 sebesar Rp150.157.635 (Rp2.624.220.778-Rp2.774.378.413).

Saldo Piutang tagihan TP/TGR per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.070.515.603 terdiri dari:

1. Piutang TGR atas 2 (dua) orang pegawai masing-masing sebesar Rp1.285.547.255 dan Rp1.338.673.552 karena wanprestasi wajib kerja dan telah dialihkan penagihannya ke Panitia urusan Piutang Negara (PUPN) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan;
2. Piutang TGR atas 2 (dua) orang pegawai sebesar Rp102.620.975 Karena wanprestasi wajib Kerja;
3. Piutang TP atas seorang pegawai sebesar Rp343.673.850 karena kelalaian dalam pelaksanaan tugas perbendaharaan.

a. Treasury Claims Receivable / Indemnification Claims

Mutations added of Rp 327,813,025 came from:

1. *There is additional acknowledgment of receivables due to the SKTJM that has been signed by the employee who defaults on the mandatory work a.n. Rusyda Afina, amounting to Rp50,000,000.*
2. *There was an incoming reclassification from the current part of the TGR Bill to the TP / TGR Bill on January 2, 2020 amounting to Rp75,576,996;*
3. *There was an incoming reclassification from the Current section of TP Bills to TP / TGR Receivables on January 2, 2020 amounting to Rp14,400,000.*
4. *Adjustment of the difference between the increase in the exchange rate of US \$ to the Rupiah currency against the TGR Receivables which have been transferred to the Ministry of Finance cq. Directorate General of State Assets (DJKN) as of 30 June 2020 compared to 31 December 2019 amounting to Rp74,062,055 (Rp2,660,604,439-Rp2,586,542,384).*
5. *Adjustment for the difference between the increase in the exchange rate of US \$ to the Rupiah currency against the TGR receivables which have been transferred to the Ministry of Finance cq. Directorate General of State Assets (DJKN) as of 30 September 2020 compared to 30 June 2020 amounting to Rp113,773,974 (Rp2,774,378,413-Rp2,660,604,439).*

Less mutations of Rp 313,065,331 originating from:

1. *Payment of TGR Receivables originating from two employees due to mandatory default of work as of December 31, 2020 amounting to Rp48,580,700);*
2. *Payment of TP Receivables originating from an employee due to negligence in carrying out treasury duties As of September 30, 2020 amounting to Rp14,400,000.*
3. *There was a reclassification of outgoing TP / TGR Receivables to the Current Section of TGR Bills on December 31, 2020 amounting to Rp85,576,996;*
4. *There was a reclassification of outgoing TP / TGR Receivables to the Current Section of TP Bills on December 31, 2020 amounting to Rp14,400,000;*
5. *Adjustment for the difference in the reduction in the exchange rate of US \$ to the Rupiah currency against the TGR receivables which have been transferred to the Ministry of Finance cq Directorate General of State Assets (DJKN) as of 31 December 2020 compared to 30 September 2020 amounting to Rp150,157,635 (Rp2,624,220,778 - Rp2,774,378,413).*

The balance of the TP / TGR receivables as of December 31, 2020 amounting to Rp3,070,515,603 consists of:

1. *TGR receivables for 2 (two) employees, respectively, amounting to Rp1,285,547,255 and Rp1,338,673,552 due to mandatory work default and the collection has been transferred to the Committee for State Receivables Affairs (PUPN), Director General of State Assets, Ministry of Finance ;*
2. *TGR receivables for 2 (two) employees amounting to Rp102,620,975 due to mandatory work default;*
3. *TP accounts receivable for an employee amounting to Rp343,673,850 due to negligence in carrying out treasury duties.*

16. PIUTANG JANGKA PANJANG (LANJUTAN)

16. LONG TERM - RECEIVABLE (LANJUTAN)

- b. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-tagihan TP/TGR per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp2.626.452.252 dan Rp2.588.888.511. Terjadi kenaikan sebesar Rp37.563.741 atau 1,45%. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang TP/TGR.

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-tagihan TP/TGR sebesar Rp2.626.452.252 terdiri dari:

1. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan TP/TGR sebesar Rp1.285.547.255 (berasal dari kerugian wajib kerja seorang pegawai sebesar Rp1.285.547.255 dikategorikan ke dalam kualitas macet, sehingga penyisihan piutang tidak tertagih sebesar Rp1.285.547.255 x 100%);
2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan TP/TGR sebesar Rp1.338.673.523 (berasal dari kerugian wajib kerja seorang pegawai sebesar Rp1.338.673.523 dikategorikan ke dalam kualitas macet sehingga penyisihan piutang tidak tertagih sebesar Rp1.338.673.523 x 100%);
3. Penyisihan piutang Tidak Tertagih-Tagihan TP sebesar Rp1.718.369 (berasal dari kerugian wajib kerja seorang pegawai sebesar Rp343.673.850 dikategorikan ke dalam kualitas lancar, sehingga penyisihan piutang tidak tertagih sebesar Rp343.673.850 x 5%);
4. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TGR sebesar Rp513.105 (berasal dari kerugian wajib kerja dua orang pegawai sebesar Rp102.620.975 dikategorikan ke dalam kualitas lancar, sehingga penyisihan piutang tidak tertagih sebesar Rp102.620.975 x 5%.

Saldo Penyisihan Piutang tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR mengalami kenaikan sebesar Rp37.563.741 disebabkan oleh:

1. Penambahan penyisihan tahun 2020 sebesar Rp125.000 (Rp25.000.000 x 5%). SKTJM senilai Rp50.000.000 diakui sebagai bagian lancar piutang TGR sebesar Rp25.000.000.
2. Penambahan Penyisihan Piutang karena adanya penyesuaian atas kenaikan kurs atas saldo Piutang Tagihan TP/TGR dua orang pegawai per 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019 kenaikan kurs tengah Bank Indonesia tersebut menyebabkan kenaikan penyisihan piutang sebesar Rp37.678.394 (Rp28.592.801 + Rp19.085.593).
3. Pengurangan dari Penyesuaian atas Penyisihan Piutang Sebesar Rp72.000 karena pembayaran piutang TP senilai Rp14.400.000 selama tahun 2020 (Rp14.400.000 x 5%);
4. Pengurangan dari Penyesuaian atas Penyisihan Piutang sebesar Rp167.653 karena pembayaran piutang TP senilai Rp33.530.700 selama tahun 2020 (Rp33.530.700 x 5%);

- b. Allowance for Uncollectible Accounts - Treasury Claims / Indemnity Claims (TP / TGR)

The balance of Allowance for Uncollectible Accounts Receivable - TP / TGR claims as of 31 December 2020 and 31 December 2019 amounting to Rp2,626,452,252 and Rp2,588,888,511, respectively. There was an increase of Rp37,563,741 or 1.45%. Allowance for Uncollectible Accounts Receivable - Treasury Claims / Indemnity Claims (TP / TGR) is an estimate of uncollectible Treasury Claims / Indemnity Claims (TP / TGR) which is determined by the quality of each TP / TGR receivable.

The balance of Allowance for Uncollectible Accounts Receivable - TP / TGR claims amounting to Rp2,626,452,252 consists of:

1. Allowance for Uncollectible Accounts Receivable - TP / TGR amounting to Rp1,285,547,255 (derived from loss of compulsory work for an employee of Rp1,285,547.255 is categorized as loss quality, so that the allowance for uncollectible accounts is Rp1,285,547,255 x 100%);
2. Allowance for Uncollectible Accounts Receivable TP / TGR amounting to Rp1,338,673,523 (derived from the loss of compulsory employment of an employee of Rp1,338,673,523 is categorized as loss quality so that the allowance for uncollectible accounts is Rp1,338,673,523 x 100%);
3. Allowance for Uncollectible Accounts Receivable - TP Claims amounting to Rp1,718,369 (derived from the loss of compulsory employment of an employee of Rp343,673,850 is categorized into current quality, so that the allowance for uncollectible accounts is Rp343,673,850 x 5%);
4. Allowance for Uncollectible Accounts - TGR claim amounting to Rp513,105 (derived from the loss of compulsory work for two employees amounting to Rp102,620,975 is categorized into current quality, so the allowance for uncollectible accounts is Rp102,620,975 x 5%.

Balance of Allowance for Uncollectible Accounts - TP / TGR Receivables increased by Rp37,563,741 due to:

1. Additional allowance in 2020 amounting to Rp125,000 (Rp25,000,000 x 5%). SKTJM amounting to Rp50,000,000 is recognized as the current portion of TGR's receivables amounting to Rp25,000,000.
2. The increase in Allowance for Accounts Receivable due to an adjustment to the increase in the exchange rate for the balance of the TP / TGR Receivables of two employees as of December 31, 2020 compared to December 31, 2019, the increase in Bank Indonesia's middle rate caused an increase in allowance for accounts receivable amounting to Rp37,678,394 (Rp28,592,801 + Rp19,085,593).
3. Deduction from Adjustments to Allowance for Accounts Receivable of Rp72,000 due to payment of TP receivables amounting to Rp14,400,000 during 2020 (Rp14,400,000 x 5%);
4. Deduction from the Adjustment for Allowance for Accounts Receivable amounting to Rp167,653 due to payment of TP receivables amounting to Rp33,530,700 during 2020 (Rp33,530,700 x 5%);

17. ASET LAINNYA

17. OTHER ASSETS

	31 Desember/December 31		
	2020	2019	
Aset Tak Berwujud	181.618.568.202	163.565.836.169	Intangible Assets
Aset Lain-Lain	8.561.600.761	10.117.675.753	Other Assets
Amortisasi	(131.361.355.608)	(119.348.328.150)	Amortization
Jumlah	58.818.813.355	54.335.183.772	Total
Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp58.818.813.335 dan Rp54.335.183.772.	Other Asset Value as of December 31, 2020 and December 31, 2019, amounting to Rp58,818,813,335 and Rp54,335,183,772, respectively.		
Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap.	Other Assets are assets that cannot be grouped into Current Assets and Fixed Assets.		

18. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

18. SHORT-TERM LIABILITIES

	31 Desember/December 31		
	2020	2019	
Utang Kepada Pihak Ketiga	6.357.134.523	63.624.154.354	Account Payable - Third Parties
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	3.187.000	3.645.760	Excess Payment Receivable Payable
Pendapatan diterima dimuka	2.307.177.053	1.689.080.325	Unearned Revenue
Utang Jangka Pendek Lainnya	-	1.979.850	Others short term-Liabilities
Jumlah	8.667.498.576	65.318.860.289	Total

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp8.667.498.576 dan Rp65.318.860.289.

Short-term Liabilities balance as of December 31, 2020 and December 31, 2019, amounting to Rp8,667,498,576 and Rp65,318,860,289, respectively.

Kewajiban Jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Short-term liabilities are a group of liabilities that are expected to be settled in less than 12 (twelve) months after the reporting date.

a. Utang Kepada Pihak Ketiga

a. Debt to Third Parties

Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp6.357.134.523 dan Rp63.624.154.354 terjadi penurunan sebesar Rp57.267.019.831 atau 90,01%.

Debt to Third Parties as of December 31, 2020 and December 31, 2019, amounting to Rp6,357,134,523 and Rp63,624,154,354, respectively, there was a decrease of Rp57,267,019,831 or 90.01%.

Rincian penambahan dan pengurangan Utang Kepada Pihak Ketiga adalah sebagai berikut:

The details of the addition and reduction of Debt to Third Parties are as follows:

Jenis Transaksi	Nilai/ Value	Type of Transaction
Saldo per 31 Desember 2019	63.624.154.354	Balance as of December 31, 2019
Mutasi Tambah :		Mutation Add:
Belanja Pegawai yang masih harus dibayar	65.092.271.357	Accrued personnel expenditures
Belanja Barang yang masih harus dibayar	6.522.736.164	Expenditures for goods that accrued
Pembayaran utang kepada pihak ketiga lainnya	4.531.510.412	Payment of debt to other third parties
Total Mutasi Tambah	76.146.517.933	Total Mutation Add
Mutasi Kurang :		Mutation Less:
Belanja Pegawai yang masih harus dibayar	122.214.507.279	Accrued personnel expenditures
Belanja Barang yang masih harus dibayar	6.744.879.923	Expenditures for goods that accrued
Pembayaran utang kepada pihak ketiga lainnya	4.454.150.562	Payment of debt to other third parties
Total Mutasi Kurang	133.413.537.764	Total Mutation Less
Total Mutasi	(57.267.019.831)	Total Mutation
Saldo per 31 Desember 2020	6.357.134.523	Balance as of December 31, 2020

Mutasi tambah sebesar Rp76.146.517.933 berasal dari:

Mutations added of Rp76,146,517,933 came from:

- Belanja Pegawai yang masih harus dibayar sebesar Rp65.092.271.357 terdiri dari:
 - Kekurangan pembayaran gaji/uang makan/TKPK/ tunjangan beras pegawai yang belum dibayar per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.822.336.618;

- Accrued personnel expenditures amounting to Rp65,092,271,357, consisting of:
 - Unpaid salary / meal allowance / TKPK / rice allowance for employees as of December 31, 2020 amounting to Rp2,822,336,618;

18. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK (LANJUTAN)

18. SHORT-TERM LIABILITIES (CONTINUED)

Mutasi tambah sebesar Rp76.146.517.933 berasal dari: (Lanjutan)

*Mutations added of Rp76,146,517,933 came from:
(Continued)*

- b. Adanya kekurangan pembayaran gaji/uang makan/TKPK/tunjangan beras pegawai yang belum dibayar per 30 September 2020 sebesar Rp62.269.934.739.
- 2. Belanja barang yang masih harus dibayar sebesar Rp6.522.736.164 terdiri dari:
 - a. Belanja barang berupa listrik/telepon/air/internet yang belum dibayar per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.559.336.878;
 - b. Belanja barang berupa listrik/telepon/air/internet yang belum dibayar per 30 September 2020 sebesar Rp2.963.399.286;
- 3. Pembayaran kepada pihak ketiga lainnya yaitu uang di Bendahara Pengeluaran yang belum diserahkan kepada pegawai/pihak yang berhak dan pengembalian belanja yang belum disetor ke Kas Negara sebesar Rp4.531.510.412.

- b. There is a lack of payment for salaries / meal allowance / TKPK / employee rice allowances that have not been paid as of September 30, 2020 amounting to Rp62,269,934,739.*
- 2. Expenditures for goods accrued amounting to Rp6,522,736,164 consist of:*
 - a. Purchases of goods in the form of electricity / telephone / water / internet that have not been paid as of December 31, 2020 amounting to Rp3,559,336,878;*
 - b. Purchases of goods in the form of electricity / telephone / water / internet that have not been paid as of September 30, 2020 amounting to Rp2,963,399,286;*
- 3. Payment to other third parties, namely money in the Expenditure Treasurer that has not been submitted to the employee / entitled party and the return of unpaid expenditure to the State Treasury amounting to Rp4,531,510,412*

Mutasi kurang sebesar Rp133.413.537.764 berasal dari:

Movements less than Rp133,413,537,764 come from:

- 1. Belanja Pegawai yang masih harus dibayar sebesar Rp122.214.507.279 terdiri dari:
 - a. Adanya pembayaran atas kekurangan gaji, uang makan, TKPK dan TPT yang berasal dari periode sebelumnya sebesar Rp59.394.429.539;
 - b. Jurnal balik awal tahun belanja pegawai yang masih harus dibayar sebesar Rp415.784.420;
 - c. Koreksi lebih catat belanja pegawai yang masih harus dibayar sebesar Rp134.358.581;
 - d. Jurnal balik 30 September 2020 belanja pegawai yang masih harus dibayar sebesar Rp62.269.934.739;
- 2. Belanja Barang yang masih harus dibayar sebesar Rp6.744.879.923 terdiri dari:
 - a. Koreksi lebih catat belanja barang yang masih harus dibayar sebesar Rp133.577.973;
 - b. Jurnal balik 30 September 2020 belanja barang yang masih harus dibayar sebesar Rp2.963.399.286;
 - c. Adanya pembayaran atas kekurangan Belanja Barang yang berasal dari periode sebelumnya sebesar Rp3.647.902.664.
- 3. Pembayaran utang kepada Pihak Ketiga Lainnya, yaitu pembayaran uang di Bendahara Pengeluaran kepada pegawai/pihak yang berhak sebesar Rp4.454.150.562.

- 1. Accrued personnel expenditures amounting to Rp122,214,507,279, consisting of:*
 - a. There was a payment for underpaid salaries, food allowance, TKPK and TPT originating from the previous period amounting to Rp59,394,429,539;*
 - b. The reverse entry of the beginning of the year personnel expenditures that still have to be paid are Rp415,784,420*
 - c. More note-taking corrections to the accrued personnel expenditure amounting to Rp134,358,581;*
 - d. Reverse journal of 30 September 2020 employee expenditure accrued amounting to Rp62,269,934,739;*
- 2. Expenditures for goods that accrued amounted to Rp6,744,879,923 consisting of:*
 - a. More note-taking corrections for accrued goods expenditures amounting to Rp133,577,973;*
 - b. Reverse journal 30 September 2020 expenditure for goods that accrued amounting to Rp2,963,399,286;*
 - c. There was a payment for the shortage of Goods Expenditures from the previous period amounting to Rp3,647,902,664.*
- 3. Payment of debts to other third parties, namely payment of money in the Expenditure Treasurer to employees / entitled parties amounting to Rp4,454,150,562.*

Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 sebesar Rp6.215.162.898 terdiri dari:

Debt to Third Parties as of December 31, 2020 amounting to Rp6,215,162,898, consisting of:

- 1. Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar sebesar Rp2.679.706.993 meliputi:
 - a. Kekurangan gaji 31 Desember 2020 sebesar Rp852.231.058;
 - b. Kekurangan uang makan 31 Desember 2020 sebesar Rp776.866.166;
 - c. Kekurangan TKPK 31 Desember 2020 sebesar Rp27.253.600;
 - d. Kekurangan TPT 31 Desember 2020 sebesar Rp1.023.356.169;

- 1. Accrued Employee Expenditures amounting to Rp2,679,706,993 includes:*
 - a. Shortage of salary on December 31, 2020 amounting to Rp852,231,058;*
 - b. Lack of food allowance on December 31, 2020, amounting to Rp776,866,166;*
 - c. TKPK shortage on December 31, 2020 amounting to Rp27,253,600;*
 - d. Lack of TPT on 31 December 2020 amounting to Rp1,023,356,169;*

18. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK (LANJUTAN)

18. SHORT-TERM LIABILITIES (CONTINUED)

2. Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar sebesar Rp3.425.758.905 meliputi:
- a. Belanja langganan listrik sebesar Rp2.915.145.109;
 - b. Belanja langganan telepon sebesar Rp160.207.688;
 - c. Belanja langganan air sebesar Rp164.265.870;
 - d. Belanja langganan TV Kabel sebesar Rp74.689.258;
 - e. Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos /dokumen sebesar Rp226.480;
 - f. Belanja jasa lainnya sebesar Rp42.773.000;
 - g. Belanja Pemeliharaan sebesar Rp66.623.700;
 - h. Belanja Perjalanan sebesar Rp94.000;
 - i. Belanja Keperluan Perkantoran sebesar Rp1.733.800
3. Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya sebesar Rp109.697.000.

b. Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

Saldo Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp3.187.000 dan Rp3.645.760, terjadi penurunan sebesar Rp458.760 atau 12,58%.

Utang kelebihan pembayaran pendapatan terjadi ketika jumlah pendapatan yang disetorkan lebih besar dari yang seharusnya. Oleh karena sampai akhir periode pelaporan pengembalian kelebihan pendapatan belum dapat direalisasikan maka satuan kerja mencatat sebagai utang kelebihan pembayaran.

c. Pendapatan Diterima di Muka

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp2.307.177.053 dan Rp1.689.080.325 terjadi kenaikan sebesar Rp618.096.728 atau 36,59%.

Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke Kas Negara, namun Barang/Jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBPN.

Saldo Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2020 tersebut seluruhnya berasal dari Pendapatan Sewa Diterima di Muka.

Rincian penambahan dan pengurangan Pendapatan Diterima di Muka adalah sebagai berikut:

2. *Goods Expenditures Accrued amounting to Rp3,425,758,905 include:*
- a. Electricity subscription expenditure amounting to Rp2,915,145,109;*
 - b. expenditure for telephone subscriptions, amounting to Rp160,207,688;*
 - c. Water subscription expenditure amounting to Rp164,265,870;*
 - d. Cable TV subscription expenditure, amounting to Rp74,689,258;*
 - e. Postal Service Mail Delivery Expenditures / documents amounting to Rp226,480;*
 - f. Other service expenditures amounting to Rp42,773,000;*
 - g. Maintenance Expenditures, amounting to Rp66,623,700;*
 - h. Travel Expenditures, amounting to Rp94,000;*
 - i. Expenditures for office purposes amounting to Rp1,733,800*
3. *Payable to Other Third Parties, amounting to Rp109,697,000.*

b. Debt Overpayment of Income

Debt Balance of Overpayment of Income as of 31 December 2020 and 31 December 2019 amounted to Rp3,187,000 and Rp3,645,760, respectively, a decrease of Rp458,760 or 12.58%.

Income overpayment payable occurs when the amount of paid income is greater than it should be. Because until the end of the reporting period the return on excess income could not be realized, the work unit recorded it as overpayment debt.

c. Prepaid income

The balance of unearned income as of 31 December 2020 and 31 December 2019 amounted to Rp2,307,177,053 and Rp1,689,080,325, respectively, an increase of Rp618,096,728 or 36.59%.

Income Received in Advance is income that has been paid to the State Treasury, but the goods / services have not been submitted to a third party in the framework of PNBPN.

The balance of Unearned Income as of December 31, 2020 is entirely derived from Rental Revenues Received in Advance.

The details of the addition and reduction of Unearned Income are as follows:

Jenis Transaksi	Nilai/ Value	Type of Transaction
Saldo per 31 Desember 2019	1.689.080.325	Balance as of December 31, 2019
Mutasi Tambah :		Mutation Add:
Sewa Penempatan TMBNI, perangkat BTS, Kantin kantor pusat, koperasi kantor pusat, vending machine, perangkat telekomunikasi, perangkat BTS Telkom, Perangkat Komunikasi.	2.307.177.053	TMBNI Placement Lease, BTS equipment, head office canteen, head office cooperative, vending machine, telecommunication equipment, Telkom BTS equipment, communication
Total Mutasi Tambah	2.307.177.053	Total Mutation Add
Mutasi Kurang :		Mutation Less:
Jurnal Balik per 2 Januari 2020 atas nilai sewa penempatan ATM BNI, sewa kantin, sewa koperasi, vending machine, sewa mess, dan perangkat BTS GSM yang belum digunakan per 31 Desember 2019	1.689.080.325	Jurnal Balik as of January 2, 2020 on the value of BNI ATM placement leases, canteen leases, cooperative leases, vending machines, mess rentals, and unused GSM BTS devices as of December 31, 2019
Total Mutasi Kurang	1.689.080.325	Total Mutation Less
Total Mutasi	618.096.728	Total Mutation
Saldo per 31 Desember 2020	2.307.177.053	Balance as of December 31, 2020

18. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK (LANJUTAN)

18. SHORT-TERM LIABILITIES (CONTINUED)

c. Pendapatan Diterima di Muka

Mutasi tambah sebesar Rp2.307.177.053 berasal dari:

1. Nilai sewa gedung dan bangunan untuk penempatan ATM BNI yang belum digunakan oleh PT BNI (Persero) di Kantor Pusat BPK dan Perwakilan BPK per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.576.948.113;
2. Nilai sewa gedung dan bangunan untuk kantin yang belum digunakan oleh Dharma Wanita Persatuan Sekretariat Jenderal BPK di Kantor Pusat BPK per 31 Desember 2020 sebesar Rp56.853.557;
3. Nilai sewa gedung dan bangunan untuk koperasi yang belum digunakan oleh Koperasi Badan Pemeriksa Keuangan di Kantor Pusat per 31 Desember 2020 sebesar Rp60.136.903;
4. Nilai sewa gedung dan bangunan untuk *vending machine* yang belum digunakan oleh PT Jatari Boreas Sabha di Kantor Pusat BPK per 31 Desember 2020 sebesar Rp604.600;
5. Nilai sewa gedung dan bangunan untuk penempatan perangkat BTSGSM yang belum digunakan oleh PT Telekomunikasi Seluler Indonesia di Kantor Pusat BPK per 31 Desember 2020 sebesar Rp861.522;
6. Nilai sewa gedung dan bangunan untuk penempatan perangkat BTS yang belum digunakan oleh PT Dayamitra Telekomunikasi di Kantor Pusat BPK per 31 Desember 2020 yang berasal dari transaksi tahun 2019 sebesar Rp577.762.452;
7. Nilai sewa gedung dan bangunan untuk penempatan perangkat BTSGSM yang belum digunakan oleh PT Telekomunikasi Seluler Indonesia di Kantor Perwakilan D.I. Yogyakarta BPK per 31 Desember 2020 sebesar Rp26.676.828;
8. Nilai sewa gedung dan bangunan untuk penempatan perangkat telekomunikasi yang belum digunakan oleh PT Teknindo Bangun Sarana di kantor Perwakilan DKI Jakarta per 31 Desember 2020 sebesar Rp7.333.078;

Mutasi kurang sebesar Rp1.689.080.325 berasal dari jurnal balik per 2 Januari 2020 atas nilai sewa penempatan ATM BNI, sewa kantin, sewa koperasi, *vending machine*, perangkat BTS GSM, sewa mess dan menara Telkom yang belum digunakan per 31 Desember 2019.

c. Prepaid income

Mutations added of Rp2,307,177,053 came from:

1. *The rental value of Properties and Buildings for the placement of BNI ATMs that have not been used by PT BNI (Persero) at the BPK Head Office and BPK Representatives as of 31 December 2020 amounting to Rp1,576,948,113;*
2. *The rental value of Properties and Buildings for canteens that have not been used by the BPK Secretariat General Dharma Wanita Persatuan at the BPK Head Office as of December 31, 2020 is Rp56,853,557;*
3. *The rental value of Properties and Buildings for cooperatives that have not been used by the Cooperative Supreme Audit Agency at the Head Office as of 31 December 2020 is Rp60,136,903;*
4. *The rental value of Properties and Buildings for vending machines that have not been used by PT Jatari Boreas Sabha at the BPK Head Office as of December 31, 2020 is Rp604,600;*
5. *The rental value of Properties and Buildings for the placement of BTSGSM equipment that has not been used by PT Telekomunikasi Seluler Indonesia at the BPK Head Office as of December 31, 2020 is Rp861,522;*
6. *The rental value of Properties and Buildings for the placement of BTS equipment that has not been used by PT Dayamitra Telekomunikasi at the BPK Head Office as of December 31, 2020 originating from transactions in 2019 amounting to Rp577,762,452;*
7. *The rental value of Properties and Buildings for the placement of BTSGSM equipment that has not been used by PT Telekomunikasi Seluler Indonesia at the Representative Office of D.I. Yogyakarta BPK as of December 31, 2020 amounting to Rp26,676,828;*
8. *The rental value of Properties and Buildings for the placement of telecommunications equipment that has not been used by PT Teknindo Bangun Sarana at the DKI Jakarta Representative Office as of December 31, 2020 is Rp7,333,078;*

Movements of less than Rp1,689,080,325 originating from reverse journals as of January 2, 2020 on the value of BNI ATM placement leases, canteen leases, cooperative leases, vending machines, GSM BTS devices, mess leases and Telkom towers that have not been used as of December 31, 2019 .

19. EKUITAS

19. EQUITY

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp8.811.904.432.913 dan Rp8.813.069.820.947.

Equity balance as of December 31, 2020 and December 31, 2019 amounted to RpRp8,811,904,432,913 and Rp8,813,069,820,947, respectively.

Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Equity is the entity's net worth which is the difference between assets and liabilities. Further details on equity are presented in the Statement of Changes in Equity.

20. PENDAPATAN **20. REVENUE**

	31 Desember/December 31		
	2020	2019	
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	1.151.154.084	942.612.695	Rental Land, Properties, and Building Revenue
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	627.300.000	695.575.000	Revenue Use of Facilities and Infrastructure accordance with the duties and functions
Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	5.359.070.031	6.107.570.158	Education and / or Training Service Income
Pendapatan Jasa Lainnya	4.191.457.353	3.910.261.032	Other Service Income
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	-	925.095	Financial Institution Service Revenue (Current Account)
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	56.462.820	28.832.183	Income of Fines Delayed Completion of Government
Pendapatan Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	-	2.162.040	Reception Persekot/ Advance Salary
Pendapatan Anggaran Lain-lain	4.879.760.000	-	Other Revenue
Jumlah	16.265.204.288	11.687.938.203	Total

Pendapatan Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp16.265.204.288 dan Rp11.687.938.203, terjadi kenaikan sebesar Rp4.577.266.085 atau 39,16%. Keseluruhan Pendapatan Operasional merupakan Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 seluruhnya berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya.

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya adalah pendapatan negara yang bukan merupakan pendapatan dari pajak ataupun pendapatan hibah dan bukan bagian dari pendapatan yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam maupun pendapatan bagian pemerintah atas laba.

Kenaikan signifikan Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya per 31 Desember 2020 dibanding periode sebelumnya per 31 Desember 2019 disebabkan adanya setoran pengembalian pegawai dari temuan Inspektorat Utama yang dicatat pada Tahun 2020 sebagai Pendapatan Anggaran Lain-lain.

Operating Income for the period ended 31 December 2020 and 31 December 2019 were Rp16,265,204,288 and Rp11,687,938,203, respectively, an increase of Rp4,577,266,085 or 39.16% . Overall Operating Income is the Non-Tax State Revenue.

Non-Tax State Revenue Revenues for the periods ended December 31, 2020 and December 31, 2019 are entirely derived from Other Non-Tax State Revenues.

Other Non-Tax State Revenues are state revenues that are not income from taxes or grant income and are not part of revenue derived from the use of natural resources or the government's share of profits.

The significant increase in Other Non-Tax State Income as of 31 December 2020 compared to the previous period as of 31 December 2019 was due to employee return deposits from the findings of the Main Inspectorate which were recorded in 2020 as Other Budget Income.

21. BEBAN PEGAWAI **21. EMPLOYEE EXPENSES**

	31 Desember/December 31		
	2020	2019	
Beban Gaji	322.185.745.496	316.269.131.501	Salary Expenses
Beban Tunjangan-Tunjangan	89.671.832.728	83.513.527.507	Benefits Expenses
Beban Lembur	6.958.273.450	8.250.852.200	Overtime Loans
Beban Tunjangan Khusus dan Beban Pegawai Transito	1.483.881.696.651	1.603.678.848.380	Special Benefit Expenses and Employee Expenses Transito
Jumlah	1.902.697.548.325	2.011.712.359.588	Total

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp1.902.697.548.325 dan Rp2.011.712.359.588 terjadi penurunan sebesar Rp109.014.811.263 atau 5,42%.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Total Personnel Expenses for the period ended December 31, 2020 and December 31, 2019 amounted to Rp1.902.697.548.325 and Rp2,011,712,359,588 respectively, there was a decrease of Rp109,014,811,263 or 5.42%.

Employee Burden is the burden of compensation, both in the form of money and goods which is determined based on the laws and regulations given to state officials, Civil Servants (PNS), and employees employed by the government who are not yet PNS as compensation for work that has been carried out except for work. relating to the formation of capital.

22. BEBAN PERSEDIAAN

22. INVENTORY EXPENSES

	31 Desember/December 31		
	2020	2019	
Beban Persediaan Konsumsi	25.678.843.346	37.569.266.552	Consumption Supply Expense
Beban Persediaan Lainnya	10.813.494.703	6.171.200.670	Other Supply Expense
Jumlah	36.492.338.049	43.740.467.222	Total

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp36.492.338.049 dan Rp43.740.467.222 terjadipenurunan sebesar Rp7.248.129.173 atau 16,57%.

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Total Inventory Expense for the period ended 31 December 2020 and 31 December 2019 amounting to Rp36,492,338,049 and Rp43,740,467,222, respectively, there was a decrease of Rp7,248,129,173 or 16.57%.

Inventory Expense is an expense to record consumption of consumable goods, including goods produced, both marketed and non-marketed.

23. BEBAN BARANG DAN JASA

23. GOOD AND SERVICE EXPENSES

	31 Desember/December 31		
	2020	2019	
Beban Barang			Operational Goods
Beban Barang Operasional	232.697.248.298	231.817.490.476	Operational Goods Expense
Beban Barang Operasional -			Operational Goods Expense-
Penanganan Pandemi COVID-19	6.554.273.083	-	Handling the COVID-19 Pandemic
Beban Barang Non Operasional	140.369.316.532	213.570.565.570	Non Operational Goods Expense
Beban Barang Non Operasional			Non Operational Goods Expense-
Penanganan Pandemi COVID-19	1.253.969.419	-	Handling the COVID-19 Pandemic
Beban Jasa			Services Expenses
Beban Langganan Daya dan Jasa	61.516.020.692	61.296.490.530	Power Subscriptions Services Expense
Beban Jasa Konsultan	15.277.551.135	16.878.452.923	Consultant Services Expense
Beban Sewa	7.420.892.732	11.889.281.538	Rent Expense
Beban Jasa Profesi	55.035.908.107	42.735.226.950	Professional services Expense
Beban Jasa Lainnya	32.814.697.974	41.259.414.036	Other Services Expense
			Services Expense -
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	9.353.660.715	-	Handling the COVID-19 Pandemic
Beban Aset Extrakomtabel			Asset Expenses Extracompatible
Beban Aset Extrakomtabel			Asset Expenses Extracompatible
Peralatan dan Mesin	1.452.459.429	1.701.543.755	Equipment and Machinery
Beban Aset Extrakomtabel			Asset Expenses Extracompatible
Aset Tetap Lainnya	7.000.000	-	Other Fixed Asset
Jumlah	563.752.998.116	621.148.465.778	Total

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp563.752.998.116 dan Rp621.148.465.778, terjadi penurunan sebesar Rp57.395.467.662 atau 9,24%.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Total Goods and Services Expenses for the period ended 31 December 2020 and 31 December 2019 amounted to Rp563,752,998,116 and Rp621,148,465,778, respectively, a decrease of Rp57,395,467,662 or 9, 24%.

Goods and services expenses consist of goods and services expenses in the form of consumption of goods and or services in the context of carrying out the entity's activities as well as other expenses in the form of expenses arising from the use of the allocation of capital expenditures which do not produce fixed assets.

24. BEBAN PEMELIHARAAN

24. MAINTANANCE EXPENSES

	31 Desember/December 31		
	2020	2019	
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	100.251.192.749	74.973.646.289	Properties and Buildings Maintenance Expenses
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	259.676.815	-	Properties and Buildings Maintenance Expenses - Handling the COVID-19 Pandemic
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Lainnya	-	8.094.479.572	Other Properties and Buildings Maintenance Expenses
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	45.148.797.956	40.009.478.230	Equipment and machinery Maintenance Expenses
Beban Asuransi Alat Angkut Darat/Apung/Udara	-	7.122.400	Motorized/Floating/Air Transport Equipment Insurance Expenses
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	403.576.700	3.103.683.241	Other Equipment and machinery Maintenance Expenses
Beban Pemeliharaan Jaringan	167.657.067	1.660.005.183	Network Maintenance Expenses
Beban Pemeliharaan Lainnya	188.100.000	187.000.000	Other Maintenance Expenses
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	2.446.170.851	2.778.954.903	Raw material Inventory Expenses
Beban Persediaan Suku Cadang	349.815.362	802.321.893	Spare parts Inventory Expenses
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	314.467.450	127.114.248	Asset Expenses Extracompatible Properties and building
Jumlah	149.529.454.950	131.743.805.959	Total

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp149.529.454.950 dan Rp131.743.805.959 terjadi kenaikan sebesar Rp17.785.648.991 atau 13,50%.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Total Maintenance Expenses for the period ended December 31, 2020 and December 31, 2019 amounting to Rp149,529,454,950 and Rp131,743,805,959, respectively, an increase of Rp17,785,648,991 or 13.50%.

The maintenance expenses is a expenses intended to maintain a fixed asset or other existing asset into normal condition.

25. BEBAN PERJALANAN DINAS

25. OFFICIAL TRAVEL EXPENSES

	31 Desember/December 31		
	2020	2019	
Beban Perjalanan Biasa	406.640.343.842	589.759.804.301	Common Travel Expenses
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	23.387.259.630	32.605.316.820	Official Travel in Town Expenses
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	16.047.080.270	63.109.636.211	Official Travel Meeting Package in Town Expenses
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan COVID-19	805.800.000	-	Official Travel Meeting Handling the COVID-19 Pandemic
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	5.725.160.089	24.219.493.658	Package out Town Expenses
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	11.909.969.107	59.782.855.036	Overseas Common Travel Expenses
Jumlah	464.515.612.938	769.477.106.026	Total

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp464.515.612.938 dan Rp769.477.106.026 terjadi penurunan sebesar Rp304.961.493.088 atau 39,63%.

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Total Official Travel Expenses for the period ended 31 December 2020 and 31 December 2019 amounting to Rp464,515,612,938 and Rp769,477,106,026, respectively, there was a decrease of Rp304,961,493,088 or 39.63% .

Official Travel Expenses are expenses incurred for official travel in the context of carrying out duties, functions and positions.

26. BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

26. DEPRECIATION AND AMORTIZATION EXPENSES

	31 Desember/December 31		
	2020	2019	
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	151.925.293.711	176.650.242.162	Equipment and machinery Depreciation Expenses
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	61.846.219.096	60.492.161.221	Properties and Buildings Depreciation Expenses
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	18.375.736.232	16.629.810.874	Road, irrigation and network Depreciation Expenses
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	163.424.883	139.355.000	Other assets Depreciation Expenses
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan	43.069.402	95.521.067	Unused assets in operation Depreciation Expenses
Beban Amortisasi <i>Software</i>	5.038.667.579	8.161.915.112	Software Depreciation Expenses
Beban Amortisasi Lisensi	9.050.340.590	8.222.970.513	License Amortization Expenses
Beban Amortisasi ATB yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	4.478.015	1.368.393.534	Unused assets in operation Amortization Expenses
Jumlah	246.447.229.508	271.760.369.483	Total

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp246.447.229.508 dan Rp271.760.369.483, terjadi penurunan sebesar Rp23.313.139.975 atau 9,31%.

Total Depreciation and Amortization Expenses for the period ended December 31, 2020 and December 31, 2019 amounting to Rp246,447,229,508 and Rp271,760,369,483, respectively, a decrease of Rp23,313,139,975 or 9.31%.

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud.

Depreciation and Amortization Expense is an expense to record the systematic allocation of the depreciable assets value over the useful life of the asset. Meanwhile, Amortization Expense is used to record the decrease in economic benefits allocation for Intangible Assets.

27. BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH

27. ALLOWANCE FOR BAD DEBT EXPENSES

	31 Desember/December 31		
	2020	2019	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jk Pendek			Allowance for Bad Debt Expenses - Short Term Receivable
- Piutang Jangka Pendek	23.403.349	1.504.696	Short Term Receivable
- Piutang Lancar TP/TGR	49.999	(81.249)	Current Position - Indemnification of Treasury/Claims Bills
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jk Panjang	37.563.741	(107.289.855)	Allowance for Bad Debt Expenses - Long Term Receivable
Jumlah	61.017.089	(105.866.408)	Total

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp61.017.089 dan (Rp105.866.408) terjadi kenaikan sebesar Rp166.883.497 atau 157,64%.

Total Allowance for Doubtful Accounts for the period ended December 31, 2020 and December 31, 2019 amounted to Rp61,017,089, respectively and (Rp105,866,408) there was an increase of Rp166,883,497 or 157.64%.

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode.

Allowance for Doubtful Accounts is an expense to record the estimated uncollectible accounts for a period.

28. KEGIATAN NON OPERASIONAL

28. NON OPERASIONAL ACTIVITIES

	31 Desember/December 31		
	2020	2019	
Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar			<i>Surplus (Deficit) Release of Non Current Assets</i>
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	3.430.476.561	2.629.932.884	<i>Gain on Disposal of noncurrent Assets</i>
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	(1.567.093.744)	(15.881.033.062)	<i>Loss on Disposal of noncurrent Assets</i>
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			<i>Surplus/Deficit of Other Non Operation activities</i>
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1.903.842.811	1.728.334.551	<i>Gain on Other non operation activities</i>
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(1.636.377.906)	(1.156.124.685)	<i>Loss on Other non operation activities</i>
Jumlah Surplus (Defisit)	2.130.847.722	(12.678.890.312)	Total Surplus (Deficit)

29. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

29. STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY

- a. Ekuitas awal
 Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 1 januari 2020 dan 1 januari 2019 adalah masing-masing sebesar Rp8.813.069.820.947 dan Rp4.600.032.344.580.
 Nilai Ekuitas Awal Merupakan nilai ekuitas yang berasal dari nilai Ekuitas akhir tahun yang lalu.
- a. *Beginning Balance of Equitas*
Beginning Balance of Equitas on January 1, 2020 and January 1, 2019 is Rp8,813,069,820,947 and Rp4,600,032,344,580, respectively.
Initial Equity Value This is the value of equity derived from the value of equity at the end of the previous year.
- b. Surplus (Defisit) LO
 Untuk Periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 terjadi defisit LO masing-masing sebesar Rp3.345.100.146.965 dan Rp3.850.467.659.757.
 Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.
- b. *Surplus (Deficit) SO*
For the period ended December 31, 2020 and December 31, 2019, there was a SO deficit of Rp3,345,100,146,965 and Rp3,850,467,659,757, respectively.
LO deficit is the deficit between the surplus / deficit in operational activities, surplus / deficit in non-operational activities, and extraordinary items.
- c. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar.
 Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari Dampak Kumulatif perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar merupakan penyesuaian Nilai Aset, Koreksi Nilai Persediaan, Koreksi atas Reklasifikasi, Selisih Revaluasi Aset Tetap, Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Serta Koreksi Lain-lain yang dilakukan pada periode berjalan terhadap nilai ekuitas dari akun-akun aset pada tahun lalu.
- c. *Corrections that increase / decrease equity, among others, come from the cumulative impact of changes in accounting policies / fundamental errors.*
Corrections that increase / decrease equity, which among others come from the Cumulative Impact of Changes in Accounting Policies / Fundamental Errors are Asset Value adjustments, Inventory Value corrections, Reclassification corrections, Fixed Asset Revaluation Difference, Fixed Asset Value Corrections and Non-Revaluation and Other Corrections made in the current period against the equity value of asset accounts in the previous year.
The number of corrections that increase / decrease equity, which, among others, comes from the cumulative impact of changes in accounting policies / Fundamental Errors for the period ended 31 December 2020 and 31 December 2019 amounting to (Rp77,754,040,458) and Rp4,334,491,543,938 respectively.
Details of corrections that increase / decrease equity, which include, among others, the cumulative impact of changes in accounting policies / fundamental errors for the period ended 31 December 2020 and 31 December 2019 are presented in the following table:
- Jumlah Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan Akutansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar (Rp77.754.040.458) dan Rp4.334.491.543.938.
- Rincian Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas yang antara lain berasal dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akutansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 tersaji pada tabel berikut ini:

29. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LANJUTAN)

29. STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY (CONTINUED)

	31 Desember/December 31		
	2020	2019	
1. Koreksi atas Reklasifikasi			1. Corrections on Reclasification
Barang Konsumsi	48.000.000	18.611.325	Consumption Goods
Persediaan Lainnya	-	(18.700.397)	Other Inventories
Tanah	(390.189.700)	-	Land
Peralatan dan Mesin	460.333.614	21.656.864.347	Machinery and Equipment
Gedung dan Bangunan	(321.336.275)	(29.283.108.325)	Properties and Buildings
Jalan dan Jembatan	355.303.075	-	Road and Bridges
Irigasi	-	20.416.325.587	Irrigation
Jaringan	-	10.236.286.092	Network
Aset Tetap Renovasi	(118.704.000)	(10.109.612.335)	Renovated Fixed Assets
Aset Tetap Lainnya	38.500.000	-	Other Fixed Assets
Akumulasi Penyusutan			Accumulated Depreciation -
Peralatan dan Mesin	48.000.000	(710.945.343)	Machinery and Equipment
Akumulasi Penyusutan			Accumulated Depreciation -
Gedung dan Bangunan	(12.758.609.139)	117.976.702	Properties and Buildings
Akumulasi Penyusutan Irigasi	-	(385.903.515)	Accumulated Depreciation - Irrigation
Akumulasi Amortisasi Software	-	(1.196.346.937)	Accumulated Depreciation - Software
Jumlah	(12.638.702.425)	10.741.447.201	Total
2. Selisih Revaluasi Aset Tetap			2. The difference Over Fixed Assets Revaluation
Tanah	-	4.004.747.942.854	Land
Gedung dan Bangunan	200.922.594	64.520.194.696	Properties and Buildings
Jalan dan Jembatan	-	3.646.113.168	Road and Bridge
Irigasi	53.604.278	395.512.449	Irrigation
Akumulasi Penyusutan			Accumulated Depreciation -
Gedung dan Bangunan	26.959.704	222.124.000.744	Properties and Buildings
Akumulasi Penyusutan			Accumulated Depreciation -
Jalan dan Jembatan	-	12.958.349.289	Road and Bridges
Akumulasi Irigasi	3.352.888	3.271.503.664	Accumulated Depreciation - Irrigation
Jumlah	284.839.464	4.311.663.616.864	Total
3. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi			3. Correction Value Asset Non Revaluation
Belanja Modal Dibayar Dimuka	-	(7.734.954.000)	Prepaid Capital Expenditures
Tanah	(62.425.269.968)	(19.670.847.612)	Land
Peralatan dan Mesin	332.176.000	76.225.118	Machinery and Equipment
Gedung dan Bangunan	(107.020.794)	45.284.073.747	Properties and Buildings
Jalan dan Jembatan	-	1.593.676.416	Road and Bridges
Irigasi	-	343.682.210	Irrigation
Jaringan	-	89.976.000	Networking
Aset Tetap Renovasi	(770.713.920)	-	Renovated Fixed Assets
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	7.734.954.000	Construction In Progress
Akumulasi Penyusutan			Accumulated Depreciation -
Peralatan dan Mesin	(269.601.125)	(76.225.118)	Machinery and Equipment
Akumulasi Penyusutan			Accumulated Depreciation -
Gedung dan Bangunan	(365.921.852)	(12.707.556.962)	Properties and Buildings
Akumulasi Penyusutan			Accumulated Depreciation -
Jalan dan Jembatan	-	(5.139.854.798)	Road and Bridges
Akumulasi Penyusutan Irigasi	(6.425.698)	(364.092.730)	Accumulated Depreciation Irrigation
Akumulasi Penyusutan Jaringan		(17.995.200)	Accumulated Depreciation Networking
Akumulasi Penyusutan aset Tetap yang Tidak Digunakan	-	4.655.110	Accumulated Depreciation Fixed Asset Not Used
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(63.612.777.357)	9.415.716.181	Correction Value Asset Non Revaluation
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	-	3.856.994.037	Accumulated Amortization of Intangible Assets that are not Used in Government Operations
Jumlah	(63.612.777.357)	13.272.710.218	Total

29. STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY (CONTINUED)

	31 Desember/December 31 2020	2019	
4. Lain-lain			4. Others
Koreksi Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	2.396.385.896	(28.977.394.642)	Other Cash Corrections in Treasurer
Koreksi Piutang	4.681.750	(41.098.200)	Receivable Correction
Koreksi Kewajiban	(1.522.827.521)	(8.462.123.995)	Liability Correction
Koreksi Pendapatan	(2.422.401.178)	1.218.420.860	Revenue Correction
Koreksi Beban	(243.239.087)	35.075.965.632	Expenses Correction
Jumlah	(1.787.400.140)	(1.186.230.345)	Total
Jumlah Koreksi Yang Menambah/ (Mengurangi) Ekuitas	(77.754.040.458)	4.334.491.543.938	Total of Corrections that Add / (Reduces) Equity
d. Transaksi antar entitas			d. Transactions between entities
Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp3.421.688.799.389 dan Rp3.729.013.592.186. Transaksi Antar Entitas merupakan selisih antara akun Ditagihkan Ke Entitas Lain dan Diterima Dari Entitas Lain ditambah dengan selisih antara akun Transfer keluar dan Transfer Masuk, serta ditambah dengan Pengesahan Hibah Langsung.			Transaction Value between Entities for the period ended December 31, 2020 and December 31, 2019 amounting to Rp3,421,688,799,389 and Rp3,729,013,592,186, respectively. Inter-Entity Transaction is the difference between accounts Billed to Other Entities and Received from Other Entities plus the difference between outgoing Transfer and Incoming Transfer accounts, plus Direct Grant Endorsement.
	31 Desember/December 31 2020	2019	
Ditagihkan ke Entitas Lain	3.439.084.663.084	3.730.775.875.248	Accounts Billed to Other Entities
Diterima dari Entitas Lain	(25.364.103.898)	(22.375.462.579)	Received from Other Entities
Transfer Keluar	(59.705.276.491)	(74.495.868.183)	Transfer Out
Transfer Masuk	59.705.276.491	72.916.598.750	Incoming Transfer
Pengesahan Hibah Langsung	7.968.240.203	22.192.448.950	The Validation of Direct Grants
Jumlah	3.421.688.799.389	3.729.013.592.186	Total
e. Ekuitas Akhir			e. Ending Balance of Equity
Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp8.811.904.432.913 dan Rp8.813.069.820.947.			Final Equity Value for the period ended December 31, 2020 and December 31, 2019, amounting to Rp8,811,904,432,913 and Rp8,813,069,820,947, respectively.

30. OTHER SIGNIFICAN INFORMATIONS

- a. Restrukturisasi Rekening Pengeluaran
- Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, Kementerian Negara/Lembaga diharuskan mengungkapkan dalam Laporan Keuangan rekening yang digunakan dalam kegiatan operasionalnya.

Dalam rangka memodernisasi pelaksanaan anggaran melalui pengelolaan rekening pengeluaran berbasis rekening virtual yang terkonsolidasi dan optimalisasi saldo rekening pengeluaran, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga, pemerintah menerbitkan kebijakan restrukturisasi pengelolaan rekening pengeluaran milik Kementerian Negara/Lembaga.

- a. *Expenditure Account Restructuring*
Based on the Regulation of the Minister of Finance Number 222 / PMK.05 / 2016 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of Finance Number 177 / PMK.05 / 2015 concerning Guidelines for the Preparation and Submission of Financial Statements of State Ministries / Institutions, State Ministries / Institutions are required to disclose in the Financial Statements the accounts used in its operational activities.

In order to modernize budget execution through the management of expenditure accounts based on consolidated virtual accounts and optimization of expenditure account balances, based on Regulation of the Minister of Finance Number 183 / PMK.05 / 2019 concerning Management of Expenditure Accounts Owned by State Ministries / Institutions, the government issued a restructuring policy for the management of owned expenditure accounts. State Ministries / Institutions.

30. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA (LANJUTAN)

30. OTHER SIGNIFICANT INFORMATIONS (LANJUTAN)

Menindaklanjuti hal tersebut, BPK RI melakukan restrukturisasi rekening sebagai berikut:

Following up on this matter, BPK RI conducted an account restructuring as follows:

- a. Membuka Rekening Induk pada Bank Negara Indonesia, Tbk (Persero) bernama RKK SETJEN BPK RI (910224937) untuk keperluan menampung dana Operasional berdasarkan surat Kepala Kantor KPPN Tipe A1 Jakarta VII Nomor S-699/WPB.12/KP.07/2019 tanggal 20 Februari 2020 merevisi surat sebelumnya Nomor S-646/WPB.12/KP.07/2019 tanggal 14 Februari 2020 tentang Persetujuan Pembukaan Rekening Induk Operasional Atas Nama Sekretariat Jenderal BPK;
- b. Membuka Rekening Satker dalam bentuk rekening virtual pada Bank Negara Indonesia, Tbk (Persero) melalui perubahan rekening bendahara pengeluaran pada 41 satker di lingkungan BPK berdasarkan Surat Kepala Kantor KPPN Tipe A1 Jakarta VII Nomor S-781/WPB.12/KP.07/2019 tanggal 26 Februari 2020 tentang Persetujuan Perubahan Rekening Satker Lingkup Sekretariat Jenderal BPK.

- a. Opening a Master Account at Bank Negara Indonesia, Tbk (Persero) named RKK SETJEN BPK RI (910224937) for the purpose of accommodating Operational funds based on the letter of the Head of KPPN Office Type A1 Jakarta VII Number S-699 / WPB.12 / KP.07 / 2019 dated 20 February 2020 revises the previous letter Number S-646 / WPB.12 / KP.07 / 2019 dated February 14, 2020 concerning the Approval of Opening an Operational Master Account in the Name of the Secretariat General of the BPK;
- b. Opening a Satker Account in the form of a virtual account at Bank Negara Indonesia, Tbk (Persero) through changes in spending treasurer accounts at 41 spending units within the BPK based on the Letter of the Head of the KPPN Type A1 Jakarta VII Office Number S-781 / WPB.12 / KP.07 / 2019 February 26, 2020 concerning Approval of Change in the Account of the Satker Scope of the Secretariat General of the BPK.

Sehingga dapat dijelaskan rekening pemerintah di BPK terdiri atas 41 rekening pengeluaran dan 1 rekening penerimaan Satker di lingkungan BPK.

So it can be explained that government accounts at the BPK consist of 41 expenditure accounts and 1 Satker revenue account within the BPK.

- b. Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Kantor Akuntan Publik Laporan Keuangan BPK Tahun 2019 telah diaudit oleh KAP Wisnu Karsono Soewito & Rekan dan koreksi atas angka pada laporan keuangan tersebut telah diakomodir dan menjadi saldo Audited yang menjadi saldo awal Laporan Keuangan Tahun 2020.

- b. Follow-up to the Audit Findings of the Public Accounting Firm The 2019 BPK Financial Statements have been audited by KAP Wisnu Karsono Soewito & Partners and corrections to the numbers in the financial statements have been accommodated and become the Audited balance which is the initial balance of the 2020 Financial Statements.

- c. Hibah Dari Pihak Luar Pada Badan Pemeriksa Keuangan
 1. Hibah Dari *Department Of Foreign Affairs And Trade* (Dfat) Pada Program *Australia Indonesia Partnership For Economic Development* (Aieco) Atau Prospera
Pada Tahun 2018, Satker BPK Pusat (003024) melakukan kerjasama dengan *Australian National Audit Office* (ANAO) yang didanai oleh Pemerintah Australia (AusAID) dalam bentuk Hibah melalui *Australia Indonesia Partnership for Economic Development* (AIECO) atau Program PROSPERA. Hibah PROSPERA mempunyai Nomor Register 23TSV7CA berdasar *Subsidiary Arrangement* antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia yang ditandatangani pada tanggal 4 Desember 2017.

- c. Grants from Outside Parties to the Supreme Audit Agency
 1. Grant from the Department of Foreign Affairs and Trade (Dfat) in the Australia Indonesia Partnership for Economic Development (Aieco) or Prospera Program
In 2018, the Central BPK Satker (003024) collaborated with the Australian National Audit Office (ANAO) funded by the Australian Government (AusAID) in the form of a grant through the Australia Indonesia Partnership for Economic Development (AIECO) or the PROSPERA Program. The PROSPERA grant has Register Number 23TSV7CA based on the Subsidiary Arrangement between the Australian Government and the Government of Indonesia which was signed on 4 December 2017.

Atas *Subsidiary Arrangement* tersebut, Per 31 Desember 2020 terdapat 2 (dua) BAST atas hibah langsung bentuk jasa yang berasal dari luar negeri. Adapun realisasi kegiatan hibah yang di-BAST-kan sebesar AUD457,994.72 atau sama dengan Rp4.460.433.778,00 dengan Memo Persetujuan Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat (MPHLBJS) Berharga dengan nomor 9842446291 dan sebesar AUD272,426.63 atau sama dengan Rp2.680.228.535,26 dengan MPHLBJS nomor 1001082810.

For the Subsidiary Arrangement, As of December 31, 2020 there were 2 (two) BASTs for direct grants in the form of services originating from abroad. The realization of the grant activity that was BAST was amounting to AUD457,994.72 or equal to Rp4,460,433,778.00 with a Memo of Approval for Recording of Direct Grants in the Form of Goods / Services / Letter (MPHLBJS) with number 9842446291 and amounting to AUD272,426.63 or the same. with Rp2,680,228,535.26 with MPHLBJS number 1001082810.

30. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA (LANJUTAN)

30. OTHER SIGNIFICANT INFORMATIONS (LANJUTAN)

- c. Hibah Dari Pihak Luar Pada Badan Pemeriksa Keuangan (Lanjutan)
2. Hibah Dari Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (Usaid) Pada Pada Program Usaid Cegah
- Pada tanggal 4 Agustus 2016, BPK RI dan Pihak *United States Agency for International Development (USAID)* menandatangani Perjanjian Bantuan (*Assistance Agreement*) dengan nomor 497-AA-030. Bantuan yang diberikan melalui Program USAID CEGAH dilaksanakan antara 31 Mei 2016 s.d 31 Desember 2019. Bantuan bertujuan untuk menguatkan kementerian/Lembaga yang berwenang dalam melakukan pencegahan korupsi. Hibah USAID CEGAH telah dilakukan register pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) dengan nomor register 2DS44SFA.
- Pada tanggal 03 Maret 2020 telah dilakukan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) atas Program USAID CEGAH dengan nomor BAST 167/USAID-INA/BAST-Service/DRG. Nilai atas hibah tersebut sebesar USD58.190,54 atau sama dengan Rp827.578.190,00 dengan nomor Persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga adalah 2020182003024001.

- c. *Grants from Outside Parties to the Supreme Audit Agency (Continued)*
2. *Grant from the United States Agency for International Development (Usaid) on the Usaid Prevent Program*
- On August 4, 2016, BPK RI and the United States Agency for International Development (USAID) signed an Assistance Agreement number 497-AA-030. The assistance provided through the USAID CEGAH Program was carried out between 31 May 2016 and 31 December 2019. The assistance aims to strengthen the ministries / agencies authorized to prevent corruption. The USAID CEGAH grant has been registered at the Directorate General of Financing and Risk Management (DJPPR) with register number 2DS44SFA.*
- On March 03, 2020, a Handover Report (BAST) was signed for the USAID CEGAH Program with number BAST 167 / USAID-INA / BAST-Service / DRG. The value of the grant is USD 58,190.54 or the same as Rp827,578,190.00 with the number of Approval for Registration of Direct Grants in the form of goods / services / securities is 2020182003024001*

31. KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

31. SUBSEQUENT EVENT

- a. Setelah berakhirnya tahun anggaran per 31 Desember 2020, terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca yaitu pada tanggal 05 April 2021 terjadi bencana badai siklon seroja yang melanda beberapa wilayah di lingkup Provinsi NTT termasuk Kota Kupang. BPK Perwakilan Provinsi NTT yang berlokasi di Kota Kupang juga mengalami dampak kerusakan atas Barang Milik Negara (BMN) antara lain berupa:
1. Kerusakan Gedung Arsip berupa kerusakan plafon dan atap;
 2. Kerusakan pada Pagar Tembok Kantor;
 3. Kerusakan Plafond dan Atap Rumah negara golongan II berupa asrama
 4. Kerusakan rumah negara golongan I tipe B
 5. Kerusakan pada plafon gedung kantor
 6. Kerusakan pada genset kantor
- Sampai dengan laporan ini diterbitkan , BPK Perwakilan Provinsi NTT masih melakukan perhitungan atas volume kerusakan BMN, serta belum dilakukan perubahan status atas BMN yang terdampak bencana tersebut.
- b. Terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca yang mengakibatkan adanya beberapa kerusakan infrastruktur pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat dimana pada tanggal 15 Januari 2021 telah terjadi bencana gempa bumi di Provinsi Sulawesi Barat. Bencana alam gempa bumi tersebut mengakibatkan beberapa Barang Milik Negara (BMN) pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat mengalami kerusakan. BMN yang telah diidentifikasi terdampak antara lain: 1 unit gedung kantor rusak sedang (assessment PUPR), 2 unit rumah jabatan rusak ringan (plafon runtuh), 2 unit mess rusak ringan (plafon dan tegel jatuh), 1 unit pagar mess rusak berat (temboknya jatuh), dan trafo listrik gedung kantor juga rusak. Kerusakan terparah dialami BMN Gedung Kantor BPK Perwakilan Sulawesi Barat.

- a. *After the end of the fiscal year as of December 31, 2020, there was an important event after the balance sheet date, namely on April 5, 2021, a cyclone cyclone disaster struck several areas in NTT Province including Kupang City. The BPK Representative Office for NTT Province which is located in Kupang City also experienced the impact of damage to State Property (BMN), including:*
1. *Damage to the Archive Building in the form of ceiling and roof damage;*
 2. *Damage to Office Wall Fence;*
 3. *Damage to ceiling and roof of class II country houses in the form of dormitories*
 4. *Damage to country house class I type B*
 5. *Damage to the ceiling of the office building*
 6. *Damage to the office generator*
- Until this report is published, the BPK Representative of NTT Province is still calculating the volume of damage to BMN, and there has not been a change in the status of BMN that was affected by the disaster.*
- b. *There was an important incident after the balance sheet date which resulted in some infrastructure damage to the BPK Representative of West Sulawesi Province where on January 15, 2021 there was an earthquake in West Sulawesi Province. The earthquake natural disaster resulted in damage to several State Property (BMN) at the BPK Representative of West Sulawesi Province. BMN that has been identified as being affected include: 1 office building unit moderately damaged (PUPR assessment), 2 units of house with minor damage (collapsed ceiling), 2 units of lightly damaged mess (ceiling and fallen tiles), 1 unit of mess fence is severely damaged (wall fell), and the office building's power transformer was also damaged. The worst damage was experienced by BMN, West Sulawesi BPK Representative Office Building.*

